



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2011 (*Audited*)



*Ikhlas,
Integritas,
Bersih*



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679,
3811779, 3812216

Nomor : B.III/4/KU.00/694 /2012 Jakarta, 4 Mei 2012
Lamp : Satu berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Agama Tahun 2011 (Audited)

**Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan
Jakarta**



Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan buku Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2011 Audited sebagai pertanggungjawaban keuangan dari Kementerian Agama tahun 2011.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

A.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Keuangan dan BMN,


H. Achmad Fauzan. H, SH.MA
NIP. 19540514 197901 1 001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal, sebagai laporan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679,
3811779, 3812216


Nomor : B.III/4/KU.00/ 695 /2012 Jakarta, 4 Mei 2012
Lamp : Satu berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Agama Tahun 2011 (Audited)

**Kepada Yth.
Anggota Pembina Auditor Utama V
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Jakarta**

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan buku Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2011 Audited sebagai pertanggungjawaban keuangan dari Kementerian Agama tahun 2011.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

A.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Keuangan dan BMN,


H. Achmad Fauzan. H, SH.MA
NIP. 19540514 197901 1 001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal, sebagai laporan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679,
3811779,3812216

Nomor : B.III/4/KU.00/694 /2012 Jakarta, 4 Mei 2012
Lamp : Satu berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Agama Tahun 2011 (Audited)

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan
Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan buku Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2011 Audited sebagai pertanggungjawaban keuangan dari Kementerian Agama tahun 2011.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

A.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Keuangan dan BMN,


H. Achmad Fauzan. H, SH.MA
NIP. 19540514 197901 1 001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal, sebagai laporan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2011 (*Audited*)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia dan hidayahNYA, buku Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2011 *Audited* sudah dapat diselesaikan dan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan tanggal 7 Mei 2012. Laporan Keuangan ini adalah bentuk pertanggungjawaban Menteri Agama sebagai pengguna anggaran dalam pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2011 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2011 sudah dilakukan audit oleh Tim Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Hasil pemeriksaan BPK RI memberikan penilaian bahwa data transaksi keuangan sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Laporan Keuangan Tahun 2011 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, walaupun diakui masih terdapat catatan penggunaan PNBPN secara langsung, kesalahan klasifikasi pembebanan anggaran, dan aset tetap hasil inventarisasi dan penilaian kembali menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan berbeda dengan nilai koreksi yang dilaporkan dalam laporan BMN Kementerian Agama.

Maksud dan tujuan penggandaan buku laporan keuangan ini adalah untuk disebarluaskan ke seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama sebagai pedoman dalam menyusun Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2012, sehingga diharapkan dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Akhirnya, kami berharap buku laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kebijakan di lingkungan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pemerintah.

Jakarta, 29 Juni 2012

A.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Keuangan dan BMN

H. Achmad Fauzan, H. SH
NIP. 19540514 197901 1 001

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNYA, Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2011 *Audited* dapat kami susun dan selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Kementerian Keuangan R.I. Laporan Keuangan Kementerian Agama ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Kementerian Agama atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2011 *Audited* sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama. Sejalan dengan peraturan tersebut, penyusunan laporan keuangan ini berproses sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan yang merujuk kepada masing-masing Eselon I Pusat.

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2011 *Audited* disusun berdasarkan laporan keuangan yang diterima dari 10 (sepuluh) Unit Eselon I selaku UAPPA-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I) yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan Badan Litbang dan Diklat sedangkan teknis penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama, mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-65/PB/2010 pasal 8 ayat (2), terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2011 *Audited* menyajikan tiga hal pokok, yaitu:

1. LRA menyajikan informasi tentang Realisasi Pendapatan dan Belanja. Realisasi Pendapatan Kementerian Agama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp778.606.513.275,- atau 127,81 persen dari Estimasi Pendapatan terlapor sebesar Rp609.179.299.832,-. Sementara itu, realisasi Belanja Kementerian Agama adalah sebesar Rp33.208.317.300.720,- atau 93,53 persen dari pagu anggaran terlapor sebesar Rp35.506.282.990.000,-;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2011. Neraca Kementerian Agama menginformasikan nilai Aset Kementerian Agama sebesar Rp32.889.476.000.432,- yang terdiri dari Aset Lancar


Rp253.454.673.272,- Aset Tetap Rp29.285.034.031.095,- dan Aset Lainnya Rp3.350.987.296.065,-. Sedangkan Kewajiban Kementerian Agama sebesar Rp3.574.915.973.197,- sehingga Ekuitas Dana (Kekayaan Bersih) Kementerian Agama per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp29.314.560.027.235,-;

3. Catatan atas Laporan Keuangan adalah tambahan informasi yang dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;

Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2011 *Audited* telah direviu oleh Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan berstatus *Audited* karena sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan, semoga laporan keuangan ini dapat menjadi bukti atas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBN TA 2011 di lingkungan Kementerian Agama sehingga dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Jakarta, 30 April 2012
A.n. Menteri Agama R.I
Sekretaris Jenderal


↓ Bahrul Hayat, Ph.D. †

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	I
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	v
Daftar Lampiran	vi
Daftar Singkatan	vii
Daftar Catatan atas Laporan Keuangan	viii
Opini BPK	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Pernyataan Telah Diriviu	
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran (perbandingan 2011 dan 2010)	4
III. Neraca (perbandingan 2011 dan 2010)	6
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Dasar Hukum	9
A.2. Profil Kementerian Agama	10
A.3. Visi dan Misi Kementerian Agama	13
A.4. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama	13
A.5. Alokasi Anggaran	19
A.6. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	20
A.7. Kebijakan Akuntansi	21
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	27
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	27
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	27
B.3. Catatan Penting	45
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	46
C.1. Posisi Keuangan Secara Umum	46
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	47
V. Suplemen	
1. Rincian Realisasi Anggaran Belanja Menurut Satuan Kerja	
2. Rincian Realisasi Anggaran Belanja Menurut Sumber Dana dan Kegiatan	
3. Laporan Rekening Per 31 Desember 2011	
4. Laporan Barang Pengguna Tahunan	
5. Ikhtisar Laporan Lembaga Non Struktural Independen	
6. Rencana Tindak Kementerian Agama terhadap hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2010 dan Monitoring penyelesaian tindak lanjut Kementerian Agama terhadap hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2010	
7. Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain	

DAFTAR TABEL

	Hal.
1. Alokasi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2011 berdasarkan Program	19
2. Jumlah Entitas Akuntansi Kementerian Agama	20
3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	27
4. Realisasi PNBP Lainnya	29
5. Rincian Realisasi PNBP Lainnya	29
6. Realisasi Pendapatan BLU 2011	30
7. Realisasi Pendapatan BLU 2011 Berdasarkan Satker	31
8. Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja	32
9. Rincian Realisasi Belanja	32
10. Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana	34
11. Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana RM (01)	34
12. Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana PLN (02)	34
13. Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana RMP (03)	35
14. Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana PNBP (04)	35
15. Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana BLU (06)	36
16. Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana Hibah Dalam Negeri (08)	36
17. Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana HLDN (10)	37
18. Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi	38
19. Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi Pelayanan Umum (01)	38
20. Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi Pariwisata dan Budaya (08)	39
21. Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi Agama (09)	39
22. Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi Pendidikan (10)	40
23. Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi Perlindungan Sosial (11)	40
24. Rincian Belanja Pegawai	42
25. Rincian Belanja Barang	43
26. Rincian Belanja Modal	44
27. Rincian Belanja Bantuan Sosial	44
28. Neraca Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	46
29. Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I	47
30. Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I	48
31. Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I	49
32. Kas Pada Badan Layanan Umum Per Eselon I	49
33. Piutang Bukan Pajak Per Eselon I	50
34. Uang Muka Belanja Per Eselon I	50
35. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Eselon I	51
36. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Per Eselon I	51
37. Persediaan Per Eselon I	52

38. Persediaan BLU Per Eselon I	52
39. Komponen Aset Tetap	53
40. Komponen Aset Tetap Satker Non BLU	55
41. Tanah Non BLU Per Eselon I	56
42. Peralatan dan Mesin Non BLU Per Eselon I	56
43. Gedung dan Bangunan Non BLU Per Eselon I	56
44. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Non BLU Per Eselon I	57
45. Aset Tetap Lainnya Non BLU Per Eselon I	57
46. Konstruksi Dalam Pengerjaan Non BLU Per Eselon I	57
47. Komponen Aset Tetap Badan Layanan Umum	58
48. Komponen Aset Lainnya	58
49. Aset Tak Berwujud Non BLU Per Eselon I	59
50. Aset Tak Berwujud BLU Per Eselon I	59
51. Aset Lain-Lain Non BLU Per Eselon I	60
52. Aset Lain-Lain BLU Per Eselon I	60
53. Akun Lawan (Kontra) Utang Kepada Pihak Ketiga	61
54. Utang Kepada Pihak Ketiga Per Eselon I	62
55. Pendapatan Diterima di Muka Per Eselon I	62
56. Uang Muka KPPN Per Eselon I	63
57. Akun Lawan (Kontra) Pendapatan yang Ditangguhkan	63
58. Pendapatan yang Ditangguhkan Per Eselon I	63
59. Utang Jangka Pendek Lainnya Per Eselon I	64
60. Akun Lawan (Kontra) Cadangan Piutang	64
61. Cadangan Piutang Per Eselon I	65
62. Cadangan Persediaan Per Eselon I	65
63. Akun Lawan (Kontra) Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	66
64. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Per Eselon I	66
65. Dana Lancar BLU Per Eselon I	67
66. Barang/Jasa Yang Harus Diterima Per Eselon I	67
67. Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan Per Eselon I	68
68. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Per Eselon I	68
69. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Per Eselon I	69

DAFTAR GRAFIK

	Hal.
1. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011	29
2. Komposisi Realisasi Belanja Kementerian Agama di Satker Pusat dan Daerah TA 2011	32
3. Komposisi Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi TA 2011	41
4. Komposisi Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Jenis Belanja TA 2011	42
5. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada Neraca Tahun 2007 – 2011	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Kementerian
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Kementerian
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Fungsi, Sub Fungsi, Program
4. Kertas Kerja Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual
5. Data Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual
6. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	: Badan Layanan Umum
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DAU	: Dana Abadi Umat
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IP	: Inventarisasi dan Penilaian
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
LKKA	: Laporan Keuangan Kementerian Agama
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LRAB	: Laporan Realisasi Anggaran Belanja
MAK	: Mata Anggaran Keluaran
MAP	: Mata Anggaran Penerimaan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
TA	: Tahun Anggaran
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TUP	: Tagihan Uang Persediaan
UAKPA	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAKPB	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
UAPPA-W	: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
UAPPB-W	: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah
UAPPA-E1	: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1
UAPPB-E1	: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1
UIN	: Universitas Islam Negeri
UP	: Uang Persediaan
WDP	: Wajar Dengan Pengecualian
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Catatan	A.1	Dasar Hukum
Catatan	A.2	Profil Kementerian Agama
Catatan	A.3	Visi dan Misi Kementerian Agama
Catatan	A.4	Tugas dan Fungsi Kementerian Agama
Catatan	A.5	Alokasi Anggaran
Catatan	A.6	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Catatan	A.7	Kebijakan Akuntansi
Catatan	A.7.1	Pendapatan
Catatan	A.7.2	Belanja
Catatan	A.7.3	Aset
Catatan	A.7.3.1	Aset Lancar
Catatan	A.7.3.2	Aset Tetap
Catatan	A.7.3.3	Aset Lainnya
Catatan	A.7.4	Kewajiban
Catatan	A.7.5	Ekuitas Dana
Catatan	A.7.6	Transaksi Valuta Asing

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

Catatan	B.1	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran
Catatan	B.2	Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Catatan	B.2.1.1.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Catatan	B.2.1.1.2	Pendapatan BLU
Catatan	B.2.2	Belanja
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pegawai
Catatan	B.2.2.2	Belanja Barang
Catatan	B.2.2.3	Belanja Modal
Catatan	B.2.2.4	Belanja Bantuan Sosial
Catatan	B.3	Catatan Penting

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Catatan	C.1	Posisi Keuangan Secara Umum
Catatan	C.2	Penjelasan Per Pos Neraca
Catatan	C.2.1	Kas di Bendahara Pengeluaran
Catatan	C.2.2	Kas di Bendahara Penerimaan
Catatan	C.2.3	Kas Lainnya dan Setara Kas
Catatan	C.2.4	Kas Pada BLU
Catatan	C.2.5	Piutang Bukan Pajak
Catatan	C.2.6	Uang Muka Belanja
Catatan	C.2.7	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
Catatan	C.2.8	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
Catatan	C.2.9	Investasi Dalam Deposito
Catatan	C.2.10	Persediaan
Catatan	C.2.10.1	Persediaan

Catatan	C.2.10.2	Persediaan Badan Layanan Umum
Catatan	C.2.11	Aset Tetap
Catatan	C.2.11.1	Aset Tetap (Satker Non BLU)
Catatan	C.2.11.2	Aset Tetap Badan Layanan Umum
Catatan	C.2.12	Aset Lainnya
Catatan	C.2.13	Utang Kepada Pihak Ketiga
Catatan	C.2.14	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Catatan	C.2.15	Pendapatan Diterima Dimuka
Catatan	C.2.16	Uang Muka dari KPPN
Catatan	C.2.17	Pendapatan yang Ditangguhkan
Catatan	C.2.18	Utang Jangka Pendek Lainnya
Catatan	C.2.19	Cadangan Piutang
Catatan	C.2.20	Cadangan Persediaan
Catatan	C.2.21	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Catatan	C.2.22	Dana Lancar BLU
Catatan	C.2.23	Barang/Jasa Yang Harus Diterima
Catatan	C.2.24	Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan
Catatan	C.2.25	Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Catatan	C.2.26	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

OPINI

BPK



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Mei 2012

Nomor : 275/S/VII-XVIII/5/2012
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Kementerian Agama
Tahun 2011

Kepada Yth.
Menteri Agama RI
di
Jakarta

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2011, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2011 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2011 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama diketahui bahwa posisi keuangan per 31 Desember 2011 adalah jumlah Aset Lancar sebesar Rp253.454.673.272,00, Aset Tetap sebesar Rp29.285.034.031.095,00, Aset Lainnya sebesar Rp3.350.987.296.065,00, Kewajiban sebesar Rp330.503.100.961,00, dan Ekuitas Dana sebesar Rp32.558.972.899.471,00. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 meliputi realisasi pendapatan sebesar Rp778.606.513.275,00, belanja sebesar Rp33.208.317.300.720,00.

Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2011, BPK RI memberikan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan**. Hal yang diungkapkan dalam paragraf penjelasan adalah PNPB yang berasal dari penerimaan pada perguruan tinggi non BLU yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN sebesar Rp3.872.245.640,00, kesalahan klasifikasi pembebanan anggaran sebesar Rp42.681.600.519,00 dan aset tetap hasil inventarisasi dan penilaian kembali menurut data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan berbeda dengan nilai koreksi yang dilaporkan dalam Laporan BMN Kementerian Agama sebesar Rp48.664.474.078,00.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan kas pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Persediaan belum tertib;
- b. Penatausahaan aset tetap belum tertib serta terdapat selisih sebesar Rp48.664.474.078,00 antara nilai koreksi aset tetap berdasarkan Data Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara dengan nilai koreksi yang telah terinput ke dalam Aplikasi SIMAK BMN Kementerian Agama;

- c. Pengendalian atas pengelolaan Bantuan Pendidikan tidak memadai;
- d. Penyaluran belanja Bantuan Sosial belum didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh Kementerian Agama senilai Rp49.486.378.565,00 dan tanah wakaf yang berdiri di atasnya bangunan milik Kementerian Agama minimal senilai Rp744.063.000,00 belum didukung bukti kepemilikan;
- b. PNPB di lingkungan Kementerian Agama digunakan langsung tanpa mekanisme APBN sebesar Rp3.872.245.640,00 dan belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp2.392.022.187,35 serta terlambat disetor dari rekening penerimaan ke Kas Negara sebesar Rp81.753.858.701,00;
- c. Pengelompokan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Sosial pada saat penganggaran tidak sesuai dengan substansi kegiatan yang dilaksanakan. Dari nilai realisasi belanja TA 2011, ditemukan kesalahan klasifikasi pembebanan anggaran sebesar Rp42.681.600.519,00, yaitu (1) Anggaran Belanja Barang yang direalisasikan untuk kegiatan Belanja Modal sebesar Rp5.316.124.334,00, (2) Anggaran Belanja Modal yang direalisasikan untuk kegiatan Belanja Barang sebesar Rp600.566.875,00, (3) Anggaran Belanja Barang yang direalisasikan untuk kegiatan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp19.728.248.300,00, (4) Anggaran Belanja Modal yang direalisasikan untuk kegiatan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp345.461.010,00 dan (5) Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang direalisasikan untuk kegiatan Belanja Barang sebesar Rp16.691.200.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Agama agar:

1. Menetapkan kembali rencana aksi pembinaan pengelolaan kas, persediaan dan aset tetap berikut mekanisme pengimplementasiannya dan target penyelesaiannya serta menyosialisasikan rencana aksi tersebut kepada seluruh satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Agama;
2. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama mengambil langkah strategis terkait hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap yaitu dengan memerintahkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama untuk merekonsiliasi kembali data hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk memastikan bahwa seluruh hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap telah dicatat dan dilaporkan seluruhnya dalam Laporan BMN satuan kerja;
3. Meninjau kembali dan merevisi KMA Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemenag, khususnya terkait pembebanan biaya pendidikan bagi yang berstatus izin belajar serta memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk menyusun petunjuk teknis tentang pemberian beasiswa, memperbaiki tata kerja pemrosesan penerbitan SK izin/tugas belajar, dan segera menyosialisasikannya revisi KMA serta petunjuk teknis tentang pemberian beasiswa kepada seluruh pegawai dan satker di lingkungan Kemenag.
4. Memerintahkan para pejabat Eselon I terkait untuk berkoordinasi dalam menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan / teknis pemberian bantuan sosial secara terarah dan terintegrasi dengan mempedomani peraturan

perundangan yang berlaku dan melaksanakan monitoring dan evaluasi yang memadai atas kegiatan perencanaan, penyaluran dan pertanggungjawaban bansos sehingga bansos dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran termasuk mengurangi tidak terserapnya dana bansos secara optimal;


5. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk menginstruksikan Kepala Satker berkoordinasi dengan Biro Perencanaan untuk penganggaran sertifikasi tanah serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pengelola Barang yang lalai dalam mengadministrasikan bukti kepemilikan aset tetap dan mengupayakan diperolehnya bukti kepemilikan aset yang belum ditemukan;
6. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk menginstruksikan Kepala Satuan Kerja perguruan tinggi terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pembantu Penerimaan yang lalai dalam menyetorkan seluruh PNBPN ke Kas Negara dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas ketepatan penyetoran PNBPN di lingkungannya serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, Ketua STAIN Jurai Siwo Metro, Ketua STAIN Salatiga, Ketua STAIN Pontianak dan Ketua STAKPN Ambon yang menggunakan PNBPN langsung di luar mekanisme APBN;
7. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama menginstruksikan seluruh unit perencanaan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang pengklasifikasian jenis belanja dalam penyusunan anggaran.

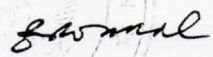
Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 22 a/LHP/XVIII/05/2012, Nomor 22 b/LHP/XVIII/05/2012 dan Nomor 22 c/LHP/XVIII/05/2012 masing-masing bertanggal 28 Mei 2012.

Kami persilakan Menteri Agama menelaah hasil pemeriksaan lengkap terlampir dan selanjutnya kami mengharapkan agar Menteri Agama menyampaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan ini.

Atas perhatian dan kerjasama Menteri Agama, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota V, 


Sapto Amal Damandari

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPK RI di Jakarta (tanpa lampiran);
2. Yth. Wakil Ketua BPK RI di Jakarta (tanpa lampiran);
3. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI di Jakarta;
6. Yth. Inspektur Utama BPK RI di Jakarta;
7. Yth. Kepala Ditama Revbang BPK RI di Jakarta.



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR PERNYATAAN

TANGGUNG JAWAB



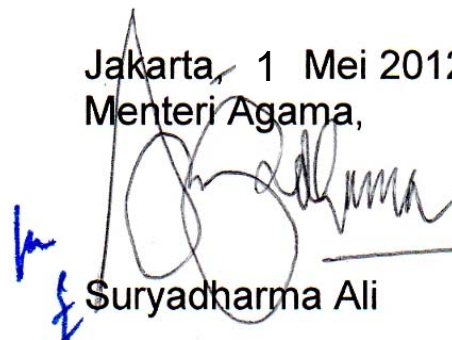
**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Keuangan Kementerian Agama (Bagian Anggaran 025) yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan Kementerian Agama secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 1 Mei 2012
Menteri Agama,



Suryadharna Ali



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR PERNYATAAN

REVIU



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN RS. FATMAWATI NOMOR 33 A KOTAK POS 3687
TELEPON 021- 75916038, 7691849 FACSIMILE 021-7692112
JAKARTA 12420

PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2011

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Agama berupa Neraca untuk Tahun anggaran 2011, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar review atas laporan keuangan Kementerian Agama. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Agama.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 22 Februari 2012
Inspektur Jenderal



DR. H. Mundzier Suparta, M.A.
NIP 195407071984021001



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN

RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 9 ayat (g) mengamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Demikian juga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, setiap kementerian Negara/Lembaga sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semesteran dan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Tahun 2011 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan ini disertai dengan Suplemen berupa Realisasi Anggaran Menurut Satuan Kerja, Realisasi Anggaran Menurut Sumber Dana Dan Kegiatan, Laporan Rekening, Laporan Barang Pengguna Tahunan, Laporan Keuangan BPIH 31 Desember 2011 dan DAU, Ikhtisar Laporan Lembaga Non Struktural Independen.

LKKA Tahun 2011 *Audited* ini disusun secara berjenjang yang merujuk pada Unit Eselon I Pusat mulai dari UAKPA yang berjumlah 4.463 satker dengan jumlah DIPA sebanyak 6.961 DIPA, 33 UAPPA-W, 10 UAPPA-E1 dan 1 UAPA.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2011 *Audited* menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011. Realisasi Pendapatan Kementerian Agama pada TA 2011 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp778.606.513.275,- atau mencapai 127,81 persen dari estimasi pendapatan yang sebesar Rp609.179.299.832,-.

Realisasi Belanja Kementerian Agama pada TA 2011 adalah sebesar Rp33.208.317.300.720,- atau mencapai 93,53 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp35.506.282.990.000,-. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2011 dan 2010 disajikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)				
		TA 2011		TA 2010
Uraian	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	609.179.299.832	778.606.513.275	527.108.843.945	683.084.301.215
Belanja Rupiah Murni	33.815.509.972.000	32.220.756.097.910	29.066.682.080.237	27.065.482.492.890
Belanja Pinjaman Luar Negeri	706.722.131.000	250.578.156.541	861.484.638.000	356.097.357.693
Belanja Rupiah Murni Pendamping	102.055.622.000	75.895.019.291	88.168.643.000	83.161.692.514
Belanja PNBP	266.486.274.000	221.635.631.121	230.944.797.000	197.463.430.279
Belanja Pinjaman Dalam Negeri	406.356.000	(740.250)		
Belanja BLU	482.942.635.000	434.525.656.307	390.132.510.000	344.941.945.604

Belanja Hibah Dalam Negeri	1.000.000.000	1.000.000.000		
Belanja Hibah Luar Negeri	126.660.000.000	-		
Belanja Hibah Langsung Dalam Negeri	4.500.000.000	3.927.479.800		
JUMLAH	35.506.282.990.000	33.208.317.300.720	30.627.412.668.237	28.047.146.918.980

2. NERACA

Neraca Kementerian Agama menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana Kementerian Agama pada tanggal 31 Desember 2011.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp32.889.476.000.432,-, Kewajiban adalah sebesar Rp3.574.915.973.197,- dan Ekuitas Dana adalah sebesar Rp29.314.560.027.235,- Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)
Aset	32.889.476.000.432	29.107.295.882.908	3.782.180.117.524
Aset Lancar	253.454.673.272	201.270.414.739	52.184.258.533
Aset Tetap	29.285.034.031.095	26.224.039.992.097	3.060.994.038.998
Aset Lainnya	3.350.987.296.065	2.681.985.476.072	669.001.819.993
Kewajiban dan Ekuitas Dana	32.889.476.000.432	29.107.295.882.908	3.782.180.117.524
Kewajiban	3.574.915.973.197	353.360.764.574	3.221.555.208.623
Kewajiban Jangka Pendek	3.574.915.973.197	353.360.764.574	3.221.555.208.623
Ekuitas Dana Neto	29.314.560.027.235	28.753.935.118.334	560.624.908.901
Ekuitas Dana Lancar	(77.048.427.689)	(152.090.349.835)	75.041.922.146
Ekuitas Dana Investasi	29.391.608.454.924	28.906.025.468.169	485.582.986.755

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Agama menguraikan dasar hukum, profil, kebijakan teknis, pendekatan penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Di samping itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan antara lain:

- a. Pendapatan PNBP selama tahun 2011 sebesar Rp778.606.513.275,- yang berasal dari NR Rp69.666.891.776,- pendidikan Rp192.714.592.490,- PNBP Umum Rp46.742.190.051,- dan PNBP BLU Rp469.482.838.958,-
- b. Alokasi terbesar dari total pagu Kementerian Agama adalah untuk Fungsi Pendidikan yaitu sebesar Rp30.491.585.410.000,- atau 85,88 persen dari total pagu Kementerian Agama, sedangkan alokasi anggaran untuk fungsi Agama sebagai *core business* Kementerian Agama hanya sebesar Rp1.559.257.104.000,- atau 4,39 persen dari total pagu Kementerian Agama.



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2011		TA 2010	
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	% Realisasi terhadap Anggaran
A. Pendapatan Negara dan Hibah					
I. Penerimaan Perpajakan	B.2.1	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri		0	0	0	0
2. Pajak Perpajakan Internasional		0	0	0	0
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	0	0	0	0
PNBP Lainnya	B.2.1.2.1				
1. Pendapatan Pendidikan		282.438.180.500	192.714.592.490	68,23	88,21
2. Pendapatan NR		33.014.622.800	69.666.891.776	211,02	113,68
3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya (Umum)		421.314.532	46.742.190.051	11.094,37	793,26
Jumlah PNBPN Lainnya		315.874.117.832	309.123.674.317	97,86	109,44
PNBP BLU	B.2.1.2.2				
1. Pendapatan Badan Layanan Umum		293.305.182.000	469.482.838.958	160,07	160,88
III. Penerimaan Hibah					
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		609.179.299.832	778.606.513.275	127,81	129,82
B. Belanja Negara	B.2.2				
Belanja Kementerian Agama	B.2.2.1				
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	15.920.695.351.000	15.845.666.787.785	99,53	96,32
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	6.267.437.236.680	5.585.188.101.506	89,11	86,86
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	3.758.336.780.320	3.045.969.015.978	81,05	79,41
4. Pembayaran Bunga Utang					
5. Subsidi					

Uraian	Catatan	TA 2011			TA 2010
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	% Realisasi terhadap Anggaran
6. Bantuan Sosial	B.2.2.1.4	9.559.813.622.000	8.731.493.395.451	91,34	91,3
7. Belanja Lain-lain					
Jumlah Belanja Negara (B)		35.506.282.990.000	33.208.317.300.720	93,53	91,46
C. Pembiayaan					
1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)		0	0	0	0
a. Perbankan Dalam Negeri		0	0	0	0
b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)		0	0	0	0
2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)		0	0	0	0
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri		0	0	0	0
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri		0	0	0	0
Jumlah Pembiayaan (C.1 + C.2)		0	0	0	0



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

NERACA

II. NERACA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1	2.772.512.926	9.723.647.912
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.2	2.579.653.331	2.931.949.230
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.3	10.104.236.574	10.915.757.698
Kas pada BLU	C.2.4	160.067.061.688	132.236.879.094
Jumlah Kas dan Bank		175.523.464.519	155.808.233.934
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.5	3.565.993.353	1.616.400.187
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		0	3.000.000
Uang Muka Belanja	C.2.6	1.774.516.357	3.666.667.259
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.2.7	1.911.791.625	2.640.363.334
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.2.8	335.446.062	253.340.069
Investasi Dalam Deposito	C.2.9	5.000.000.000	0
Jumlah Piutang		12.587.747.397	4.513.103.590
Persediaan	C.2.10.1	61.710.862.838	29.644.935.134
Persediaan Badan Layanan Umum	C.2.10.2	3.632.598.518	7.637.474.822
Jumlah Aset Lancar		253.454.673.272	201.270.414.739
Aset Tetap	C.2.11		
Tanah		7.120.538.505.013	6.914.314.239.874
Peralatan dan Mesin		2.639.418.104.688	2.046.077.682.947
Gedung dan Bangunan		11.552.572.043.252	9.638.800.689.872
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		156.205.096.293	109.254.023.572
Aset Tetap Lainnya		470.257.745.288	350.085.500.172
Konstruksi Dalam Pengerjaan		631.775.729.469	740.209.726.510
Tanah Badan Layanan Umum		2.996.569.510.060	3.296.541.100.387
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum		1.104.118.591.618	862.468.281.043
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum		2.145.299.077.879	1.593.320.149.429
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum		88.282.422.911	67.171.209.469
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum		68.224.230.158	61.835.405.417
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum		311.772.974.466	543.961.983.405
Jumlah Aset Tetap		29.285.034.031.095	26.224.039.992.097
Aset Lainnya	C.2.12		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			4.099.200
Aset Tak Berwujud		40.990.665.207	27.180.911.757
Aset Tak Berwujud-Badan Layanan Umum		15.851.399.401	10.743.020.664
Aset Lain-lain		46.617.514.732	2.641.484.115.488

Uraian	Catatan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum		3.114.844.489	2.573.328.963
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya		3.244.412.872.236	
Jumlah Aset Lainnya		3.350.987.296.065	2.681.985.476.072
JUMLAH ASET		32.889.476.000.432	29.107.295.882.908
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.13	3.557.037.840.052	334.119.122.227
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.14	501.818	0
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.15	9.154.923.970	2.962.989.081
Uang Muka dari KPPN	C.2.16	2.772.512.926	9.723.647.912
Pendapatan yang ditangguhkan	C.2.17	5.913.820.763	6.550.962.614
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.18	36.373.668	4.042.740
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.574.915.973.197	353.360.764.574
JUMLAH KEWAJIBAN		3.574.915.973.197	353.360.765.574
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
Cadangan Piutang	C.2.19	10.813.231.040	4.513.103.590
Cadangan Persediaan	C.2.20	65.343.461.356	37.282.409.956
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.21	(305.891.774.160)	(326.826.420.653)
Dana Lancar BLU	C.2.22	160.067.061.688	132.236.879.094
Barang/Jasa Yang Harus Diterima	C.2.23	1.774.516.357	3.666.667.259
Barang/Jasa Yang Harus Disediakan	C.2.24	(9.154.923.970)	(2.962.989.081)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(77.048.427.689)	(152.090.349.835)
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.25	29.285.034.031.095	26.224.039.992.097
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.2.26	106.574.423.829	2.681.985.476.072
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		29.391.608.454.924	28.906.025.468.169
JUMLAH EKUITAS DANA		29.314.560.027.235	28.753.935.118.334
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		32.889.476.000.432	29.107.295.882.908



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

C A L K

PENDAHULUAN

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Penyusunan
Laporan
Keuangan sebagai
wujud
tanggungjawab
Pengguna
Anggaran/Barang*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 9 ayat (g) mengamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Laporan Keuangan adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menteri Agama sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Agama berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Kewajiban ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 180 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Departemen Agama Tahun Anggaran 2011 ditetapkan bahwa didelegasikan kepada seluruh pimpinan satuan kerja (satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB). Pada tahun anggaran 2011 jumlah satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama mencapai 4.463 satker.

Pada tahun 2011 ini juga mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja untuk Kementerian Agama, yang berarti satu fungsi mempunyai satu DIPA. Hal ini memungkinkan suatu satuan kerja (satker) memiliki lebih dari satu DIPA, disesuaikan dengan fungsi yang ada. Ini berakibat di Kementerian Agama terdapat 6.961 DIPA (lebih banyak dari jumlah satker Kementerian Agama) karena satker-satker Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah (Kanwil) memiliki lebih dari satu DIPA. Anggaran berbasis kinerja juga menyebabkan terjadinya perubahan kode eselon untuk sebagian besar satker Kementerian Agama, yaitu satker-satker madrasah, PTAN dan Balai Diklat misalnya satker madrasah, PTAN, balai diklat dan litbang, dan seksi-seksi pada kankemenag yang sebelumnya berkode eselon 01 (Setjen) menjadi eselon 1 masing-masing.

Oleh karena itu, Laporan Keuangan Kementerian Agama disusun secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 sampai kepada tingkat UAPA sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penjenjangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Agama. Dalam peraturan tersebut, masing-masing jenjang pelaporan disebut Unit Akuntansi, yaitu: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Eselon I (UAPPA/B-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B).

Laporan Keuangan Kementerian Agama terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di lampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang terdapat di lingkungan Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (2) a. Sedangkan standar akuntansi yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan Kementerian Agama didasarkan kepada Basis Kas untuk pengakuan pendapatan & belanja dalam LRA dan Basis AkruaI untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

A.1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Agama.
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama.
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara AkruaI Pada Laporan Keuangan.
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

**Sejarah berdirinya
Kementerian Agama
RI**

A.2. PROFIL KEMENTERIAN AGAMA

Pada masa kemerdekaan, kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan, berdasarkan pada sifat dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas, sekaligus juga sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan yuridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1 dan 2:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

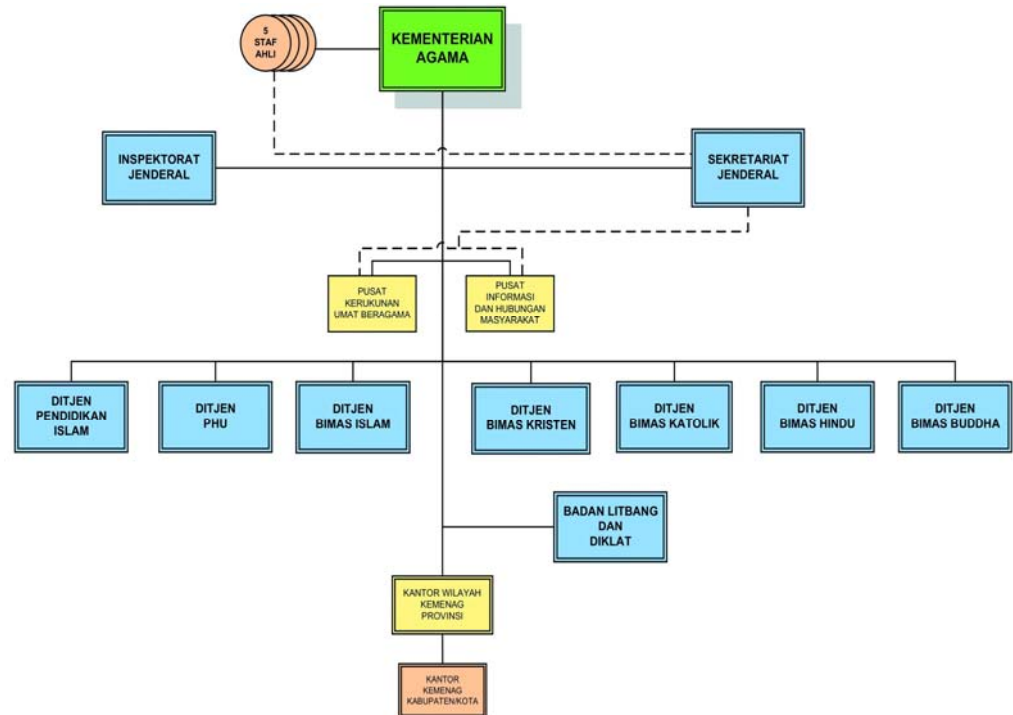
Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai Kementerian yang tersentralisasi secara vertikal, Kementerian Agama memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain untuk mencapai tujuan pembangunan bidang agama sebagaimana yang telah diamanatkan melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan, Kementerian Agama diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai tambah (*added value*) dalam mengisi tugas-tugas pembangunan di setiap lini, baik pada tingkat pusat maupun jajaran tingkat daerah. Nilai tambah ini tercermin baik melalui program pembangunan yang dikelola (agama dan pendidikan), sumber daya manusia, koordinasi struktural hingga ke kecamatan, serta interrelasi dengan para *stakeholders* baik dari para pemuka agama hingga para pengelola satuan pendidikan yang berasal dari masyarakat.

Dalam pelaksanaannya nilai tambah yang diharapkan dari Kementerian Agama belum dapat terwujud dengan maksimal bila tanpa didukung peran serta dan koordinasi lintas sektoral. Hal ini dapat dilihat melalui penerbitan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 yang menegaskan tentang perlunya Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral. Instruksi ini berisi imbauan Menteri Agama kepada segenap jajarannya di daerah untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan agama di daerahnya masing-masing. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa belanja dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Demikian pula struktur penganggaran program Kementerian Agama dipilah berdasarkan organisasi, fungsi dan jenis belanja. Dengan kata lain program-program yang akan dijalankan oleh Kementerian Agama struktur penganggarnya juga diatur oleh Undang-Undang terkait.

STRUKTUR ORGANISASI

**Struktur
Kementerian Agama**

Adapun struktur organisasi Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama adalah sebagaimana tampak dalam bagan di bawah ini:



Pada bulan Oktober 2011, sesuai dengan hasil *reshuffle* kabinet oleh Presiden Republik Indonesia, Kementerian Agama dibantu oleh satu orang Wakil Menteri Agama, akan tetapi secara struktural belum masuk ke dalam struktur organisasi Kementerian Agama sesuai dengan yang diatur dalam PMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama.

Kementerian Agama juga mempunyai kekhususan tersendiri dalam kaitan hubungan organisasi di wilayah atau provinsi. Kementerian Agama adalah salah satu Kementerian yang mempunyai Kantor Wilayah (setingkat eselon II) di setiap provinsi di Indonesia atau dengan kata lain Kementerian Agama yang berada di provinsi-provinsi dan kabupaten/kota tidak berada di bawah struktur pemerintah daerah.



Lokasi Kantor Wilayah Kementerian Agama tampak seperti dalam peta di atas:

1. Kanwil Kementerian Agama Prov. Aceh di Banda Aceh
2. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara di Medan
3. Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau di Pekanbaru
4. Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
5. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat di Padang
6. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jambi di Jambi
7. Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu di Bengkulu
8. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan di Palembang
9. Kanwil Kementerian Agama Prov. Bangka Belitung di Pangkal Pinang
10. Kanwil Kementerian Agama Prov. Lampung di Bandar Lampung
11. Kanwil Kementerian Agama Prov. Banten di Serang
12. Kanwil Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta
13. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat di Bandung
14. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah di Semarang
15. Kanwil Kementerian Agama Prov. D.I. Yogyakarta di Yogyakarta
16. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur di Surabaya
17. Kanwil Kementerian Agama Prov. Bali di Denpasar
18. Kanwil Kementerian Agama Prov. NTB di Mataram
19. Kanwil Kementerian Agama Prov. NTT di Kupang
20. Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Barat di Pontianak
21. Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Tengah di Palangkaraya
22. Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Selatan di Banjarmasin
23. Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Timur di Samarinda
24. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Utara di Manado
25. Kanwil Kementerian Agama Prov. Gorontalo di Gorontalo
26. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat di Mamuju
27. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu
28. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan di Makassar
29. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari
30. Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku Utara di Ternate
31. Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku di Ambon
32. Kanwil Kementerian Agama Prov. Papua Barat di Manokwari
33. Kanwil Kementerian Agama Prov. Papua di Jayapura

A.3. VISI DAN MISI KEMENTERIAN AGAMA

VISI

*Visi dan Misi
Kementerian Agama*

"Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin."

MISI

Berdasarkan Visi di atas, Kementerian Agama menetapkan Misi lima tahun kedepan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) meliputi:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
2. Meningkatkan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

A.4. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN AGAMA

*Tugas, Fungsi,
Program dan
Susunan Organisasi*

Secara umum ruang lingkup tugas Kementerian Agama sangat besar. Pada tahun 2011, struktur anggaran Kementerian Agama mengemban 3 fungsi, yaitu Pelayanan Umum, Agama, dan Pendidikan. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Agama Tahun 2010 – 2014 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2010 – 2014, program-program di lingkungan Kementerian Agama terdiri dari 11 program sesuai dengan jumlah unit Eselon I yang ada, dimana Sekjen mengemban dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negera Kementerian Agama. Sedangkan Eselon I lainnya melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun kesebelas program yang terdapat pada Kementerian Agama pada tahun 2011 ini adalah:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

*Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kementerian Agama*

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama pada tahun 2011 ini tercapai dengan sangat baik (100%), yang meliputi kegiatan Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu dan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Kementerian Agama juga telah melaksanakan kegiatan pengembangan kerukunan umat beragama baik di dalam maupun di luar negeri yang meliputi kegiatan, antara lain: dialog pemuda lintas agama berupa Bas Belia MABIMS; *interfaith dialogue* yang bersifat bilateral dengan beberapa negara Eropa, yaitu Ceko, Hungaria, Bulgaria, Spanyol, Prancis, Austria, Jerman dan Belanda; dan yang bersifat multilateral melalui forum dialog antar agama dan budaya Asia dan Eropa (*The Asia-Europe Meeting*).

Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Agama telah melakukan kegiatan, antara lain: penyempurnaan sistem perencanaan anggaran, peningkatan kualitas laporan

keuangan menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), percepatan reformasi birokrasi melalui penataan organisasi, penyempurnaan proses kerja, pembangunan sistem asesmen dan manajemen pegawai, pengembangan sistem informasi kepegawaian, pengembangan jaringan komunikasi data, pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan rintisan pembentukan ULP Kementerian Agama Pusat.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama

*Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Kementerian Agama*

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan keagamaan, Kementerian Agama telah melaksanakan sejumlah kegiatan berupa pembangunan dan rehabilitasi gedung Kementerian Agama di pusat dan daerah, yaitu rehabilitasi gedung Kementerian Agama Pusat di Jalan Lapangan Banteng Barat sebanyak satu gedung; pembangunan gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota sebanyak 23 gedung; dan rehabilitasi gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota sebanyak 88 gedung.

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama

*Program
Pengawasan dan
Peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur
Kementerian Agama*

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran, Kementerian Agama telah melakukan kegiatan, antara lain: percepatan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, BPK RI, dan BPKP, pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), audit dengan tujuan tertentu, reviu laporan keuangan dan program pendampingan pada satuan kerja dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Audit Kinerja (Audit Operasional)

Pada Tahun 2011 Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah melaksanakan audit kinerja pada 383 satuan kerja/satuan organisasi yang meliputi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Perguruan Tinggi Agama Negeri, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Balai Diklat Keagamaan dan Balai Litbang Agama, serta Madrasah Negeri.

b. Audit dengan Tujuan Tertentu

Tahun 2011 Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah melakukan audit investigasi terhadap kasus-kasus pada satuan kerja pusat dan daerah dan melakukan audit khusus, yaitu audit pra operasional ibadah haji pada Kantor Teknis Urusan Haji di Jeddah, Arab Saudi dan Audit Pemberian Bantuan Tunjangan Fungsional Guru (TFG) Non PNS pada lima Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

c. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 meliputi pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan atas pencatatan dan pelaporan saldo Kas BLU dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap 88 PTAN; percepatan penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas temuan BPK-RI pada Kanwil Kemenag Provinsi; pemantauan seleksi calon petugas haji di seluruh provinsi dan pemantauan pemberangkatan calon jamaah haji pada 12 embarkasi.

d. Pendampingan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Agama

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah melaksanakan kegiatan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan pada satuan kerja di 33 provinsi, yang meliputi satuan kerja Kanwil Kemenag Provinsi, Kankemenag Kab/Kota, Balai Litbang Agama dan Balai Diklat Keagamaan, Perguruan Tinggi Agama Negeri, dan Madrasah Negeri, dengan jumlah obyek pendampingan sebanyak 2.293 satuan kerja. Selain itu Inspektorat Jenderal Kementerian Agama juga telah melaksanakan reviu Laporan Keuangan Kementerian Agama.

4. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Program Bimbingan Masyarakat Islam

Pada tahun 2011 ini, program Bimbingan Masyarakat Islam yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam mencakup kegiatan pengelolaan agama Islam dan pembinaan syariah serta kegiatan pengelolaan dan pembinaan penerangan agama Islam, yang antara lain berupa: penyediaan Biaya Operasional untuk 5.382 unit KUA; melaksanakan rehabilitasi KUA sebanyak 858 unit; pengadaan kitab suci dan buku keagamaan sebanyak 405.000 eksemplar; pengadaan kitab suci bagi tuna netra 2.500 eksemplar; bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah sebanyak 640 unit gedung; bantuan pengembangan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan kepada 270 lembaga; dan pemberian tunjangan penyuluh agama non PNS untuk 90.510 orang.

Di samping itu, Kementerian Agama dalam program ini telah melaksanakan kegiatan antara lain: rintisan pemberdayaan wakaf produktif; pengembangan kemitraan kelembagaan wakaf, pelayanan bidang lembaga wakaf dan kemitraan, pembinaan amil zakat dan nazhir wakaf, bantuan sertifikasi tanah wakaf, dan penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Nasional.

5. Program Pendidikan Islam

Program Pendidikan Islam

Target Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011 pada Program Pendidikan Islam mencakup upaya peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, yang secara umum dapat tercapai dengan sangat baik.

Kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain: rehab ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 2.203 ruangan, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2.881 ruangan dan Madrasah Aliyah (MA) 1.854 ruangan; pemberian beasiswa miskin MI 745.759 siswa, MTs 592.015 siswa, MA 397.620 siswa dan beasiswa mahasiswa miskin untuk 58.254 orang; pemberian tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru non PNS sebanyak 82.170 orang; pengadaan sertifikasi guru untuk 2.400 orang; pemberian beasiswa untuk 2.618 orang dosen dan bahkan terdapat satu kegiatan yang dapat melampaui target, yaitu peningkatan kompetensi kepala dan pengawas madrasah yang mencapai 102,49 % atau 14.620 orang.

6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Program Bimbingan Masyarakat Kristen mencakup upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Kristen, dan peningkatan kualitas pembinaan urusan agama Kristen, yang antara lain adalah: penyediaan beasiswa mahasiswa miskin bagi 2.720 orang; pengembangan sarana dan prasarana PTA Kristen di tujuh lembaga; pelaksanaan sertifikasi guru Pendidikan Agama Kristen sebanyak 2.200 orang; bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah agama Kristen untuk 120 unit gedung; pembangunan Gereja St. Maria Bennealix Lewoleba di Kabupaten Lembata,

NTT; dan pemberian bantuan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen kepada 55 lembaga.

Di samping itu juga telah dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi), pemberian bantuan Alkitab dan buku keagamaan, pemberian bantuan operasional gereja, pemberian bantuan lembaga sosial agama Kristen dan pemberian tunjangan fungsional guru PNS dan non PNS.

7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Untuk Program Bimbingan Masyarakat Katolik pada tahun 2011 ini mencakup upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Katolik, dan peningkatan kualitas pembinaan urusan agama Katolik dengan kegiatannya berupa: pemberian beasiswa mahasiswa miskin kepada 800 orang; pelaksanaan sertifikasi guru Pendidikan Agama Katolik 1.100 orang; bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah agama Katolik 75 unit gedung; dan bantuan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik.

Kementerian Agama juga telah melakukan kegiatan, antara lain: bantuan operasional rumah ibadah, bantuan operasional Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), bantuan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan Katolik, bantuan beasiswa program S1, S2 dan S3 bagi dosen perguruan tinggi agama Katolik, dan pemberian bantuan sarana dan prasarana pendidikan Agama Katolik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Program Bimbingan Masyarakat Hindu mencakup upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Hindu, dan peningkatan kualitas pembinaan urusan agama Hindu.

Kementerian Agama dalam upaya peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan Hindu pada satuan pendidikan TK/PAUD dan Pasraman ditekankan pada peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan Bantuan Operasional (BOP) sebanyak 50 lokasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp500.000.000,-; pemberian bantuan Rehab sebanyak 25 lokasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.250.000.000,- dan pemberian bantuan pada Pasraman berupa BOP sebanyak 83 lokasi dengan jumlah anggaran Rp2.460.000.000,-; bantuan Rehab sebanyak 95 lokasi dengan jumlah anggaran Rp5.700.000.000,-; Pasraman Kilat sebanyak 33 lokasi dengan jumlah anggaran Rp1.290.000.000,-; bantuan KKG sebanyak 15 lokasi dengan jumlah anggaran Rp300.000.000,-; bantuan MGMP sebanyak 15 lokasi dengan jumlah anggaran Rp300.000.000,-; bantuan peningkatan kualitas dan kompetensi guru sebanyak 150 orang dengan jumlah anggaran Rp375.000.000,-; bantuan kualifikasi program S1 sebanyak 150 orang dengan jumlah anggaran Rp900.000.000,-; bantuan kualifikasi S2 sebanyak 130 orang dengan jumlah anggaran Rp3.290.000.000,-; bantuan *block grant* sebanyak 225 orang dengan jumlah anggaran Rp337.500.000,-, bantuan PTJJ sebanyak 132 orang dengan jumlah anggaran Rp992.000.000,- Untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar, Kementerian Agama telah mencetak buku bacaan sebanyak 52.700 exp dengan jumlah anggaran Rp1.606.500.000,- buku pelajaran sebanyak 84.000 exp dengan jumlah anggaran

Rp1.760.000.000,- media pendidikan sebanyak 960 eks dengan jumlah anggaran Rp195.875.000,- dan telah menyelenggarakan kegiatan Orientasi Peningkatan Mutu Guru, Workshop dan penyusunan Desain Pembelajaran, Sosialisasi Sertifikasi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan, Kementerian Agama telah mensertifikasi 878 guru pendidikan agama Hindu.

Kementerian Agama pada Tahun anggaran 2011 telah memberikan bantuan kepada lembaga perguruan tinggi, dosen dan beasiswa mahasiswa sebesar Rp13.345.000.000,- dengan rincian bantuan BOP sebanyak 5 lokasi dengan jumlah anggaran Rp700.000.000,-; bantuan sarana dan prasarana sebanyak 7 lokasi dengan jumlah anggaran Rp9.300.000.000,-; bantuan operasional BEM/KMHDI sebanyak 20 lokasi dengan jumlah anggaran Rp500.000.000,- Bantuan beasiswa miskin berprestasi sebanyak 600 orang dengan jumlah anggaran Rp720.000.000,-; bantuan beasiswa dosen berprestasi sebanyak 67 orang dengan jumlah anggaran Rp1.350.000.000,-; bantuan study ayur weda ke India sebanyak 3 orang dengan jumlah anggaran Rp225.000.000,-; bantuan penelitian sebanyak 30 orang dengan jumlah anggaran Rp1.350.000.000,- dan bantuan penuntasan temu karya ilmiah sebanyak 7 lokasi dengan jumlah anggaran Rp1.200.000.000,- dan untuk peningkatan mutu serta kualitas penyelenggaraan pendidikan Kementerian Agama telah menyelenggarakan kegiatan orientasi dosen, temu karya ilmiah penyusunan bahan ajar prodi, penyempurnaan silabus prodi kurikulum inti, penyusunan juklak/juknis dan Temu Karya Ilmiah dan Lomba Ketrampilan Akademik Tingkat Nasional.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, Kementerian Agama telah memberikan bantuan kepada BPH sebesar Rp100.000.000,- bantuan operasional BPH sebanyak 15 lokasi dengan jumlah anggaran Rp300.000.000,-; bantuan siaran fragmen dalam rangkaian nyepi sebanyak 2 lokasi dengan jumlah anggaran Rp150.000.000,-; bantuan simakrama sebanyak 2 lokasi dengan jumlah anggaran Rp50.000.000,-; bantuan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 32 unit dengan jumlah anggaran Rp500.000.000,-; bantuan operasional penyuluh sebanyak 150 orang dengan jumlah anggaran Rp375.000.000,-.

Dalam rangka peningkatan Sradha dan Bhakti umat Hindu, Kementerian Agama telah memberikan bantuan Rehap Pura sebanyak 141 lokasi dengan jumlah anggaran Rp3.300.000.000,-; bantuan sertifikat pura sebanyak 10 lokasi dengan jumlah anggaran Rp100.000.000,-, bantuan sarana upacara sebanyak 877 set dengan jumlah anggaran Rp4.501.556.000,-; mencetak buku keagamaan sebanyak 25.640 exp dengan jumlah anggaran Rp510.440.000,- Mencetak kalender Hindu sebanyak 61.500 exp dengan jumlah anggaran Rp58.671.000,-

Untuk pengembangan Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu, Kementerian Agama juga memberikan bantuan sebanyak 129 lokasi dengan jumlah anggaran Rp3.466.000.000,- disamping itu Kementerian Agama juga melaksanakan Orientasi, penyusunan naskah dan Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional

9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Program Bimbingan Masyarakat Buddha yang mencakup upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama Buddha, dan peningkatan kualitas pembinaan urusan agama Buddha, antara lain berupa:

penyediaan beasiswa mahasiswa miskin sebanyak 607 orang; pengembangan sarana prasarana PTA Buddha di 2 (dua) lokasi; pelaksanaan sertifikasi bagi 500 orang guru pendidikan agama Buddha; bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah agama Buddha sebanyak 40 unit gedung; dan pemberian bantuan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Sosial Pendidikan Keagamaan Buddha.

Selain kegiatan tersebut di atas, Kementerian Agama juga telah melakukan kegiatan, antara lain: bantuan operasional lembaga keagamaan Buddha, bantuan operasional pendidikan agama dan keagamaan Buddha, bantuan beasiswa siswa Agama Buddha, bantuan sarana dan prasarana pendidikan tinggi Agama Buddha, bimbingan dan pelayanan lembaga, pengembangan seni budaya budhis, penyelenggaraan upacara keagamaan Buddha, pengadaan kitab suci dan buku keagamaan, dan bantuan sosial tenaga teknis keagamaan Buddha.

10. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

**Program
Penyelenggaraan
Haji dan Umrah**

Target RKP pada Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mencakup upaya peningkatan kualitas Pembinaan Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji dan Umrah, pada umumnya telah dapat dicapai dengan baik. Hal ini terlihat antara lain dengan terlaksananya pengembangan dan rehabilitasi asrama haji transit dan embarkasi di 15 lokasi. Bahkan untuk penyelenggaraan ibadah haji 1432 H/2011 M telah terdapat beberapa peningkatan, seperti bertambahnya jumlah jemaah calon haji asal Indonesia yang berada pada ring satu (berjarak \leq 2.000 meter dari Masjidil Haram di kota Mekah) menjadi 93%, sementara sisanya yang 7% berada pada jarak 2.000 – 2.500 meter; biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang semakin efisien menjadi hanya 3,86% (turun dari 4,6% pada tahun sebelumnya); dan juga keberhasilan Kementerian Agama mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 orang sehingga total jemaah calon haji Indonesia pada tahun 1432 H/2011M ini menjadi 221.000 orang.

Kementerian Agama juga telah melakukan kegiatan, antara lain: penerapan dan *surveillance* Sistem Manajemen Mutu Penyelenggaraan Ibadah Haji, Survei Kepuasan Jemaah Haji, peningkatan kualitas Laporan Keuangan Haji, dan pengembangan Sistem Informasi Haji Terpadu (Siskohat) online di kabupaten/kota.

11. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama

**Program Penelitian
Pengembangan dan
Pendidikan
Pelatihan
Kementerian Agama**

Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama pada tahun 2011 yang mencakup upaya peningkatan kualitas Penelitian dan Pengembangan Agama, dan Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan secara umum telah dapat dicapai dengan baik. Beberapa kegiatan yang terlaksana pada tahun 2011 ini antara lain: diklat untuk tenaga administrasi (baik itu diklat Prajabatan, PIM III, PIM IV, Tenknis Adminstrasi atau pun Fungsional Administrasi) sebanyak 33.196 orang dan diklat untuk tenaga teknis Pendidikan dan Keagamaan sebanyak 36.817 orang.

Dalam upaya pencapaian target RKP, Kementerian Agama telah menetapkan sejumlah kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan, seperti peningkatan relevansi topik-topik penelitian, peningkatan kualitas hasil penelitian, peningkatan diversifikasi metodologi, peningkatan komunikasi dan

sosialisasi produk penelitian, perluasan jaringan kerjasama, serta pengembangan budaya akademik; dan di bidang pendidikan dan pelatihan, yang meliputi pengembangan kapasitas SDM penyelenggara diklat, peningkatan mutu dan jumlah widyaiswara, pengembangan program diklat, peningkatan kualitas instrumen kediklatan, penyiapan konsep kebijakan teknis kediklatan, pembagian dan pemerataan kegiatan diklat Pusat dan UPT secara proporsional, pengembangan jaringan kemitraan, serta peningkatan jumlah sasaran diklat melalui penerapan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) dan DJJ (Diklat Jarak Jauh).

A.5. ALOKASI ANGGARAN

Pengguna Anggaran ke-4 terbesar

Kementerian Agama merupakan salah satu Kementerian yang menduduki ke-4 terbesar dari 76 Kementerian/Lembaga dalam hal perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini disebabkan karena penerapan kebijakan Pemerintah untuk tetap menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD. Peningkatan alokasi anggaran Kementerian Agama belum dapat sepenuhnya menutupi kebutuhan lingkup tugas dan fungsi agama yang menjadi *core* Kementerian Agama dan berkorelasi kepada tugas dan fungsi dari instansi lintas sektoral yang bersifat strategis.

Pada awal tahun 2011 ini, Kementerian Agama mendapatkan anggaran sebesar Rp32.109.396.697.000,- (*tiga puluh dua trilyun seratus sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), lalu mendapat tambahan anggaran melalui APBN-P Tahun 2011 sehingga menjadi sebesar **Rp35.475.680.882.000,- (*tiga puluh lima trilyun empat ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*)**. Hal ini berarti terjadi kenaikan dari anggaran tahun 2010 yang sebesar Rp30.635.110.665.000,- (*tiga puluh trilyun enam ratus tiga puluh lima milyar seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*). Anggaran sebesar 35,47 trilyun itu dialokasikan pada sebelas program dengan rincian sebagaimana terdapat dalam tabel. 1 berikut ini:

Tabel. 1

Alokasi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2011 Berdasarkan Program

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.000,-)	Bobot (%)
1	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag	1.302.464.117	3,67%
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemenag	184.649.266	0,52%
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenag	103.247.630	0,29%
4	Bimbingan Masyarakat Islam	2.166.794.516	6,11%
5	Pendidikan Islam	28.956.229.610	81,62%
6	Bimbingan Masyarakat Kristen	839.504.139	2,37%
7	Bimbingan Masyarakat Katolik	472.722.291	1,33%
8	Bimbingan Masyarakat Hindu	406.691.706	1,15%
9	Bimbingan Masyarakat Budha	145.834.804	0,41%

10	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh	363.261.366	1,02%
11	Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	534.281.437	1,51%
JUMLAH		35.475.680.882	100%

A.6. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama adalah Tanggungjawab Seluruh Satker

Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Tahun 2011 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas pelaporan, yang terdiri dari 10 (sepuluh) Unit Eselon 1 beserta jenjang struktural di bawahnya yaitu 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU). LKKA disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan dan data lainnya dari unit-unit yang terkait.

Untuk LKKA Tahun 2011, entitas pelaporan keuangan tingkat Kementerian Agama dan entitas akuntansi tingkat satuan kerja (satker) di bawahnya yang dicakup meliputi:

Tabel 2.
Jumlah Entitas Akuntansi Kementerian Agama

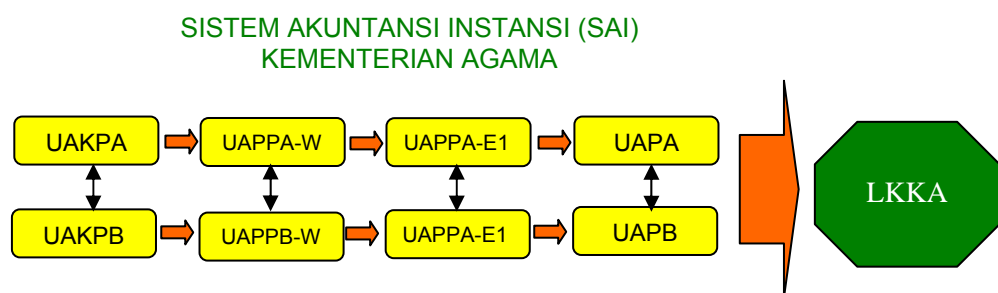
No	Unit Kerja	Jumlah Satker	
		2011	2010
1	Eselon 1 Pusat	10	10
2	Kanwil	33	33
3	Kantor Kemenag Kab/Kota	457	440
4	MAN	759	745
5	MTsN	1.437	1.405
6	MIN	1.686	1.669
7	UIN	6	6
8	IAIN	15	14
9	STAIN	31	32
10	STABN	2	1
11	STAKN	6	6
12	STAHN	2	2
13	IHDN	1	1
14	Balai Diklat	12	12
15	Balai Litbang	3	3
16	Lajnah Pentashihan Al-Quran	1	1
17	Atase Haji	1	1
18	Kantor Misi Haji	1	0
Jumlah		4.463	4.381

Dengan demikian LKKA Tahun 2011 ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh 4.463 satker di lingkungan Kementerian Agama termasuk di dalamnya 15 satker yang sudah menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yaitu :

1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. UIN Malang
4. UIN Sultan Qasim Riau
5. UIN Alauddin Makasar
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. IAIN Sunan Ampel Surabaya
8. IAIN Sultan Thaha Jambi
9. IAIN Sumatera Utara
10. IAIN Walisongo Semarang
11. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
12. IAIN Raden Fatah Palembang
13. IAIN Raden Intan Lampung
14. IAIN Mataram
15. IAIN Ar-Raniry Aceh

Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Kementerian Agama menyelenggarakan SAI secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat Kementerian Agama (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan neraca.

Bagan Arus Penyusunan Laporan Keuangan



A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kementerian Agama telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II yaitu :

1. basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja. artinya pendapatan diakui sebagai penerimaan pada saat uang diterima oleh Kas Umum Negara dan belanja sebagai pengeluaran pada saat uang dikeluarkan dari Kas Umum Negara.

2. basis akrual adalah pengakuan transaksi dan peristiwa lainnya yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan asset dan kewajiban tanpa memperdulikan apakah uang sudah diterima atau sudah dikeluarkan oleh Kas Umum Negara.

**Cash Toward
Accrual (CTA),
Informasi Akrual
sebagai suplemen
LKKA**

LKKA menggunakan gabungan dua basis tersebut diatas. Penerapan gabungan dua basis akuntansi yaitu basis kas dan basis akrual dalam satu laporan keuangan disebut *Cash Toward Accrual* (CTA). Hal ini dilakukan mengingat belum sepenuhnya basis akrual mampu diimplementasikan ke dalam LKKA. Basis CTA ini menyajikan pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban dan ekuitas disajikan dengan berbasis akrual.

Pada akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 23 Desember 2009 telah diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kementerian Agama selaku UAPA menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual sebagai suplemen dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 yang disusun secara berjenjang berdasarkan gabungan informasi pendapatan dan belanja secara akrual mulai dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, dan UAPPA-E1.

Sedangkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan LKKA tahun 2011 adalah :

A.7.1. PENDAPATAN

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan diakui saat kas diterima pada Kas Umum Negara. Pencatatan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatannya.

A.7.2. BELANJA

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

A.7.3. ASET

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima oleh atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Sedangkan di Kementerian Agama, Aset hanya terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

A.7.3.1 Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan dalam neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

A.7.3.2 Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca kementerian/lembaga berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu :

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi

tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Kementerian Agama terdiri dari :

1. Tanah

Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap

pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Aset Tetap Lainnya

5. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

KDP

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat dialokasikan ke konstruksi bangunan mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

A.7.3.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya di Kementerian Agama adalah Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan

oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset Lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

A.7.4. KEWAJIBAN

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah di klasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban pada satker dalam lingkup Kementerian Agama adalah kewajiban jangka pendek berupa kewajiban kepada KPPN yang disebabkan karena keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan kepada BUN/KPPN yaitu pendapatan yang ditangguhkan, Beban Belanja Pegawai, Beban daya dan jasa.

Ekuitas Dana

A.7.5. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Dalam lingkup Kementerian Agama Ekuitas dana hanya terdiri dari Ekuitas Dana Lancar.

Transaksi Valuta Asing

A.7.6. TRANSAKSI VALUTA ASING

Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Kementerian Agama (dalam hal ini BPIH) memiliki rekening dalam mata uang USD di BI, sehingga dalam melakukan transaksi tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Namun, transaksi dalam mata uang asing selain USD dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tunai (*spot rate*) pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan BPIH tidak memiliki rekening dalam mata uang asing selain USD di BI, sehingga dalam melakukan transaksi, harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

C A L K

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN**

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan Umum LRA

Realisasi Netto Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Agama Tahun 2011 Rp778.606.513.275,- atau 127,81 persen dari estimasi pendapatan yang dilaporkan sebesar Rp609.179.299.832,-, yang berasal dari Penerimaan Dalam Negeri. Sedangkan Realisasi Brutto Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Agama Tahun 2011 adalah Rp781.173.440.472,- atau mencapai 128,23 persen dari estimasi pendapatan yang dilaporkan dengan pengembalian sebesar Rp2.566.927.197,-.

Penerimaan Dalam Negeri dimaksud bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) biaya Nikah dan Rujuk (NR) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PTAN di lingkungan Kementerian Agama. PNBP dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan jumlahnya. Pembinaan yang intensif dan kontinyu terhadap sistem Administrasi pendapatan dan penggunaan dana PNBP, baik PNBP NR, PNBP PTAN Non BLU, PNBP Umum, maupun Pendapatan yang berasal dari penerapan PPK-BLU pada PTAN, sangat berpengaruh secara signifikan dalam menyumbang kenaikan pendapatan PNBP tersebut.

Realisasi Belanja Netto Kementerian Agama pada TA 2011 sebesar Rp33.208.317.300.720,- atau 93,53 persen dari pagu telapor sebesar Rp35.506.282.990.000,-, sedangkan Realisasi Belanja Brutto adalah Rp33.248.990.855.694,- atau mencapai 93,64 persen dari pagu telapor dengan pengembalian sebesar Rp40.673.554.974,-. Realisasi Belanja Kementerian Agama TA 2011 terdiri dari Realisasi Netto Belanja Pegawai sebesar Rp15.845.666.787.785,-, Belanja Barang sebesar Rp5.585.188.101.506,-, Belanja Modal sebesar Rp3.045.969.015.978,-, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp8.731.493.395.451,-. Sedangkan Realisasi Brutto Belanja Pegawai Rp15.856.775.922.095,- dengan pengembalian Rp11.109.134.310,-, realisasi Belanja Barang sebesar Rp5.608.832.382.115,- dengan pengembalian Rp23.644.280.609, realisasi Belanja Modal sebesar Rp3.046.291.844.005,- dengan pengembalian Rp322.828.027,-, dan realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp8.737.090.707.479,- dengan pengembalian Rp5.597.312.028,-.

Tabel. 3
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
(disajikan secara brutto)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah			
	- Penerimaan Negara Bukan Pajak	609.179.299.832	781.173.440.472	128,23
2	Realisasi Belanja Negara			
	- Belanja Rupiah Murni	33.815.509.972.000	32.261.380.771.084	95,40
	- Belanja Pinjaman Luar Negeri	706.722.131.000	250.578.156.541	35,46
	- Belanja Rupiah Murni Pendamping	102.055.622.000	75.895.019.291	74,37
	- Belanja PNBPN	266.486.274.000	221.683.772.671	83,19
	- Belanja Pinjaman Dalam Negeri	406.356.000	0	-
	- Belanja BLU	482.942.635.000	434.525.656.307	89,97
	- Belanja Hibah Dalam Negeri	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
	- Belanja Hibah Luar Negeri	126.660.000.000	0	-
	- Belanja Hibah Langsung Dalam Negeri	4.500.000.000	3.927.479.800	87,28

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

**Realisasi Netto
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp778.606.513
.275,-**

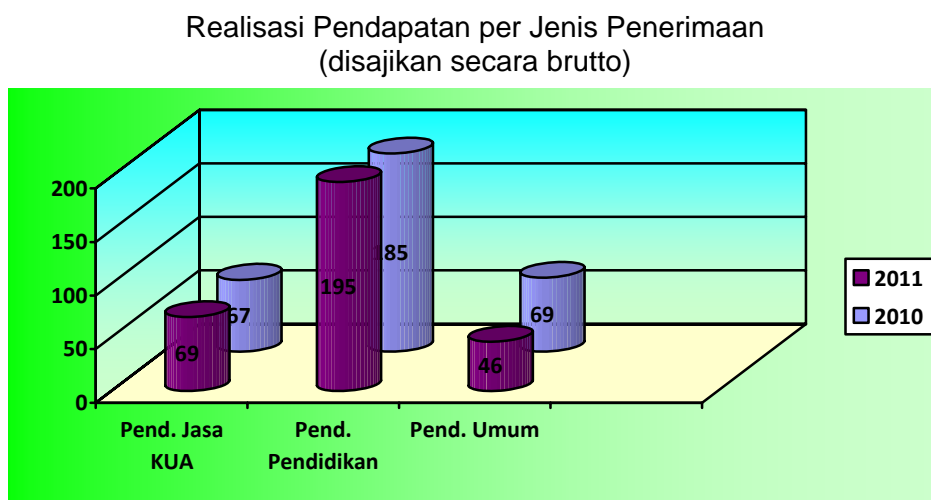
Realisasi Netto Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Agama TA 2011 hanya berasal dari Realisasi PNBPN, yaitu sebesar Rp778.606.513.275,-, sedangkan Realisasi Brutto adalah Rp781.173.440.472,- dengan pengembalian sebesar Rp2.566.927.197,-. Tidak ada penerimaan yang berasal dari Hibah.

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Netto PNBPN TA 2011 adalah sebesar Rp778.606.513.275,- atau 127,81 persen dari estimasi pendapatan yang melaporkan sebesar Rp609.179.299.832,-, sedangkan Realisasi Brutto adalah Rp781.173.440.472,- atau mencapai 128,23 persen dari estimasi pendapatan dengan pengembalian sebesar Rp2.566.927.197,-. Administrasi yang semakin baik dalam pengelolaan PNBPN turut menyumbang kenaikan angka pendapatan tersebut, disamping karena adanya estimasi pendapatan PNBPN Umum yang tidak tercantum dalam DIPA masing-masing satker. Kesulitan dalam menginventarisir jenis penerimaan PNBPN Umum, merupakan kendala utama sebab tidak tercantumnya estimasi pendapatan PNBPN Umum, karena sifat PNBPN umum adalah tidak pasti, diantaranya adalah pemanfaatan aset yang belum diatur secara rinci oleh instansi terkait. Realisasi Brutto TA 2010 sebesar Rp702.576.476.771,- menunjukkan adanya kenaikan angka sebesar Rp78.596.963.701,- Rincian Pendapatan Kementerian Agama dapat dilihat pada **lampiran 1**.

Realisasi PNBPN berasal dari PNBPN Lainnya dan PNBPN BLU. PNBPN Lainnya terdiri dari: (i) Pendapatan Jasa KUA, (ii) Pendapatan Pendidikan dan (iii) Pendapatan Umum.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



Grafik 1: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011

B.2.1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

**Realisasi Netto
PNBP Lainnya
Rp309.123.674
.317,-**

Realisasi Netto PNBPN Lainnya pada TA 2011 adalah sebesar Rp309.123.674.317,- atau mencapai 105,39 persen dari estimasi sebesar Rp293.305.182.000,-, sedangkan Realisasi Brutto adalah Rp311.690.601.514,- atau mencapai 106,27 persen dari estimasinya. Hal ini berarti PNBPN Lainnya pada TA 2011 lebih kecil Rp-10.839.289.017,- atau -4,69 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp322.529.890.531,-. Rincian realisasi PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel. 4
Realisasi PNBPN Lainnya
(disajikan secara bruto)

Uraian	TA 2011	TA 2010
Pendapatan Jasa KUA	69.666.891.776	67.548.420.179
Pendapatan Pendidikan	195.265.175.992	185.206.000.133
Pendapatan Umum	46.758.533.746	69.775.470.219
Jumlah	311.690.601.514	322.529.890.531

Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya per Eselon 1 sebagai berikut (dalam Rp):

**Rincian Realisasi
PNBP Lainnya
per Eselon 1**

Tabel. 5
Rincian Realisasi PNBPN Lainnya
per Eselon 1 TA 2011 dan TA 2010
(disajikan secara bruto)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
1	01	Sekretariat Jenderal	23.060.843.533	61.888.115.947
2	02	Inspektorat Jenderal	169.375.411	72.622.181
3	03	Ditjen Bimas Islam	65.967.397.944	67.675.928.788
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	202.876.540.614	190.884.515.390
5	05	Ditjen Bimas Kristen	7.759.293.102	48.776.372
6	06	Ditjen Bimas Katolik	382.377.189	137.555.229
7	07	Ditjen Bimas Hindu	10.085.562.519	543
8	08	Ditjen Bimas Budha	353.573.701	987.433.054
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	589.707.973	428.033.800
10	11	Badan Litbang dan Diklat	445.929.528	406.909.227
JUMLAH			311.690.601.514	322.529.890.531

B.2.1.1.2. Pendapatan BLU

**Realisasi Netto
Pendapatan BLU
Rp469.482.838
.958,-**

Pendapatan BLU adalah pendapatan dari satuan kerja dilingkungan Kementerian Agama yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Sampai dengan tahun 2011 satuan kerja yang telah menerapkan PPK-BLU adalah 15 (lima belas) yang semuanya merupakan satuan kerja PTAN. Pendapatan BLU terdiri dari: a) Penerimaan Anggaran yang bersumber dari APBN, b) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat serta hibah terikat, c) Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain. Realisasi Netto Pendapatan BLU TA 2011 adalah sebesar Rp469.482.838.958,- atau mencapai 160,07 persen dari estimasi sebesar Rp293.305.182.000,-, sedangkan Realisasi Brutto adalah Rp469.482.838.958,- atau mencapai 160,07 persen dari estimasinya. Sementara Realisasi Brutto Pendapatan BLU TA 2010 adalah sebesar Rp380.046.586.240,- atau mencapai 160,74 persen dari estimasi sebesar Rp236.426.942.000,-. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU TA 2011 meningkat sebesar Rp89.436.252.718,- atau 84,37 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010.

Tabel. 6
Realisasi Pendapatan BLU 2011 (disajikan secara bruto)
(dalam Rupiah)

NO	Uraian	Estimasi	Realisasi	%
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	276.911.228.000	434.312.426.093	156,84
2	Pendapatan Hibah BLU	1.475.000.000	1.941.928.523	131,66
3	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	4.022.080.000	27.991.089.413	695,94
4	Pendapatan BLU Lainnya	10.896.874.000	5.237.394.929	48,06
JUMLAH		293.305.182.000	469.482.838.958	160,07

Tabel. 7
Realisasi Pendapatan BLU 2011 Berdasarkan Satker
(disajikan secara brutto)
(dalam Rupiah)

NO	Kode Satker	Uraian	2011	2010	% Naik (Turun)
1	423755	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	56.407.500.504	51.778.273.062	8,21
2	423501	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	118.226.520.108	103.885.081.225	12,13
3	423812	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	39.808.170.133	30.904.135.020	22,37
4	423523	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	29.652.465.678	27.786.316.675	6,29
5	307314	UIN Alauddin Makassar	38.023.811.231	30.015.887.880	21,06
6	423611	IAIN Walisongo Semarang	19.672.002.071	16.704.091.623	15,09
7	424007	IAIN Sumatera Utara	16.739.574.177	14.167.968.598	15,36
8	424157	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	55.826.109.434	43.119.804.200	22,76
9	424188	IAIN Sultan Thaha Jambi	11.545.795.163	15.266.036.744	(32,22)
10	423770	IAIN Sunan Ampel Surabaya	28.755.439.650	30.006.391.261	(4,35)
11	423548	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	14.430.077.699	11.203.358.375	22,36
12	424260	IAIN Raden Intan Lampung	12.949.389.328	5.209.241.577	59,77
13	424208	IAIN Raden Fatah Palembang	19.923.484.636	-	100,00
14	307843	IAIN Mataram	7.522.499.146	-	100,00
15	423925	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-	-
JUMLAH			469.482.838.958	380.046.586.240	19,05

B.2.2. Belanja

Realisasi Netto Belanja Kementerian Agama Rp33.208.317.300.720,-

Realisasi Netto Belanja Kementerian Agama TA 2011 adalah sebesar Rp33.208.317.300.720,- atau mencapai 93,53 persen dari pagu terlapor sebesar Rp35.506.282.990.000,-, sedangkan Realisasi Brutto adalah Rp33.248.990.855.694,- atau 93,64 persen dari pagu terlapor. Persentase Realisasi Brutto Belanja Kementerian Agama TA 2011 lebih besar 2,07 persen dibandingkan dengan Realisasi Brutto TA 2010 sebesar Rp30.627.412.668.237,-. Rincian Belanja Kementerian Agama dapat dilihat pada **lampiran 2**.

Kelompok Belanja

Belanja Kementerian Agama dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu: (i) Belanja Kementerian Agama menurut Jenis Satuan Kerja; (ii) Belanja Kementerian Agama menurut Sumber Dana dan Kegiatan; (iii) Belanja Kementerian Agama menurut Fungsi, Subfungsi, Program; dan (iv) Belanja Kementerian Agama menurut Jenis Belanja.

Belanja Kementerian Agama Menurut Jenis Satuan Kerja

Belanja Kementerian Agama Menurut Jenis Satuan Kerja

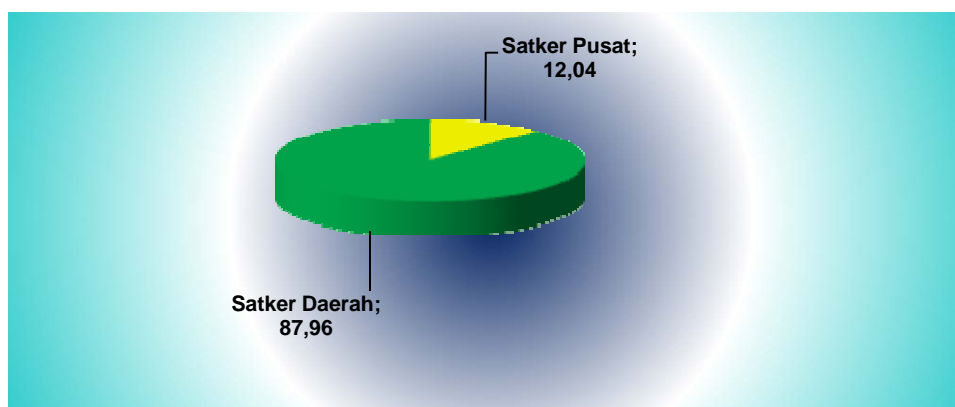
Realisasi Belanja Kementerian Agama menurut Satuan Kerja terdiri dari Satker Kantor Pusat dan Satker Kantor Daerah. Realisasi Netto Belanja untuk satker kantor pusat Kementerian Agama pada TA 2011 sebesar Rp3.980.476.395.014,- atau 11,21 persen dari total belanja, sedangkan Realisasi Brutto adalah Rp4.001.755.703.518,- atau 12,04 persen dari total belanja. Realisasi Netto Belanja untuk satker kantor daerah adalah sebesar Rp29.227.840.905.706,- atau 82,32 persen dari total belanja, sedangkan Realisasi Brutto Belanja kantor daerah sebesar Rp29.247.235.152.176,- atau 87,96 persen dari total belanja.

**Realisasi
Anggaran
Belanja Menurut
Satker pusat
dan Daerah**

Tabel. 8
Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja
(disajikan secara brutto)

Uraian	TA 2011	TA 2010
Satker Pusat	4.001.755.703.518	3.337.988.991.960
Satker Daerah	29.247.235.152.176	24.709.157.927.020
Jumlah	33.248.990.855.694	28.047.146.918.980

Komposisi realisasi belanja di satker pusat dan satker daerah dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



Grafik 2. Komposisi Realisasi Belanja Kementerian Agama di Satker Pusat dan Daerah TA 2011

Realisasi Anggaran Belanja menurut Eselon I dapat dilihat pada rincian sebagai berikut (dalam Rp):

**Rincian Realisasi
Belanja per
Eselon I**

Tabel. 9
Rincian Realisasi Belanja
per Eselon I TA 2011 dan TA 2010
(disajikan secara brutto)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
1	01	Sekretariat Jenderal	1.403.087.253.614	14.643.246.923.900
2	02	Inspektorat Jenderal	101.234.706.992	89.995.335.058
3	03	Ditjen Bimas Islam	2.285.323.588.481	140.225.801.246
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	27.005.940.274.169	11.978.393.657.214
5	05	Ditjen Bimas Kristen	750.936.759.323	216.386.660.553
6	06	Ditjen Bimas Katolik	413.059.696.171	88.888.768.978
7	07	Ditjen Bimas Hindu	380.151.467.419	125.670.499.220
8	08	Ditjen Bimas Budha	126.155.569.915	58.728.485.065
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	306.823.710.916	169.705.596.556
10	11	Badan Litbang dan Diklat	476.277.828.694	535.905.560.490
JUMLAH			33.248.990.855.694	28.047.146.918.980

Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana dan Kegiatan

Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana dan Kegiatan

Realisasi Belanja Kementerian Agama menurut Sumber Dana dan Kegiatan terdiri dari Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni Pendamping, PNBP, Pinjaman Dalam Negeri, BLU, Hibah Dalam Negeri, Hibah Luar Negeri, dan Hibah Langsung Dalam Negeri.

Realisasi Belanja Netto terbesar bersumber dari Rupiah Murni, yaitu sebesar Rp32.229.536.135.800,- atau 95,31 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp33.815.509.972.000,-, sedangkan Realisasi Belanja Brutto Rupiah Murni adalah Rp32.261.294.846.831,- atau 95,40 persen dari anggaran yang dilaporkan dengan pengembalian Rp31.758.711.031,-. Sementara itu, realisasi Belanja Netto Kementerian Agama yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp250.578.156.541,- atau 35,46 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp706.722.131.000,-, sedangkan Realisasi Belanja Brutto yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri adalah Rp250.578.156.541,- atau 35,46 persen dari anggaran yang dilaporkan dengan pengembalian Rp0,-, Realisasi Belanja Netto yang berasal dari Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp75.895.019.291,- atau 74,37 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp102.055.622.000,-, sedangkan Realisasi Belanja Brutto yang berasal dari Rupiah Murni Pendamping adalah Rp75.895.019.291,- atau 74,37 persen dari anggaran yang dilaporkan dengan pengembalian Rp0,-. Realisasi Belanja Netto yang berasal dari PNBP sebesar Rp221.635.631.121,- atau 83,17 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp266.486.274.000,-, sedangkan Realisasi Belanja Brutto yang berasal dari PNBP adalah Rp221.683.772.671,- atau 83,19 persen dari anggaran yang dilaporkan dengan pengembalian Rp48.141.550,-. Realisasi belanja netto yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp-740.250,- atau -0,18 persen Realisasi belanja yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp0,00,- atau 0,00 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp406.356.000,-, dengan pengembalian sebesar Rp740.250,- Realisasi Belanja Netto yang berasal dari BLU sebesar Rp434.525.656.307,- atau 89,97 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp482.942.635.000,-, sedangkan Realisasi Belanja Brutto yang berasal dari BLU adalah Rp434.525.656.307,- atau 89,97 persen dari anggaran yang dilaporkan dengan pengembalian Rp0,- Realisasi Belanja Netto yang berasal dari Hibah Dalam Negeri sebesar Rp1.000.000.000,- atau 100,00 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp1.000.000.000,00, sedangkan Realisasi Belanja Brutto yang berasal dari Hibah Dalam Negeri adalah Rp1.000.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang dilaporkan dengan pengembalian Rp0,-. Realisasi Belanja netto yang berasal dari Belanja Hibah Luar Negeri sebesar Rp0,- atau sebesar 0,00 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp126.660.000.000,- Realisasi Belanja brutto yang berasal dari Hibah Luar Negeri sebesar Rp0,00,- atau 0,00 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp126.660.000.000,-, Realisasi Belanja Netto yang berasal dari Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp3.927.479.800,- atau 87,28 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp4.500.000.000,-, sedangkan Realisasi Belanja Brutto yang berasal dari Hibah Langsung Dalam Negeri adalah Rp3.927.479.800,- atau 87,28 persen dari anggaran yang dilaporkan dengan pengembalian Rp0,-

Tabel. 10
Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana
(disajikan secara brutto)

Uraian	TA 2011	TA 2010
Rupiah Murni	32.261.294.846.831	27.065.482.492.890
Pinjaman Luar Negeri	250.578.156.541	356.097.357.693
Rupiah Murni Pendamping	75.895.019.291	83.161.692.514
PNBP	221.683.772.671	197.463.430.279
Pinjaman Dalam Negeri	0,00	
BLU	434.525.656.307	344.941.945.604
Hibah Dalam Negeri	1.000.000.000,00	-
Hibah Luar Negeri	0,00	
Hibah Langsung Dalam Negeri	3.927.479.800	-
Jumlah	33.248.990.855.694	28.047.146.918.980

Laporan Realisasi Belanja brutto Kementerian Agama menurut Sumber Dana dapat dirinci sebagai berikut:

*Rincian Realisasi
Belanja
Kementerian
Agama Menurut
Sumber Dana
Rupiah Murni*

Tabel. 11
Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama
Menurut Sumber Dana Rupiah Murni (01)
per Eselon I TA 2011 dan TA 2010
(disajikan secara brutto)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
1	01	Sekretariat Jenderal	1.402.310.692.814	14.594.321.881.397
2	02	Inspektorat Jenderal	101.234.706.992	89.995.335.058
3	03	Ditjen Bimas Islam	2.234.928.812.811	140.225.801.246
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	26.085.687.021.425	11.056.311.348.927
5	05	Ditjen Bimas Kristen	745.021.377.371	210.531.223.203
6	06	Ditjen Bimas Katolik	413.059.696.171	88.888.768.978
7	07	Ditjen Bimas Hindu	370.087.108.975	120.948.676.970
8	08	Ditjen Bimas Budha	125.949.814.915	58.648.300.065
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	306.823.710.916	169.705.596.556
10	11	Badan Litbang dan Diklat	476.277.828.694	535.905.560.490
JUMLAH			32.261.380.771.084	27.065.482.492.890

Rincian realisasi belanja brutto Kementerian Agama menurut Sumber Dana Pinjaman Luar Negeri dapat dirinci sebagai berikut:

*Rincian Realisasi
Belanja
Kementerian
Agama Menurut
Sumber Dana
Pinjaman Luar
Negeri*

Tabel. 12
Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama
Menurut Sumber Dana Pinjaman Luar Negeri (02)
Per Eselon I TA 2011 dan TA 2010
(disajikan secara brutto)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	250.578.156.541	356.097.357.693
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	-
JUMLAH			250.578.156.541	356.097.357.693

Rincian realisasi belanja brutto Kementerian Agama menurut Sumber Dana Rupiah Murni Pendamping dapat dirinci sebagai berikut:

*Rincian Realisasi
Belanja
Kementerian
Agama Menurut
Sumber Dana
Rupiah Murni
Pendamping*

Tabel. 13
Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama
Menurut Sumber Dana Rupiah Murni Pendamping (03)
per Eselon I TA 2011 dan TA 2010
(disajikan secara brutto)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	75.895.019.291	83.161.692.514
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	-
JUMLAH			75.895.019.291	83.161.692.514

Rincian realisasi belanja brutto Kementerian Agama menurut Sumber Dana PNBP dapat dirinci sebagai berikut:

*Rincian Realisasi
Belanja
Kementerian
Agama Menurut
Sumber Dana
PNBP*

Tabel. 14
Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama
Menurut Sumber Dana PNBP (04)
per Eselon I TA 2011 dan TA 2010
(disajikan secara brutto)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
1	01	Sekretariat Jenderal	-	48.925.042.503
2	02	Inspektorat Jenderal	-	
3	03	Ditjen Bimas Islam	50.394.775.670	
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	155.103.501.605	137.880.943.176
5	05	Ditjen Bimas Kristen	5.915.381.952	5.855.437.350
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	
7	07	Ditjen Bimas Hindu	10.064.358.444	4.721.822.250
8	08	Ditjen Bimas Budha	205.755.000	80.185.000
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	
JUMLAH			221.683.772.671	197.463.430.279

Rincian realisasi belanja brutto Kementerian Agama menurut Sumber Dana BLU dapat dirinci sebagai berikut:

*Rincian Realisasi
Belanja
Kementerian
Agama Menurut
Sumber Dana
BLU*

Tabel. 15
Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama
Menurut Sumber Dana BLU (06)
per Eselon I TA 2011 dan TA 2010
(disajikan secara brutto)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	434.525.656.307	344.941.945.604
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	-
JUMLAH			434.525.656.307	344.941.945.604

Rincian realisasi belanja brutto Kementerian Agama menurut Sumber Dana Hibah Dalam Negeri dapat dirinci sebagai berikut:

*Rincian Realisasi
Belanja
Kementerian
Agama Menurut
Sumber Dana
Hibah Dalam
Negeri*

Tabel. 16
Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama
Menurut Sumber Dana Hibah Dalam Negeri (08)
per Eselon I TA 2011 dan TA 2010
(disajikan secara brutto)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	1.000.000.000	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	-
JUMLAH			1.000.000.000	-

Rincian realisasi belanja Kementerian Agama menurut Sumber Dana Hibah Langsung Dalam Negeri dapat dirinci sebagai berikut:

*Rincian Realisasi
Belanja
Kementerian
Agama Menurut
Sumber Dana
Hibah Langsung
Dalam Negeri*

Tabel. 17
Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama
Menurut Sumber Dana Hibah Langsung Dalam Negeri (10)
per Eselon I TA 2011 dan TA 2010
(disajikan secara brutto)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
1	01	Sekretariat Jenderal	776.560.800	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	3.150.919.000	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	-
JUMLAH			3.927.479.800	-

Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi, Sub Fungsi, dan Program

*Belanja
Kementerian
Agama Menurut
Fungsi,
Subfungsi, dan
Program*

Realisasi Belanja Kementerian Agama juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi, sub fungsi, dan program. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Kementerian Agama menurut Fungsi terbagi dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi agama dan fungsi pendidikan. Rincian Belanja Menurut Fungsi, Sub Fungsi, Program Kementerian Agama dapat dilihat pada lampiran 3.

Realisasi Belanja Netto menurut fungsi pendidikan, yaitu sebesar Rp28.342.188.747.200,- atau 92,95 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp30.491.585.410.000,-, sedangkan Realisasi Belanj Brutto adalah Rp28.368.626.455.964,- atau 79,90 persen dari anggaran yang dilaporkan dengan pengembalian Rp26.437.708.764,-. Realisasi Belanja Netto Kementerian Agama menurut fungsi pelayanan umum sebesar Rp3.441.935.724.507,- atau 99,61 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp3.455.440.476.000,-, sedangkan Realisasi Belanja Brutto adalah Rp3.450.836.418.493,- atau 9,72 persen dari anggaran yang dilaporkan dengan pengembalian Rp8.900.693.986,-. Realisasi Belanja Netto menurut fungsi Agama adalah sebesar Rp1.424.732.224.450,- atau 91,37 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp1.559.257.104.000,-, sedangkan Realisasi Belanja Brutto adalah Rp1.429.527.981.237,- atau 4,03 persen dari anggaran yang dilaporkan dengan pengembalian Rp4.795.756.787,-.

Realisasi Belanja Brutto Kementerian Agama per fungsi pada TA 2011 dan TA 2010 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel. 18
Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi
TA 2011 dan TA 2010
(disajikan secara brutto)

Kode	Uraian Fungsi	2011	2010
01	Pelayanan Umum	3.450.836.418.493	2.571.897.855.189
08	Pariwisata dan Budaya	-	700.000.000
09	Agama	1.429.527.981.237	880.838.246.238
10	Pendidikan	28.368.626.455.964	24.591.470.495.097
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	-	2.240.322.456
JUMLAH		33.248.990.855.694	28.047.146.918.980

Rincian Realisasi Belanja Brutto Kementerian Agama Menurut Fungsi Pelayanan Umum berdasarkan Unit Eselon 1:

*Rincian Realisasi
 Belanja
 Kementerian
 Agama Menurut
 Fungsi
 Pelayanan Umum*

Tabel. 19
Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama
Menurut Fungsi Pelayanan Umum (01)
per Eselon I TA 2011 dan TA 2010
(disajikan secara brutto)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
1	01	Sekretariat Jenderal	1.268.549.288.944	2.350.956.000.676
2	02	Inspektorat Jenderal	101.234.706.992	36.523.631.845
3	03	Ditjen Bimas Islam	1.381.059.090.518	19.881.689.575
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	34.860.000	231.600.000
5	05	Ditjen Bimas Kristen	200.753.073.144	8.898.655.449
6	06	Ditjen Bimas Katolik	84.062.461.605	6.965.702.159
7	07	Ditjen Bimas Hindu	167.719.578.721	5.914.076.207
8	08	Ditjen Bimas Budha	37.476.105.018	3.949.171.232
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	124.139.465.554	15.506.879.736
10	11	Badan Litbang dan Diklat	85.807.787.997	123.070.448.310
JUMLAH			3.450.836.418.493	2.571.897.855.189

Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi Pariwisata dan Budaya berdasarkan Unit Eselon 1:

*Rincian Realisasi
Belanja
Kementerian
Agama Menurut
Fungsi
Pariwisata dan
Budaya*

Tabel. 20
Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama
Menurut Fungsi Pariwisata dan Budaya (08)
per Eselon I TA 2011 dan TA 2010
(disajikan secara brutto)

(dalam Rupiah)

KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
	Eselon 1		
01	Sekretariat Jenderal	-	700.000.000
JUMLAH			700.000.000

Rincian Realisasi Belanja Brutto Kementerian Agama Menurut Fungsi Agama berdasarkan Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

*Rincian Realisasi
Belanja
Kementerian
Agama Menurut
Fungsi Agama*

Tabel. 21
Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama
Menurut Fungsi Agama (09)
per Eselon I TA 2011 dan TA 2010
(disajikan secara brutto)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
1	01	Sekretariat Jenderal	128.759.438.510	542.002.407.383
2	02	Inspektorat Jenderal	-	
3	03	Ditjen Bimas Islam	904.264.497.963	120.304.521.671
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	
5	05	Ditjen Bimas Kristen	65.898.007.271	11.429.119.140
6	06	Ditjen Bimas Katolik	49.670.722.838	9.572.396.746
7	07	Ditjen Bimas Hindu	36.450.247.711	8.278.810.168
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	6.352.681.703
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	182.684.245.362	154.158.916.820
10	11	Badan Litbang dan Diklat	61.800.821.582	28.739.392.607
JUMLAH			1.429.527.981.237	880.838.246.238

Rincian Realisasi Belanja Brutto Kementerian Agama Menurut Fungsi Pendidikan berdasarkan Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

*Rincian Realisasi
Belanja
Kementerian
Agama Menurut
Fungsi
Pendidikan*

Tabel. 22
Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama
Menurut Fungsi Pendidikan (10)
Per Eselon I TA 2011 dan TA 2010
(disajikan secara brutto)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
1	01	Sekretariat Jenderal	5.778.526.160	11.747.656.572.885
2	02	Inspektorat Jenderal	-	53.471.703.213
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	27.005.905.414.169	11.978.123.537.914
5	05	Ditjen Bimas Kristen	484.285.678.908	196.018.885.964
6	06	Ditjen Bimas Katolik	279.326.511.728	72.312.170.073
7	07	Ditjen Bimas Hindu	175.981.640.987	111.437.620.345
8	08	Ditjen Bimas Budha	88.679.464.897	48.394.285.130
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	
10	11	Badan Litbang dan Diklat	328.669.219.115	384.055.719.573
JUMLAH			28.368.626.455.964	24.591.470.495.097

Rincian Realisasi Belanja Brutto Kementerian Agama Menurut Fungsi Perlindungan Sosial berdasarkan Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

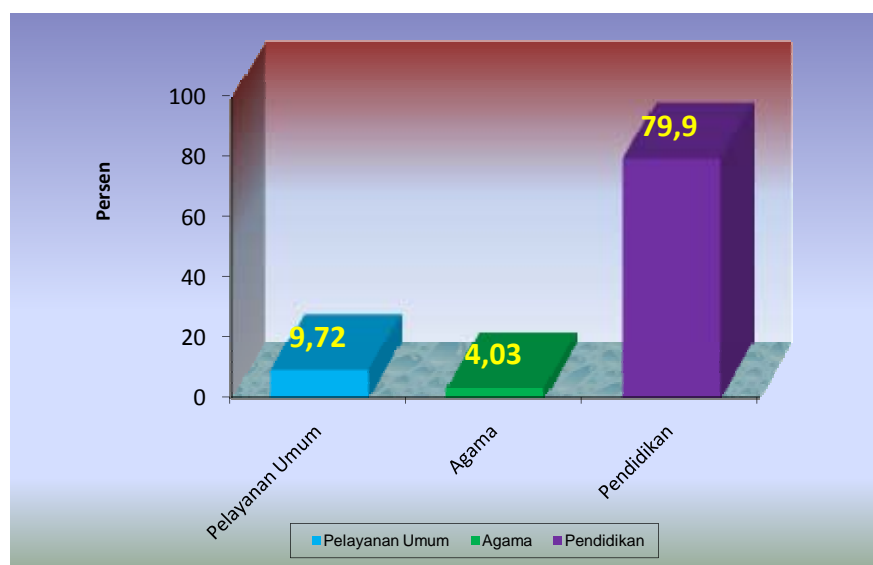
*Rincian Realisasi
Belanja
Kementerian
Agama Menurut
Fungsi
Perlindungan
Sosial*

Tabel. 23
Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama
Menurut Fungsi Perlindungan Sosial (11)
Per Eselon I TA 2011 dan TA 2010
(disajikan secara brutto)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
1	01	Sekretariat Jenderal	-	1.931.942.956
2	02	Inspektorat Jenderal	-	
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	39.590.000
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	38.150.000
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	40.000.000
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	38.500.000
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	39.992.500
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	32.347.000
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	39.800.000
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	40.000.000
JUMLAH			-	2.240.322.456

Fungsi Pendidikan merupakan nilai Realisasi Anggaran Terbesar Kementerian Agama

Besaran Realisasi Belanja Netto pada tahun 2011 adalah Rp33.208.317.300.720,- atau 93,53 persen dari total anggaran yang dilaporkan sebesar Rp35.506.282.990.000,-, sedangkan Realisasi Belanja Brutto adalah Rp33.248.990.855.694,- atau 93,64 persen dari total anggaran yang dilaporkan dengan pengembalian Rp40.673.554.974,-. Realisasi Belanja Netto dari fungsi pendidikan yang mendapat anggaran terbesar adalah Rp28.342.188.747.200,- atau 79,82 persen dari total realisasi belanja Kementerian Agama sedangkan Realisasi Brutto adalah Rp28.368.626.455.964,- atau 79,90 persen dari total realisasi belanja Kementerian Agama dengan pengembalian Rp26.437.708.764,-, Sedangkan Realisasi Belanja Netto dari fungsi agama dan keagamaan sebagai *core business* Kementerian Agama sebesar Rp1.424.732.224.450,- atau 4,01 persen, sedangkan Realisasi Belanja Brutto adalah Rp1.429.527.981.237,- atau 4,03 persen dengan pengembalian sebesar Rp4.795.756.787,-. Realisasi Belanja Netto fungsi pelayanan umum sebesar Rp3.441.935.724.507,- atau 99,61 persen, sedangkan Realisasi Belanja Brutto adalah Rp3.450.836.418.493 atau 9,72 persen dengan pengembalian Rp8.900.693.986,-



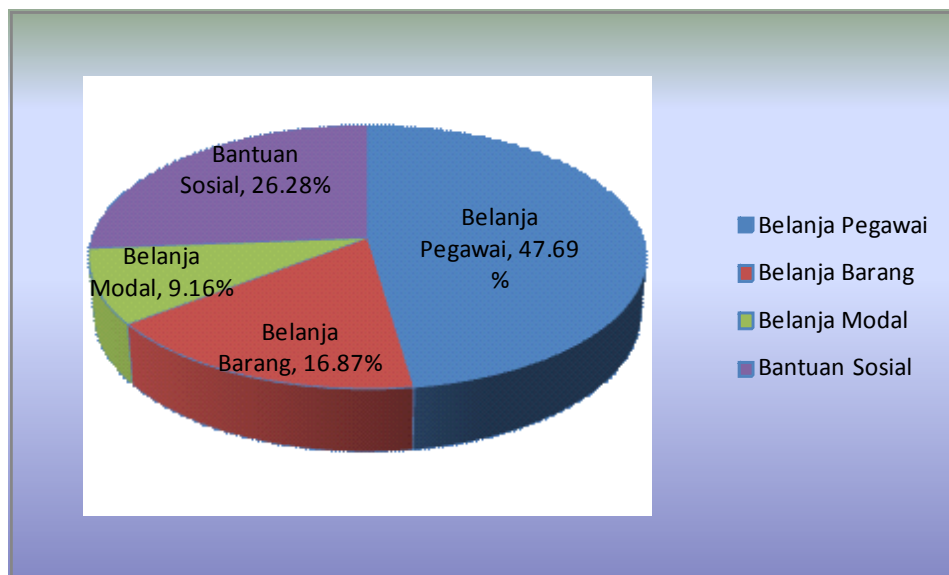
Grafik 3. Komposisi Realisasi Belanja Kementerian Agama menurut Fungsi TA 2011 (secara brutto)

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Agama menurut Sub Fungsi dan Program dapat dilihat dalam **Lampiran 2**.

Belanja Kementerian Agama Menurut Jenis Belanja

Belanja Kementerian Agama Menurut Jenis Belanja

Belanja Kementerian Agama menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; dan (iv) Bantuan Sosial. Persentase realisasi Belanja Kementerian Agama menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 3.



Grafik 4. Komposisi Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Jenis Belanja TA 2011

B.2.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp15.856.775.922. 095,-

Realisasi Belanja Pegawai Netto TA 2011 adalah sebesar Rp15.845.666.787.785,- atau 99,53 persen dari anggaran yang dilaporkan yang dilaporkan sebesar Rp15.920.695.351.000,-, sedangkan Realisasi Belanja Pegawai Brutto TA 2011 adalah Rp15.856.775.922.095,- berarti 99,60 persen dari anggaran yang dilaporkan dengan pengembalian Rp11.109.134.310,-. Sedangkan pada TA 2010 realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp12.563.581.888.876,- atau 97,57 persen dari anggaran yang dilaporkan yaitu sebesar Rp12.876.967.889.000,- Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai bruto TA 2011 naik 2,03 persen dari realisasi TA 2010, Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Rincian Belanja Pegawai

**Tabel. 24
Rincian Belanja Pegawai
(disajikan secara bruto)**

URAIAN	2011	2010	% naik (turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	15.523.866.155.647	12.144.328.812.934	2,31
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	135.374.681.719	200.965.379.437	(11,23)
Belanja Lembur	38.974.960.918	35.376.082.810	(13,65)
Belanja Vakasi	152.336.630.311	182.911.613.695	(2,15)
Belanja Tunj, Khusus dan belanja Transito	6.223.493.500	-	9,05
JUMLAH	15.856.775.922.095	12.563.581.888.876	2,03

B.2.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp5.608.832.382.115,-

Realisasi Belanja Barang Netto TA 2011 adalah sebesar Rp5.585.188.101.506,- atau 89,11 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp6.267.437.236.680,-, sedangkan Realisasi Belanja Barang Brutto adalah Rp5.608.832.382.115,- yang berarti 89,49 persen dari anggaran yang dilaporkan dengan pengembalian Rp23.644.280.609,-. Sedangkan realisasi Belanja Barang TA 2010 sebesar Rp4.594.721.341.928,- atau 87,91 persen dibandingkan dengan anggaran yang dilaporkan sebesar Rp5.226.849.026.000,-. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang bruto pada TA 2011 lebih besar atau naik sebesar 1,59 persen dari Realisasi TA 2010.

Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Rincian Belanja
Barang

Tabel. 25
Rincian Belanja Barang

URAIAN	2011	2010	% naik (turun)
Belanja Barang Operasional	781.433.482.279	886.208.097.111	0,71
Belanja Barang Non Operasional	2.827.664.458.640	1.906.680.677.262	4,99
Belanja Jasa	319.714.839.067	274.215.164.628	(0,89)
Belanja Pemeliharaan	264.251.485.537	231.233.177.900	(0,27)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	912.890.690.514	926.796.661.467	(2,69)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	105.372.490.751	72.915.774.980	(2,25)
Belanja Barang BLU	397.504.935.327	296.671.788.580	2,91
JUMLAH	5.608.832.382.115	4.594.721.341.928	1,59

B.2.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp3.046.291.844.005,-

Realisasi Belanja Modal Netto pada TA 2011 adalah sebesar Rp3.045.969.015.978,- atau 81,05 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp3.758.336.780.320,-, sedangkan Realisasi Belanja Modal Brutto TA 2011 adalah Rp3.046.291.844.005,- yang berarti 81,05 persen dari anggaran yang dilaporkan dengan pengembalian Rp322.828.027,-. Sedangkan realisasi Belanja Modal pada TA 2010 sebesar Rp2.771.539.888.423,- atau 83,46 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp3.320.937.240.237,-. Hal ini berarti Belanja Modal bruto TA 2011 mengalami penurunan sebesar - 2,40 persen dari Realisasi TA 2010.

**Rincian Belanja
Modal**

Tabel. 26
Rincian Belanja Modal
(disajikan secara brutto)

URAIAN	2011	2010	% naik (turun)
Belanja Modal Tanah	116.617.729.766	259.777.782.214	5,04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	708.327.782.686	498.109.045.207	(6,71)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.979.956.810.752	1.885.676.052.072	(2,31)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.342.109.249	23.678.157.350	(14,79)
Belanja Modal Fisik Lainnya	153.026.690.572	56.028.694.556	2,65
Belanja Modal BLU	37.020.720.980	48.270.157.024	(2,13)
JUMLAH	3.046.291.844.005	2.771.539.888.423	(2,40)

B.2.2.4. Belanja Bantuan Sosial**Belanja Bantuan
Sosial
Rp8.737.090.707
.479,-**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Netto TA 2011 adalah sebesar Rp8.731.493.395.451,- atau 91,34 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp9.559.813.622.000,-, sedangkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Brutto adalah Rp8.737.090.707.479,- atau 91,39 persen dari anggaran yang dilaporkan dengan pengembalian Rp5.597.312.028,-. Sedangkan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2010 sebesar Rp8.117.303.799.753,- atau 88,21 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp9.202.658.513.000,-, Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2011 mengalami kenaikan sebesar 3,19 persen dari Realisasi TA 2010. Rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut (dalam Rp):

**Rincian Belanja
Bantuan Sosial**

Tabel. 27
Rincian Belanja Bantuan Sosial

URAIAN	2011	2010	% naik (turun)
Belanja Bantuan Kompensasi Sosial	236.529.000	6.148.987.500	(18,94)
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan	8.370.809.457.299	7.880.088.270.553	3,23
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	146.691.013.500	79.943.902.400	(2,31)
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	219.353.707.680	151.122.639.300	(1,29)
JUMLAH	8.737.090.707.479	8.117.303.799.753	3,19

Berdasarkan temuan BPK RI terdapat kesalahan penganggaran terhadap belanja Kementerian Agama, antara lain:

- Terdapat realisasi belanja barang sebesar Rp5.221.114.334,- yang seharusnya direalisasikan dari belanja modal;
- Terdapat realisasi belanja barang sebesar Rp16.164.248.300,- yang seharusnya direalisasikan dari belanja bantuan sosial;
- Terdapat realisasi belanja modal sebesar Rp600.566.875,- yang seharusnya direalisasikan dari belanja barang;
- Terdapat realisasi belanja modal sebesar Rp345.461.010,- yang seharusnya direalisasikan dari belanja bantuan sosial;
- Terdapat realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp16.691.200.000,- yang seharusnya direalisasikan dari belanja barang;

**Catatan Penting
Lainnya**

B.3. CATATAN PENTING

1. Dari pagu anggaran Kementerian Agama tahun 2011 yang dilaporkan sebesar Rp35.506.282.990.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp33.248.990.855.694,- maka masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.257.292.134.306 dikarenakan:
 - a. Efisiensi anggaran, menyebabkan angka prosentase penyerapan anggaran seolah-olah tidak maksimal.
 - b. Dekatnya APBN-P dengan akhir tahun anggaran, menyebabkan waktu untuk melaksanakan kegiatan tidak mencukupi. Apalagi dana APBN-P tidak diperbolehkan untuk pembelian aset Tanah
2. Dalam hal realisasi belanja terdapat selisih antara SAI dan SAU, dengan SAI lebih besar Rp30.000.005,- hal ini disebabkan karena:
 - a. Terjadi double input sebesar Rp30.000.000,- di satker UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - b. Tidak terinputnya data dari Kanwil DJPB Wilayah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp5,- di satker Kankemenag Kab. Kupang
3. Satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan pencairan anggaran yakni satker Madrasah Aliyah Negeri Gubug. Hal ini didasarkan pada Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor Kw.11.1/3/KU.00/4890/2012 tanggal 11 April 2012 perihal Laporan MAN Gubug, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Keberadaan MAN Gubug berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 151 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Penegerian MAN Gubug Kabupaten Grobogan;
 - b. Setelah turunnya SK tersebut, MAN Gubug belum bisa menjalankan fungsinya dengan optimal karena:
 - 1) Belum ada kesepahaman tentang operasional MAN terkait dengan Yayasan YAUMI Gubug Kabupaten Grobogan;
 - 2) Belum terbentuk perangkat pengelola keuangan negara di MAN Gubug seperti KPA, PPK, Pejabat Penerbit dan Penandatanganan SPM dan Bendahara, sehingga belum ada realisasi anggaran DIPA;
 - 3) Belum ada arahan yang pasti dari Menag terkait dengan permohonan pembekuan MAN Gubug sesuai surat dari Yayasan YAUMI No. 03/Ya/XII/2010 tanggal 26 Desember 2010 dan Surat KaKanwil Kemenag Prov. Jateng No. Kw.11.4/4/PP.00/2196/2011 tanggal 22 Februari 2011
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut maka Laporan Keuangan nihil dan sudah terekam dalam LK UAW Kanwil Kemenag Prov. Jateng



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

C A L K

NERACA

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Neraca secara umum

Komposisi Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel. 28
Neraca Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Aset Lancar	253.454.673.272	201.270.414.739
Aset Tetap	29.285.034.031.095	26.224.039.992.097
Aset Lainnya	3.350.987.296.065	2.681.985.476.072
Jumlah Aset	32.889.476.000.432	29.107.295.882.908
Kewajiban Jangka Pendek	3.574.915.973.197	353.360.764.574
Kewajiban Jangka Panjang		0
Jumlah Kewajiban	3.574.915.973.197	353.360.764.574
Ekuitas Dana Lancar	(77.048.427.689)	(152.090.349.835)
Ekuitas Dana Investasi	29.391.608.454.924	28.906.025.468.169
Jumlah Ekuitas Dana	29.314.560.027.235	28.753.935.118.334
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	32.889.476.000.432	29.107.295.882.908

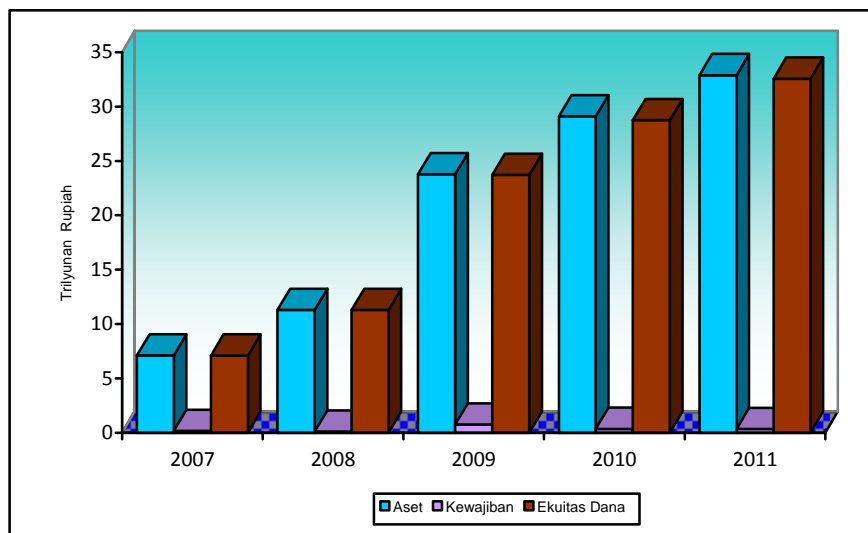
Jumlah Aset per 31 Desember 2011 sebesar Rp32.889.476.000.432,-, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp253.454.673.272,-, Aset Tetap sebesar Rp29.285.034.031.095,- dan Aset Lainnya sebesar Rp3.350.987.296.065,-.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 sebesar Rp3.574.915.973.197,- merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp3.574.915.973.197,-.

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2011 sebesar Rp29.314.560.027.235,- terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp(77.048.427.689,-) dan ekuitas dana investasi sebesar Rp29.391.608.454.924,-.

Peningkatan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam perbandingan pada Grafik 5 di bawah ini:

Perkembangan Neraca selama 5 tahun terakhir



Grafik 5: Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada Neraca Tahun 2007- 2011

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp2.772.512.926,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp2.772.512.926,- dan Rp9.723.647.912,- merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan). Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel. 29
Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I**

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
Eselon 1				
1	01	Sekretariat Jenderal	366.371.535	7.373.621.779
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	452.009.856	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	1.585.168.678	2.169.559.323
5	05	Ditjen Bimas Kristen	240.993.000	121.896.810
6	06	Ditjen Bimas Katolik	78.157.000	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	6.673.300	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	41.973.500	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	1.166.057	58.570.000
JUMLAH			2.772.512.926	9.723.647.912

C.2.2. Kas di Bendahara Penerimaan

**Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp2.579.653.331, -**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp2.579.653.331,- dan Rp2.931.949.230,- mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel. 30
Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I**

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
Eselon 1				
1	01	Sekretariat Jenderal	52.575.658	588.511.084
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	99.714.943	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	2.360.212.730	1.463.130.321
5	05	Ditjen Bimas Kristen	67.150.000	860.467.825
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	19.840.000
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	-	-
JUMLAH			2.579.653.331	2.931.949.230

C.2.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

**Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp10.104.236.574, -**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp10.104.236.574,- dan Rp10.915.757.698, . Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup kas lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo tunai. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dapat terjadi karena:

- a. Adanya pendapatan yang telah diterima sebelum tanggal neraca, namun sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Negara, meliputi:
 - 1) Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca yang belum menerapkan *Treasury National Pooling (TNP)*
 - 2) Pungutan pajak yang belum disetorkan ke Kas Umum Negara pada tanggal neraca
 - 3) Pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung pada rekening Bendahara Pengeluaran
 - 4) Pengembalian belanja yang belum disetor ke Kas Negara.
- b. Adanya kewajiban satker kepada pihak lain, yaitu: jika ada dana

yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran seperti uang honor atau SPPD yang belum dibagikan kepada pihak lain.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 31
Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	220.402.032	3.742.643.876
2	02	Inspektorat Jenderal	-	112.600.000
3	03	Ditjen Bimas Islam	41.969.829	200.529.920
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	9.608.516.841	6.335.526.536
5	05	Ditjen Bimas Kristen	129.503.493	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	1.312.435	9.499.000
7	07	Ditjen Bimas Hindu	447.185	853.000
8	08	Ditjen Bimas Budha	8.573.600	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	23.365.109	506.424.365
10	11	Badan Litbang & Diklat	70.146.050	7.681.000
JUMLAH			10.104.236.574	10.915.757.697

C.2.4. Kas pada BLU

*Kas pada BLU
Rp160.067.061.688,-*

Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp160.067.061.688,- dan Rp132.236.879.094,-.

Rincian Kas Pada BLU per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 32
Kas pada Badan Layanan Umum Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	160.067.061.688	132.236.879.094
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	-	-
JUMLAH			160.067.061.688	132.236.879.094

C.2.5. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak
Rp3.565.993.353,-*

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.565.993.353,- dan Rp1.616.400.187,-. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun 2011 serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian Piutang Bukan Pajak per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 33
Piutang Bukan Pajak Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	9.343.814	49.032.587
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	10.450.000	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	3.105.409.539	1.310.327.600
5	05	Ditjen Bimas Kristen	302.000.000	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	138.790.000	227.340.000
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	29.700.000
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	-	-
JUMLAH			3.565.993.353	1.616.400.187

C.2.6. Uang Muka Belanja

*Uang Muka Belanja
Rp1.774.516.357,-*

Saldo Uang Muka Belanja per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.774.516.357,- dan Rp3.666.667.259,-. Uang Muka Belanja merupakan pengeluaran Kementerian Agama yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati Kementerian Agama.

Rincian Uang Muka Belanja pada masing-masing per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 34
Uang Muka Belanja Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	9.500.000
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	11.009.550	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	1.763.506.807	3.656.805.926
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	-	361.333
JUMLAH			1.774.516.357	3.666.667.259

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
C.2.7. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
Rp1.911.791.625,-

Saldo Piutang dari kegiatan operasional BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.911.791.625,- dan Rp2.640.363.334,-.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 35
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	1.911.791.625	2.640.363.334
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	-	-
JUMLAH			1.911.791.625	2.640.363.334

Piutang dari Kegiatan Operasional Non BLU
C.2.8. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
Rp335.446.062,-

Saldo Piutang dari kegiatan non operasional BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp335.446.062,- dan Rp253.340.069,-.

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 36
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	335.446.062	253.340.069
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	-	-
JUMLAH			335.446.062	253.340.069

C.2.9. Investasi Dalam Deposito

*Investasi Dalam Deposito
Rp5.000.000.000,-*

Saldo Investasi Dalam Deposito per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp 5.000.000.000,- dan Rp 0,-. Investasi Dalam Deposito tersebut merupakan saldo Investasi dari UIN Alauddin Makassar.

C.2.10. Persediaan

*Persediaan
Rp61.710.862.838,-*

C.2.10.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp61.710.862.838,- dan Rp29.644.935.134,-.

Rincian Persediaan per eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel. 37
Persediaan Per Eselon I**

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
Eselon 1				
1	01	Sekretariat Jenderal	7.660.740.337	9.395.321.608
2	02	Inspektorat Jenderal	1.040.301.451	523.878.959
3	03	Ditjen Bimas Islam	31.111.840.709	1.493.773.141
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	16.380.949.365	14.917.721.235
5	05	Ditjen Bimas Kristen	311.037.834	224.175.578
6	06	Ditjen Bimas Katolik	1.922.591.468	451.382.688
7	07	Ditjen Bimas Hindu	183.817.939	108.380.503
8	08	Ditjen Bimas Budha	51.411.090	92.648.960
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	727.407.656	1.068.368.865
10	11	Badan Litbang & Diklat	2.320.764.989	1.369.283.588
JUMLAH			61.710.862.838	29.644.935.125

C.2.10.2. Persediaan Badan Layanan Umum

*Persediaan BLU
Rp3.632.598.518,-*

Saldo Persediaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.632.598.518,- dan Rp7.637.474.822,-. Rincian Persediaan BLU per eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel. 38
Persediaan BLU Per Eselon I**

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
Eselon 1				
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	3.632.598.518	7.637.474.822
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	-	-
JUMLAH			3.632.598.518	7.637.474.822

Aset Tetap
Rp29.285.034.031.095,-

C.2.11. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp29.285.034.031.095,- dan Rp26.224.039.992.097,-. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp3.060.994.038.998,- dari saldo aset tetap per 31 Desember 2010. Kenaikan aset tetap sebesar Rp 3.046.291.844.005,- berasal dari belanja modal selama tahun 2011 dan sebesar Rp 14.702.194.993,- berasal dari transfer masuk, hibah masuk, reklasifikasi masuk, dan belanja barang (52) yang dikapitalisasi. Komponen aset tetap yang disajikan per 31 Desember 2011 terdiri dari:

Tabel. 39
Komponen Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah	10.117.108.015.073	10.210.855.340.261	(93.747.325.188)
Peralatan dan Mesin	3.743.536.696.306	2.908.545.963.990	834.990.732.316
Gedung dan Bangunan	13.697.871.121.131	11.232.120.839.301	2.465.750.281.830
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	244.487.519.204	176.425.233.041	68.062.286.163
Aset Tetap Lainnya	538.481.975.446	411.920.905.589	126.561.069.857
Konstruksi Dalam Pengerjaan	943.548.703.935	1.284.171.709.915	(340.623.005.980)
Jumlah	29.285.034.031.095	26.224.039.992.097	3.060.994.038.998

Kenaikan nilai aset tetap per 31 Desember 2011 sebesar Rp3.060.994.038.998, diantaranya berasal dari belanja modal sebesar Rp3.046.291.844.005,-, penambahan dan pengurangan aset tetap berdasarkan koreksi dari KPKNL (IP), serta penambahan aset tetap yang berasal dari transaksi tambah kurang pada SIMAK BMN.

Sampai dengan tahun 2011, Kementerian Agama bersama dengan Kementerian Keuangan telah melakukan IP terhadap 4.385 satker. Dalam rangka melakukan monitoring atas hasil IP yang telah diinput ke dalam SIMAK BMN telah dilakukan rekonsiliasi antara data hasil IP menurut DJKN dengan hasil IP yang telah diinput ke dalam SIMAK BMN, yaitu:

1. Pada tahun 2009, hasil IP terhadap 4.019 satker menurut data DJKN sebesar Rp6.784.876.201.828,-, sedangkan yang telah diinput ke dalam SIMAK BMN melalui transaksi koreksi tim penertiban aset (205) sebesar Rp6.603.894.333.660,- yang berasal dari tahun 2008 sebesar Rp2.110.213.856.959,- dan tahun 2009 sebesar Rp4.493.680.476.701,-. Sehingga masih terdapat selisih nilai koreksi aset tetap antara data DJKN dengan yang telah diinput dalam LBMN per 31 Desember 2009 sebesar Rp180.981.868.168,-.
2. Pada tanggal 27 Mei 2010 diadakan rekonsiliasi IP di Gedung BPK antara DJKN dan Kementerian Agama. Berdasarkan hasil rekonsiliasi, nilai koreksi Kementerian Agama mengalami kenaikan dari nilai semula sebesar Rp6.784.876.201.828,- menjadi Rp15.815.538.465.109,-

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui terdapat hasil IP satker di luar Kementerian Agama masuk ke dalam hasil IP Kementerian Agama, yaitu:

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KOREKSI IP
1.	KPKNL Singkawang		
	532039	Pengadilan Agama Bengkayang	719.013.000
2.	KPKNL Bogor		
	189772	Institut Pertanian Bogor	1.477.719.716.548
	532860	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pertanian	47.838.576.321
	580836	Pusat Studi Regional Penelitian Biotrop (Searneo Biotrop)	15.605.837.848
3.	KPKNL Makassar		
		Embarkasi Haji Makassar	45.687.605.833
TOTAL			1.587.570.749.550

Berdasarkan data di atas, hasil IP Kementerian Agama dikoreksi sebesar Rp1.587.570.749.550,- menjadi Rp14.227.967.715.559,-. Selain itu, terdapat koreksi di Provinsi Aceh, yaitu pada satker MIN Kutacane dan MAN Matangkuli yang tidak wajar sebesar Rp5.102.871.716.000 sehingga hasil IP dikoreksi dari semula sebesar Rp14.227.967.715.559,- menjadi sebesar Rp9.125.095.999.559,-.

Dari nilai koreksi tersebut, terdapat perbaikan data dari KPKNL (LP-01) sebesar Rp2.245.516.500, sehingga nilai koreksi bertambah menjadi Rp9.127.341.516.059. Dari total hasil IP sebesar Rp9.127.341.516.059, yang sudah diinput ke dalam SIMAK BMN melalui transaksi koreksi tim penertiban aset (205) sebesar Rp5.772.321.272.238 sehingga masih terdapat selisih koreksi sebesar Rp3.355.020.243.821.

3. Pada tanggal 5 April 2011 diadakan rekonsiliasi dengan DJKN, IP Kementerian Agama menjadi Rp7.292.316.240.156,-. Dari angka tersebut terdapat aset satker embarkasi haji sebesar Rp45.687.605.833,- sehingga koreksi hasil IP menjadi Rp7.246.628.634.323,-. Dari hasil IP tersebut yang sudah diinput ke dalam SIMAK BMN berdasarkan formulir isian hasil IP yang telah dimasukkan ke dalam SIMAK BMN (formulir R-02) sebesar Rp7.208.401.275.557,-, yang terdiri dari transaksi saldo awal (100) sebesar Rp1.318.564.602.675,-, transaksi koreksi perubahan nilai (204) sebesar Rp221.726.096.593,-, transaksi koreksi tim penertiban aset (205) sebesar Rp5.743.974.277.443,-, transaksi penghapusan (301) sebesar -Rp76.081.874.154,-, dan transaksi lainnya sebesar

- Rp218.173.000,-, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp38.227.358.766,- ,
4. Pada tanggal 17 Februari 2012 dilaporkan nilai koreksi hasil IP dari form R1 sebesar Rp5.865.132.129.707,- sedangkan nilai koreksi yang ada di SIMAK-BMN dari form R2 sebesar Rp5.605.052.752.704,- selisih antara R1 dan R2 adalah Rp260.079.377.003,-. Berdasarkan hasil rekonsiliasi pada tanggal 17 Februari 2012 tersebut diketahui:
 - a) Terdapat satker yang pada rekon IP pada tanggal 5 April 2011 sudah nihil (nol) namun pada rekon keempat ini, terdapat selisih;
 - b) Terdapat satker yang selisihnya bertambah besar dari hasil rekon ketiga;
 - c) Tidak adanya kesepakatan atas formula untuk pengisian kolom koreksi (selisih) antara DJKN, KPKNL, dan Kemenag;
 - d) Tidak semua data KPKNL bisa disandingkan dengan data Kemenag;
 - e) BAR hasil Verifikasi dan validasi KPKNL setelah dihitung ulang masih terdapat kesalahan hitung, selisih sebesar Rp278.539.967.564,- pada BAR tertera Rp306.979.615.967 namun setelah dihitung ulang jumlah tersebut seharusnya Rp585.519.583.531,-
 5. Pada tanggal 30 April 2012 diketahui masih terdapat selisih antara nilai koreksi IP berdasarkan data KPKNL dengan yang telah dimasukkan dalam aplikasi SIMAK-BMN Kementerian Agama sebesar Rp48.664.474.078,-

C.2.11.1. Aset Tetap (Satker Non BLU)

**Aset Tetap Satker
Non BLU
Rp22.570.767.224.003**

Saldo Aset Tetap pada satker biasa per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp22.570.767.224.003,- dan Rp 19.798.741.862.947,- merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca UAPPA-E1.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

**Tabel. 40
Komponen Aset Tetap Satker Non BLU**

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah	7.120.538.505.013	6.914.314.239.874	206.224.265.139
Peralatan dan Mesin	2.639.418.104.688	2.046.077.682.947	593.340.421.741
Gedung dan Bangunan	11.552.572.043.252	9.638.800.689.872	1.913.771.353.380
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	156.205.096.293	109.254.023.572	46.951.072.721
Aset Tetap Lainnya	470.257.745.288	350.085.500.172	120.172.245.116
Konstruksi Dalam Pengerjaan	631.775.729.469	740.209.726.510	(108.433.997.041)
Jumlah	22.570.767.224.003	19.798.741.862.947	2.772.025.361.056

Rincian komponen Aset Tetap Non BLU per eselon I disajikan dalam tabel 40 s.d 45 berikut ini:

Tabel. 41
Tanah Non BLU Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	1.913.475.222.491	1.911.372.854.301
2	02	Inspektorat Jenderal	42.871.914.931	42.871.914.931
3	03	Ditjen Bimas Islam	4.611.948.802	2
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	4.948.534.232.978	4.759.695.763.389
5	05	Ditjen Bimas Kristen	31.980.784.807	26.490.532.307
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	42.579.047.000	42.579.047.000
8	08	Ditjen Bimas Budha	953.032.100	871.032.100
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	15.778.222.945	15.778.222.945
10	11	Badan Litbang & Diklat	119.754.098.959	114.654.872.899
JUMLAH			7.120.538.505.013	6.914.314.239.874

Tabel. 42
Peralatan dan Mesin Non BLU Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	675.209.932.884	637.038.504.853
2	02	Inspektorat Jenderal	26.630.764.106	21.723.150.165
3	03	Ditjen Bimas Islam	63.696.458.419	20.256.291.541
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	1.540.697.882.646	1.117.425.298.073
5	05	Ditjen Bimas Kristen	58.359.847.953	47.077.262.621
6	06	Ditjen Bimas Katolik	5.983.341.764	4.418.494.444
7	07	Ditjen Bimas Hindu	43.637.687.889	21.285.938.293
8	08	Ditjen Bimas Budha	13.748.042.442	11.533.835.857
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	59.659.392.885	38.912.761.649
10	11	Badan Litbang & Diklat	151.794.753.700	126.406.145.451
JUMLAH			2.639.418.104.688	2.046.077.682.947

Tabel. 43
Gedung dan Bangunan Non BLU Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	2.442.580.620.565	2.016.498.629.650
2	02	Inspektorat Jenderal	50.665.238.894	22.712.632.125
3	03	Ditjen Bimas Islam	108.707.780.592	7.143.819.000
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	8.326.159.313.108	7.020.274.409.553
5	05	Ditjen Bimas Kristen	180.544.637.752	157.171.553.372
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	84.227.102.504	71.098.688.304
8	08	Ditjen Bimas Budha	13.501.695.497	8.230.275.497
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	7.802.724.329	6.849.643.329
10	11	Badan Litbang & Diklat	338.382.930.011	328.821.039.042
JUMLAH			11.552.572.043.252	9.638.800.689.872

Tabel. 44
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Non BLU Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	25.041.595.296	21.266.213.816
2	02	Inspektorat Jenderal	440.750.000	398.160.000
3	03	Ditjen Bimas Islam	101.536.560	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	107.329.524.208	69.800.086.624
5	05	Ditjen Bimas Kristen	10.869.710.587	6.940.961.219
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	2.687.218.300	1.687.907.300
8	08	Ditjen Bimas Budha	483.350.000	258.460.000
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	316.583.275	379.470.346
10	11	Badan Litbang & Diklat	8.934.828.067	8.522.764.267
JUMLAH			156.205.096.293	109.254.023.572

Tabel. 45
Aset Tetap Lainnya Non BLU Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	34.030.610.384	34.316.586.773
2	02	Inspektorat Jenderal	719.783.753	534.033.253
3	03	Ditjen Bimas Islam	5.843.667.300	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	398.446.859.184	291.178.209.314
5	05	Ditjen Bimas Kristen	6.206.550.397	4.709.975.699
6	06	Ditjen Bimas Katolik	107.000.000	107.000.000
7	07	Ditjen Bimas Hindu	7.617.667.411	3.377.871.636
8	08	Ditjen Bimas Budha	7.188.497.511	6.380.968.511
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	2.784.048.825	1.524.076.800
10	11	Badan Litbang & Diklat	7.313.060.523	7.956.778.185
JUMLAH			470.257.745.288	350.085.500.171

Tabel. 46
Konstruksi Dalam Pengerjaan Non BLU Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	68.347.475.400	391.858.472.292
2	02	Inspektorat Jenderal	-	16.998.029.000
3	03	Ditjen Bimas Islam	10.897.590.900	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	500.918.455.101	288.138.839.800
5	05	Ditjen Bimas Kristen	40.875.282.518	12.306.927.578
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	10.238.431.620	7.272.818.740
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	2.693.961.000
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	498.493.930	20.940.678.100
JUMLAH			631.775.729.469	740.209.726.510

C.2.11.2. Aset Tetap Badan Layanan Umum

Aset Tetap BLU
Rp6.714.266.807.092

Saldo Aset Tetap Badan Layanan Umum per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp6.714.266.807.092 dan Rp 6.425.298.129.150,-. Aset Tetap BLU terdapat di unit eselon I Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (025.04) dengan rincian sebagai berikut;

Tabel. 47
Komponen Aset Tetap Badan Layanan Umum

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah BLU	2.996.569.510.060	3.296.541.100.387	(299.971.590.327)
Peralatan dan Mesin BLU	1.104.118.591.618	862.468.281.043	241.650.310.575
Gedung dan Bangunan BLU	2.145.299.077.879	1.593.320.149.429	551.978.928.450
Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU	88.282.422.911	67.171.209.469	21.111.213.442
Aset Tetap Lainnya BLU	68.224.230.158	61.835.405.417	6.388.824.741
Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU	311.772.974.466	543.961.983.405	(232.189.008.939)
Jumlah	6.714.266.807.092	6.425.298.129.150	288.968.677.942

C.2.12. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp3.350.987.296.065,-

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.350.987.296.065,- dan Rp 2.681.985.476.072,-. Aset lainnya pada satker biasa Rp3.332.021.052.175,- dan Aset Lainnya pada satker BLU Rp18.966.243.890,-. Rincian aset lainnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel. 48
Komponen Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Tagihan TP/TGR	-	4.099.200
Aset Tak Berwujud	40.990.665.207	27.180.911.757
Aset Tak Berwujud BLU	15.851.399.401	10.743.020.664
Aset Lain-lain	46.617.514.732	2.641.484.115.488
Aset Lain-lain BLU	3.114.844.489	2.573.328.963
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	3.244.412.872.236	
Jumlah	3.350.987.296.065	2.681.985.476.072

Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp40.990.665.207

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp40.990.665.207,- dan Rp27.180.911.757,- merupakan aset yang berupa software, lisensi, hasil kajian/penelitian dan aset tak berwujud lainnya yang berada di UAPPA-E1.

Rincian Aset Tak Berwujud per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 49
Aset Tak Berwujud Non BLU Per Eselon I

NO	KODE	Pusat	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	6.528.775.226	5.187.058.410
2	02	Inspektorat Jenderal	655.498.300	399.987.800
3	03	Ditjen Bimas Islam	1.592.747.003	630.663.003
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	13.391.409.303	6.141.917.613
5	05	Ditjen Bimas Kristen	461.375.400	158.000.000
6	06	Ditjen Bimas Katolik	61.582.350	61.582.350
7	07	Ditjen Bimas Hindu	127.000.000	91.250.000
8	08	Ditjen Bimas Budha	103.785.000	99.825.000
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	16.688.229.175	14.074.791.681
10	11	Badan Litbang dan Diklat	1.380.263.450	335.835.900
JUMLAH			40.990.665.207	27.180.911.757

Aset Tak Berwujud BLU

*Aset Tak Berwujud
BLU
Rp15.851.399.401,-*

Saldo Aset Tak Berwujud BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp15.851.399.401,- dan Rp10.743.020.664,- merupakan aset yang berupa software, lisensi, hasil kajian/penelitian dan aset tak berwujud lainnya. Rincian Aset Tak Berwujud BLU pada per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 50
Aset Tak Berwujud BLU Per Eselon I

NO	KODE	Pusat	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	15.851.399.401	10.743.020.664
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	-
JUMLAH			15.851.399.401	10.743.020.664

Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain
Rp46.617.514.732,-*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp46.617.514.732,- dan Rp2.641.484.115.488,-. Aset Lain-lain dimaksud berupa Aset Tetap yang sudah rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Rincian Aset Lain-lain per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 51
Aset Lain-Lain Non BLU Per Eselon I

NO	KODE	Pusat	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	19.070.299.795	11.733.687.632
2	02	Inspektorat Jenderal	162.590.350	1.561.833.440
3	03	Ditjen Bimas Islam	413.295.100	304.451.600
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	20.043.913.736	7.252.416.203
5	05	Ditjen Bimas Kristen	600.832.437	120.739.195
6	06	Ditjen Bimas Katolik	895.479.405	786.806.801
7	07	Ditjen Bimas Hindu	341.524.336	262.897.203
8	08	Ditjen Bimas Budha	691.861.506	6.510.604
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	86.566.775	86.566.775
10	11	Badan Litbang dan Diklat	4.311.151.292	2.131.147.447
11		BPIH dan DAU		2.617.237.058.588
JUMLAH			46.617.514.732	2.641.484.115.488

Aset Lain-lain BLU

Aset Lain-lain BLU
Rp3.114.844.489,-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.114.844.489,- dan Rp2.573.328.963,-. Aset Lain-lain dimaksud berupa Aset Tetap pada satker BLU yang sudah rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Rincian Aset Lain-lain per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 52
Aset Lain-Lain BLU Per Eselon I

NO	KODE	Pusat	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	3.114.844.489	2.573.328.963
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	-
JUMLAH			3.114.844.489	2.573.328.963

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp3.244.412.872.236,-

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.244.412.872.236,- dan Rp 0,-. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Aset Bersih dari BPIH dan Dana Abadi Umat (DAU). Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Dana Abadi Umat (DAU) yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan haji dan dari sumber lain sebagaimana tertuang

dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999. Pemasukan BPDAU selain dari efisiensi BPIH juga berasal dari bunga deposito, jasa giro, dividen atas saham Bank Muamalat Indonesia, dan imbalan jasa SBSN. DAU dialokasikan untuk kemaslahatan umat di bidang pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, pembangunan sarana dan prasarana ibadah serta bidang penyelenggaraan haji. Nilai yang dilaporkan adalah nilai bersih Dana Abadi Umat berdasarkan Laporan Keuangan BP DAU, yaitu sebesar Rp2.077.597.299.329,-

2. Berdasarkan surat Kementerian Keuangan No.S-3410/PB.6/2011 tanggal 30 Maret 2011, penyajian aset yang berasal dari BPIH adalah sebesar *net asset* (aset bersih) BPIH. Aset bersih BPIH berdasarkan Laporan Keuangan BPIH adalah sebesar Rp1.166.815.572.907,-. Aset BPDAU dan BPIH ini disajikan sebagai aset lain-lain berdasarkan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Dr:Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp 3.244.412.872.236

Cr:Utang Kepada Pihak Ketiga

Rp 3.244.412.872.236

C.2.13. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp3.557.037.840.052, -*

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.557.037.840.052,- dan Rp334.119.122.227,- merupakan kewajiban Kementerian Agama atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Kementerian Agama lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan akhir tahun 2011 belum dibayar. Utang kepada pihak ketiga terdiri dari utang belanja pegawai dan utang belanja barang. Utang merupakan akun lawan (pasangan) atas akun-akun di bawah ini (dalam Rp):

Tabel. 53
Akun Lawan (Kontra) Utang Kepada Pihak Ketiga

Akun Lawan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Kas di Lainnya dan Setara Kas (yang bukan lawan dari pendapatan yang ditangguhkan)	6.770.069.142	7.296.744.314
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	305.854.898.674	326.822.377.913
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	3.244.412.872.236	0
Jumlah	3.557.037.840.052	334.119.122.227

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 54
Utang Kepada Pihak Ketiga Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	1.949.525.251	294.575.057.966
2	02	Inspektorat Jenderal	-	112.600.000
3	03	Ditjen Bimas Islam	5.669.754.171	3.560.840
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	287.325.920.710	38.782.735.565
5	05	Ditjen Bimas Kristen	10.420.421.403	136.637.830
6	06	Ditjen Bimas Katolik	4.418.688.474	11.806.770
7	07	Ditjen Bimas Hindu	529.838.043	34.358.144
8	08	Ditjen Bimas Budha	1.906.515.918	8.186.854
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	144.035.797	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	260.268.049	454.178.244
11		BPIH dan DAU	3.244.412.872.236	
JUMLAH			3.557.037.840.052	334.119.122.213

C.2.14. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp501.818,-*

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp501.818,- dan Rp0,-.

C.2.15. Pendapatan Diterima Di Muka

*Pendapatan Diterima
DiMuka
Rp9.154.923.970,-*

Saldo pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp9.154.923.970,- dan Rp 2.962.989.081,- merupakan pendapatan yang diterima oleh Kementerian Agama dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari Kementerian Agama, atau pendapatan bukan pajak yang telah disetor oleh wajib bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar bukan pajak. Rincian Pendapatan Diterima di Muka per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 55
Pendapatan Diterima di Muka Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	772.220.785	360.981.448
2	02	Inspektorat Jenderal	630.086	565.100
3	03	Ditjen Bimas Islam	990.000	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	8.381.083.099	2.601.442.533
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	-	-
JUMLAH			9.154.923.970	2.962.989.081

C.2.16. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp2.772.512.926,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp2.772.512.926,- dan Rp9.723.647.912,- Jumlah Uang Muka dari KPPN merupakan pasangan perkiraan kas di bendahara pengeluaran yaitu sisa UP yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara.

Rincian Uang Muka dari KPPN per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 56
Uang Muka KPPN Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
Eselon 1				
1	01	Sekretariat Jenderal	366.371.535	7.373.621.779
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	452.009.856	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	1.585.168.678	2.169.559.323
5	05	Ditjen Bimas Kristen	240.993.000	121.896.810
6	06	Ditjen Bimas Katolik	78.157.000	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	6.673.300	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	41.973.500	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	1.166.057	58.570.000
JUMLAH			2.772.512.926	9.723.647.912

C.2.17. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp5.913.820.763,-

Saldo Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp5.913.820.763,- dan Rp6.550.962.614,- merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) UAPPA-E1 yang belum disetorkan ke Kas Negara. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun lawan (pasangan) atas akun-akun di bawah ini (dalam Rp):

Tabel. 57
Akun Lawan (Kontra) Pendapatan yang Ditangguhkan

Akun Lawan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Kas di Bendahara Penerimaan	2.579.653.331	2.931.949.230
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3.334.167.432	3.619.013.384
Jumlah	5.913.820.763	6.550.962.614

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 58
Pendapatan yang Ditangguhkan Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	257.135.510	4.480.702.892
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	106.152.768	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	5.454.895.350	1.172.771.897
5	05	Ditjen Bimas Kristen	68.563.600	860.467.825
6	06	Ditjen Bimas Katolik	695.635	9.499.000
7	07	Ditjen Bimas Hindu	447.185	19.840.000
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	1.077.415	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	24.853.300	7.681.000
JUMLAH			5.913.820.763	6.550.962.614

C.2.18. Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang
Pendek
Rp36.373.668,-*

*Jangka
Lainnya*

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp36.373.668,- dan Rp4.042.740,-. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 59
Utang Jangka Pendek Lainnya Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	36.373.668	4.042.740
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	-	-
JUMLAH			36.373.668	4.042.740

C.2.19. Cadangan Piutang

*Cadangan
Piutang
Rp10.813.231.040,-*

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp10.813.231.040,- dan Rp4.513.103.590,-. Jumlah cadangan piutang merupakan akun lawan (pasangan) atas akun-akun di bawah ini (dalam Rp):

Tabel. 60
Akun Lawan (Kontra) Cadangan Piutang

Akun Lawan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Piutang Bukan Pajak	3.565.993.353	1.616.400.187
Bagian Lancar Tagihan TGR	0	3.000.000
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	1.911.791.625	2.640.363.334
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	335.446.062	253.340.069
Investasi dalam Deposito	5.000.000.000	0
Jumlah	10.813.231.040	4.513.103.590

Rincian Cadangan Piutang per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 61
Cadangan Piutang Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	9.343.814	1.860.814.130
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	10.450.000	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	10.352.647.226	2.424.588.127
5	05	Ditjen Bimas Kristen	302.000.000	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	138.790.000	227.340.000
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	-	361.333
JUMLAH			10.813.231.040	4.513.103.590

C.2.20. Cadangan Persediaan

*Cadangan Persediaan
Rp65.343.461.356*

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp65.343.461.356,- dan Rp37.282.409.956,-. Jumlah ini merupakan lawan dari perkiraan persediaan yang dilaporkan UAPPA-E1, termasuk persediaan pada BLU. Rincian Cadangan Persediaan per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 62
Cadangan Persediaan Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	7.660.740.337	9.395.321.608
2	02	Inspektorat Jenderal	1.040.301.451	523.878.959
3	03	Ditjen Bimas Islam	31.111.840.709	1.493.773.141
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	20.013.547.883	22.555.196.156
5	05	Ditjen Bimas Kristen	311.037.834	224.175.578
6	06	Ditjen Bimas Katolik	1.922.591.468	451.382.688
7	07	Ditjen Bimas Hindu	183.817.939	108.380.503
8	08	Ditjen Bimas Budha	51.411.090	92.648.960
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	727.407.656	1.369.283.588
10	11	Badan Litbang & Diklat	2.320.764.989	1.068.368.865
JUMLAH			65.343.461.356	37.282.410.046

C.2.21. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Rp(305.891.774.160)

Jumlah perkiraan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp(305.891.774.160) dan Rp(326.826.420.653). Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek tahun 2011. Jumlah Dana Yang Harus Disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek merupakan akun lawan (pasangan) atas akun-akun di bawah ini (dalam Rp):

Tabel. 63
Akun Lawan (Kontra) Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Utang Kepada Pihak Ketiga (selain lawan dari Kas Lainnya dan Setara Kas)	305.854.898.674	(326.822.377.913)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	501.818	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	36.373.668	(4.042.740)
Jumlah	(305.891.774.160)	(305.891.774.160)

Rincian Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 64
Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	(1.933.683.071)	(290.979.256.998)
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	(5.634.723.985)	(3.560.840)
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	(280.848.460.157)	(35.198.434.973)
5	05	Ditjen Bimas Kristen	(10.292.331.510)	(136.637.830)
6	06	Ditjen Bimas Katolik	(4.418.071.674)	(11.806.770)
7	07	Ditjen Bimas Hindu	(529.838.043)	(34.358.144)
8	08	Ditjen Bimas Budha	(1.897.942.318)	(8.186.854)
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	(121.748.103)	(454.178.244)
10	11	Badan Litbang & Diklat	(214.975.299)	-
JUMLAH			(305.891.774.160)	(326.826.420.653)

C.2.22. Dana Lancar BLU

*Dana Lancar BLU
Rp160.067.061.688*

Jumlah Dana Lancar BLU per 31 Desember 2011 Rp160.067.061.688,- dan 31 Desember 2010 sebesar Rp132.236.879.094,-. Jumlah ini merupakan lawan dari Kas pada BLU.

Rincian Dana Lancar BLU per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 65
Dana Lancar BLU Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	160.067.061.688	132.236.879.094
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	-	-
JUMLAH			160.067.061.688	132.236.879.094

C.2.23. Barang/Jasa Yang Harus Diterima

*Barang/Jasa Yang
Harus Diterima
Rp1.774.516.357*

Jumlah Barang/Jasa Yang Harus Diterima per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.774.516.357,- dan Rp3.666.667.259,-. Jumlah ini merupakan lawan dari Uang Muka Belanja. Rincian Barang/Jasa Yang Harus Diterima per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 66
Barang/Jasa Yang Harus Diterima Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	9.500.000
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	11.009.550	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	1.763.506.807	3.656.805.926
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	-	361.333
JUMLAH			1.774.516.357	3.666.667.259

C.2.24. Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan

*Barang/Jasa Yang
Harus Diserahkan
Rp(9.154.923.970)*

Jumlah Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp(9.154.923.970) dan Rp(2.962.989.081). Jumlah ini merupakan lawan dari Pendapatan Diterima di Muka. Rincian Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 67
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	(772.220.785)	(360.981.448)
2	02	Inspektorat Jenderal	(630.086)	(565.100)
3	03	Ditjen Bimas Islam	(990.000)	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	(8.381.083.099)	(2.601.442.533)
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang & Diklat	-	-
JUMLAH			(9.154.923.970)	(2.962.989.081)

C.2.25. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

*Diinvestasikan dalam
Aset Tetap
Rp29.285.034.031.095*

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp29.285.034.031.095,- dan Rp26.224.039.992.097,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Kementerian Agama dalam bentuk aset tetap. Jumlah ini merupakan lawan dari Aset Tetap. Rincian Diinvestasikan dalam Aset Tetap per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 68
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	5.158.685.457.020	5.012.351.261.685
2	02	Inspektorat Jenderal	121.328.451.684	105.237.919.474
3	03	Ditjen Bimas Islam	193.858.982.573	27.400.110.543
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	22.536.353.074.317	19.971.810.735.903
5	05	Ditjen Bimas Kristen	328.836.814.014	256.063.244.888
6	06	Ditjen Bimas Katolik	6.090.341.764	4.525.494.444
7	07	Ditjen Bimas Hindu	190.987.154.724	147.302.271.273
8	08	Ditjen Bimas Budha	35.874.617.550	29.097.500.865
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	86.340.972.259	63.444.175.069
10	11	Badan Litbang & Diklat	626.678.165.190	607.302.277.944
JUMLAH			29.285.034.031.095	26.224.534.992.088

C.2.26. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp106.574.423.829

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp106.574.423.829,- dan Rp2.681.985.476.072,- jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Kementerian Agama dalam bentuk aset lainnya. Jumlah ini merupakan akun lawan dari Aset Lainnya. Rincian Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel. 69
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Per Eselon I

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2011	2010
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	25.599.075.021	16.924.845.242
2	02	Inspektorat Jenderal	818.088.650	1.961.821.240
3	03	Ditjen Bimas Islam	2.006.042.103	935.114.603
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	52.401.566.929	26.710.683.443
5	05	Ditjen Bimas Kristen	1.062.207.837	278.739.195
6	06	Ditjen Bimas Katolik	957.061.755	848.389.151
7	07	Ditjen Bimas Hindu	468.524.336	354.147.203
8	08	Ditjen Bimas Budha	795.646.506	106.335.604
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	16.774.795.950	14.161.358.456
10	11	Badan Litbang & Diklat	5.691.414.742	2.466.983.347
11		BPIH dan DAU		2.617.237.058.588
JUMLAH			106.574.423.829	2.681.985.476.072



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN REALISASI

ANGGARAN PENDAPATAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN(TRANSAKSI KAS)
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

KD. LAPORAN : LRPK.B01
TANGGAL : 08/05/12
HAL : 1
PROG. ID : lui_pend01

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	I. IKHTISAR MENURUT MAP						
	Penerimaan Dalam Negeri						
42	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
423	PENDAPATAN PNBP LAINNYA						
4231	Pendapatan Penjualan dan Sewa						
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan						
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0.00
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	0	0	2,210,000	0	2,210,000	0.00
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	0	0	68,587,700	0	68,587,700	0.00
	Jumlah Penerimaan 42311	0	0	73,797,700	0	73,797,700	0.00
42312	Pendapatan Penjualan Aset						
423121	Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah	0	0	2,450,000	0	2,450,000	0.00
423122	Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor	0	15,302,616	91,954,116	0	91,954,116	0.00
423129	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan	0	438,066,070	1,287,580,880	0	1,287,580,880	0.00
	Jumlah Penerimaan 42312	0	453,368,686	1,381,984,996	0	1,381,984,996	0.00
42314	Pendapatan Sewa						
423141	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	7,314,532	28,318,498	607,318,937	0	607,318,937	8,302.90
423142	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	50,000,000	71,961,000	657,017,915	0	657,017,915	1,314.03
423143	Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak	0	0	5,600,000	0	5,600,000	0.00
423149	Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya	0	0	94,008,100	0	94,008,100	0.00
	Jumlah Penerimaan 42314	57,314,532	100,279,498	1,363,944,952	0	1,363,944,952	2,379.75
	Jumlah Penerimaan 4231	57,314,532	553,648,184	2,819,727,648	0	2,819,727,648	4,919.74
4232	Pendapatan Jasa						
42321	Pendapatan Jasa I						
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	0	756,044	1,959,044	0	1,959,044	0.00
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	0	0	3,384,700	0	3,384,700	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN(TRANSAKSI KAS)
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

**KD. LAPORAN : LRPK.B01
TANGGAL : 08/05/12
HAL : 2
PROG. ID : lui_pend01**

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	33,014,622,800	4,838,797,348	69,666,891,776	0	69,666,891,776	211.01
	Jumlah Penerimaan 42321	33,014,622,800	4,839,553,392	69,672,235,520	0	69,672,235,520	211.03
42322	Pendapatan Jasa II						
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	86,290,857	653,020,781	3,209,495	649,811,286	0.00
	Jumlah Penerimaan 42322	0	86,290,857	653,020,781	3,209,495	649,811,286	0.00
42324	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan						
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0	35,432	35,432	0	35,432	0.00
	Jumlah Penerimaan 42324	0	35,432	35,432	0	35,432	0.00
42329	Pendapatan Jasa Lainnya						
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,268,453	193,951,518	0	193,951,518	0.00
	Jumlah Penerimaan 42329	0	1,268,453	193,951,518	0	193,951,518	0.00
	Jumlah Penerimaan 4232	33,014,622,800	4,927,148,134	70,519,243,251	3,209,495	70,516,033,756	213.60
4233	Pendapatan Bunga						
42331	Pendapatan Bunga						
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi	250,000,000	0	0	0	0	0.00
423319	Pendapatan Bunga Lainnya	0	436,966	47,268,796	0	47,268,796	0.00
	Jumlah Penerimaan 42331	250,000,000	436,966	47,268,796	0	47,268,796	18.90
	Jumlah Penerimaan 4233	250,000,000	436,966	47,268,796	0	47,268,796	18.90
4234	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi						
42341	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi						
423414	Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya	0	0	2,769,856	0	2,769,856	0.00
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	0	0	11,880,000	0	11,880,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 42341	0	0	14,649,856	0	14,649,856	0.00
	Jumlah Penerimaan 4234	0	0	14,649,856	0	14,649,856	0.00
4235	Pendapatan Pendidikan						
42351	Pendapatan Pendidikan						

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN(TRANSAKSI KAS)
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

**KD. LAPORAN : LRPK.B01
TANGGAL : 08/05/12
HAL : 3
PROG. ID : lui_pend01**

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
423511	Pendapatan Uang Pendidikan	227,572,342,500	7,132,357,256	131,093,314,079	1,648,013,502	129,445,300,577	57.60
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan	7,117,750,000	244,340,000	7,826,344,500	6,750,000	7,819,594,500	109.95
423513	Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek	27,164,901,000	1,123,056,000	29,032,840,379	855,500,000	28,177,340,379	106.87
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	20,583,187,000	4,154,903,154	27,312,677,034	40,320,000	27,272,357,034	132.69
	Jumlah Penerimaan 42351	282,438,180,500	12,654,656,410	195,265,175,992	2,550,583,502	192,714,592,490	69.13
	Jumlah Penerimaan 4235	282,438,180,500	12,654,656,410	195,265,175,992	2,550,583,502	192,714,592,490	69.13
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi						
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi						
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan	0	11,040,000	11,040,000	0	11,040,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 42361	0	11,040,000	11,040,000	0	11,040,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 4236	0	11,040,000	11,040,000	0	11,040,000	0.00
4237	Pendapatan Iuran dan Denda						
42375	Pendapatan Denda I						
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	297,394,523	633,072,546	0	633,072,546	0.00
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB	0	0	103,720,530	0	103,720,530	0.00
	Jumlah Penerimaan 42375	0	297,394,523	736,793,076	0	736,793,076	0.00
	Jumlah Penerimaan 4237	0	297,394,523	736,793,076	0	736,793,076	0.00
4239	Pendapatan Lain-lain						
42391	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu						
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	717,821,593	11,745,384,976	13,134,200	11,732,250,776	0.00
423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	0	0	16,632,020	0	16,632,020	0.00
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	0	2,465,458,109	25,289,164,042	0	25,289,164,042	0.00
423914	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL	0	69,885,125	117,390,125	0	117,390,125	0.00
423915	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL	0	0	4,976,227	0	4,976,227	0.00
423916	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL	0	0	4,102,490	0	4,102,490	0.00
423919	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	0	134,450,558	2,017,363,958	0	2,017,363,958	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN(TRANSAKSI KAS)
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

**KD. LAPORAN : LRPK.B01
TANGGAL : 08/05/12
HAL : 4
PROG. ID : lui_pend01**

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Penerimaan 42391	0	3,387,615,385	39,195,013,838	13,134,200	39,181,879,638	0.00
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang						
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	0	0	51,944,189	0	51,944,189	0.00
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	0	13,761,499	1,303,600,708	0	1,303,600,708	0.00
	Jumlah Penerimaan 42392	0	13,761,499	1,355,544,897	0	1,355,544,897	0.00
42393	Pendapatan dari Penutupan Rekening						
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	0	279,787	0	279,787	0.00
	Jumlah Penerimaan 42393	0	0	279,787	0	279,787	0.00
42399	Pendapatan Lain-lain						
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	14,770,235	107,657,097	0	107,657,097	0.00
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	114,000,000	153,078,475	1,618,207,276	0	1,618,207,276	1,419.48
	Jumlah Penerimaan 42399	114,000,000	167,848,710	1,725,864,373	0	1,725,864,373	1,513.91
	Jumlah Penerimaan 4239	114,000,000	3,569,225,594	42,276,702,895	13,134,200	42,263,568,695	37,084.82
	Jumlah Penerimaan 423	315,874,117,832	22,013,549,811	311,690,601,514	2,566,927,197	309,123,674,317	98.67
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM						
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum						
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat						
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	257,046,481,000	27,630,636,216	419,920,694,810	0	419,920,694,810	163.36
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	19,864,747,000	1,407,768,697	14,391,731,283	0	14,391,731,283	72.44
	Jumlah Penerimaan 42411	276,911,228,000	29,038,404,913	434,312,426,093	0	434,312,426,093	156.84
	Jumlah Penerimaan 4241	276,911,228,000	29,038,404,913	434,312,426,093	0	434,312,426,093	156.84
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum						
42421	Pendapatan Hibah Terikat						
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda	0	0	574,963,523	0	574,963,523	0.00
	Jumlah Penerimaan 42421	0	0	574,963,523	0	574,963,523	0.00
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat						

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN(TRANSAKSI KAS)
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

KD. LAPORAN : LRPK.B01
TANGGAL : 08/05/12
HAL : 5
PROG. ID : lui_pend01

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan	1,475,000,000	0	0	0	0	0.00
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha	0	1,167,000,000	1,366,965,000	0	1,366,965,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 42422	1,475,000,000	1,167,000,000	1,366,965,000	0	1,366,965,000	92.67
	Jumlah Penerimaan 4242	1,475,000,000	1,167,000,000	1,941,928,523	0	1,941,928,523	131.65
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU						
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU						
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	70,000,000	0	29,450,000	0	29,450,000	42.07
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	3,952,080,000	7,861,132,681	27,961,639,413	0	27,961,639,413	707.51
	Jumlah Penerimaan 42431	4,022,080,000	7,861,132,681	27,991,089,413	0	27,991,089,413	695.93
	Jumlah Penerimaan 4243	4,022,080,000	7,861,132,681	27,991,089,413	0	27,991,089,413	695.93
4249	Pendapatan BLU Lainnya						
42491	Pendapatan BLU Lainnya						
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	10,896,874,000	1,690,669,152	5,237,394,929	0	5,237,394,929	48.06
	Jumlah Penerimaan 42491	10,896,874,000	1,690,669,152	5,237,394,929	0	5,237,394,929	48.06
	Jumlah Penerimaan 4249	10,896,874,000	1,690,669,152	5,237,394,929	0	5,237,394,929	48.06
	Jumlah Penerimaan 424	293,305,182,000	39,757,206,746	469,482,838,958	0	469,482,838,958	160.06
	Jumlah Penerimaan 42	609,179,299,832	61,770,756,557	781,173,440,472	2,566,927,197	778,606,513,275	128.23
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri	609,179,299,832	61,770,756,557	781,173,440,472	2,566,927,197	778,606,513,275	128.23
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	609,179,299,832	61,770,756,557	781,173,440,472	2,566,927,197	778,606,513,275	128.23
	II. IKHTISAR MENURUT ESELON						
01	SEKRETARIAT JENDERAL	175,027,932	964,447,219	23,060,843,533	0	23,060,843,533	13,175.52
02	INSPEKTORAT JENDERAL	0	69,920,035	169,375,411	0	169,375,411	0.00
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	32,817,972,800	4,541,721,037	65,967,397,944	500,000	65,966,897,944	201.01
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	564,648,354,900	54,799,190,864	672,359,379,572	2,566,427,197	669,792,952,375	119.07
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	3,829,551,800	991,587,651	7,759,293,102	0	7,759,293,102	202.61
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	0	199,505,401	382,377,189	0	382,377,189	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN(TRANSAKSI KAS)
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

KD. LAPORAN : LRPK.B01
TANGGAL : 08/05/12
HAL : 6
PROG. ID : lui_pend01

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	7,475,892,400	74,987,041	10,085,562,519	0	10,085,562,519	134.90
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	232,500,000	120,474,368	353,573,701	0	353,573,701	152.07
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	0	4,091,055	589,707,973	0	589,707,973	0.00
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	0	4,831,886	445,929,528	0	445,929,528	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	609,179,299,832	61,770,756,557	781,173,440,472	2,566,927,197	778,606,513,275	128.23
	III. IKHTISAR MENURUTPUSAT-WILAYAH						
0199	PUSAT	0	426,572,415	8,907,524,781	0	8,907,524,781	0.00
0100	PROP. DKI JAKARTA	117,923,219,000	6,856,214,892	121,037,560,184	0	121,037,560,184	102.64
0200	PROP. JAWA BARAT	51,263,217,000	4,215,269,502	57,446,226,545	500,000	57,445,726,545	112.06
0300	PROP. JAWA TENGAH	60,408,598,532	2,910,977,476	66,131,512,615	537,466,359	65,594,046,256	109.47
0400	PROP. D.I. YOGYAKARTA	48,881,678,000	7,001,970,161	57,746,755,736	0	57,746,755,736	118.13
0500	PROP. JAWA TIMUR	62,829,060,000	7,689,982,543	109,080,876,236	39,780,000	109,041,096,236	173.61
0600	PROP. D.I. ACEH	19,190,808,000	441,689,501	22,295,373,660	0	22,295,373,660	116.17
0700	PROP. SUMATERA UTARA	26,977,657,500	2,665,825,844	26,414,843,430	0	26,414,843,430	97.91
0800	PROP. SUMATERA BARAT	18,097,071,000	624,740,733	28,306,665,182	13,174,200	28,293,490,982	156.41
0900	PROP. RIAU	46,628,093,000	4,906,057,660	58,318,456,535	0	58,318,456,535	125.07
1000	PROP. JAMBI	729,420,000	595,011,013	17,740,262,591	0	17,740,262,591	2,432.10
1100	PROP. SUMATERA SELATAN	8,364,496,000	8,271,073,731	23,459,770,182	230,430,593	23,229,339,589	280.46
1200	PROP. LAMPUNG	18,978,797,000	2,218,458,747	21,946,160,530	0	21,946,160,530	115.63
1300	PROP. KALIMANTAN BARAT	5,155,071,000	1,103,651,039	8,222,262,865	0	8,222,262,865	159.49
1400	PROP. KALIMANTAN TENGAH	5,244,531,000	190,276,582	6,122,429,688	0	6,122,429,688	116.73
1500	PROP. KALIMANTAN SELATAN	7,199,529,000	461,918,176	9,228,543,099	0	9,228,543,099	128.18
1600	PROP. KALIMANTAN TIMUR	4,460,550,000	292,363,235	3,596,872,261	0	3,596,872,261	80.63
1700	PROP. SULAWESI UTARA	77,730,000	310,584,862	2,287,295,060	0	2,287,295,060	2,942.61
1800	PROP. SULAWESI TENGAH	247,608,000	952,219,740	3,415,735,745	0	3,415,735,745	1,379.49
1900	PROP. SULAWESI SELATAN	37,935,403,000	2,995,022,903	49,500,700,152	80,000,000	49,420,700,152	130.48

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN(TRANSAKSI KAS)
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

**KD. LAPORAN : LRPK.B01
TANGGAL : 08/05/12
HAL : 7
PROG. ID : lui_pend01**

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2000	PROP. SULAWESI TENGGARA	83,082,000	364,177,996	2,870,219,532	0	2,870,219,532	3,454.68
2100	PROP. MALUKU	6,315,330,000	1,629,437,407	10,450,010,875	0	10,450,010,875	165.47
2200	PROP. BALI	6,460,811,000	55,425,857	9,107,670,708	0	9,107,670,708	140.96
2300	PROP. NUSA TENGGARA BARAT	13,747,592,000	584,819,652	12,988,617,792	1,665,576,045	11,323,041,747	94.47
2400	PROP. NUSA TENGGARA TIMUR	38,200,000	52,891,470	715,453,617	0	715,453,617	1,872.91
2500	PROP. IRIAN JAYA	1,074,584,000	124,728,775	1,661,633,092	0	1,661,633,092	154.63
2600	PROP. BENGKULU	10,918,358,000	422,822,064	11,463,965,216	0	11,463,965,216	104.99
2800	PROP. MALUKU UTARA	5,913,830,000	427,485,570	3,015,423,429	0	3,015,423,429	50.98
2900	PROP. BANTEN	15,880,010,000	2,564,988,619	19,849,450,922	0	19,849,450,922	124.99
3000	PROP. BANGKA BELITUNG	2,461,887,000	48,647,466	2,932,297,329	0	2,932,297,329	119.10
3100	PROP. GORONTALO	5,381,218,000	67,867,885	2,328,562,229	0	2,328,562,229	43.27
3200	PROP. KEPULAUAN RIAU	48,696,000	36,782,089	597,519,999	0	597,519,999	1,227.04
3300	PAPUA BARAT	15,052,800	203,629,319	868,651,363	0	868,651,363	5,770.69
3400	PROP. SULAWESI BARAT	248,112,000	57,171,633	1,118,137,292	0	1,118,137,292	450.65
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	609,179,299,832	61,770,756,557	781,173,440,472	2,566,927,197	778,606,513,275	128.23



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN REALISASI

ANGGARAN BELANJA

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 3
Prog.Id : lu_irabi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	ANAK program tidak ada	0	0	0	0	(95,200,000)	(95,200,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 11 . 04	0	0	0	0	(95,200,000)	(95,200,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 11	0	0	0	0	(95,200,000)	(95,200,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 00	0	0	0	0	(8,865,961,003)	(8,865,961,003)	0.00	0
01	RUPIAH MURNI fungsi tidak ada sub fungsi tidak ada								
	program tidak ada	0	0	0	0	(147,741,180)	(147,741,180)	0.00	0
00	program tidak ada	0	0	0	0	(66,548,247)	(66,548,247)	0.00	0
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	0	0	0	0	(222,051,010)	(222,051,010)	0.00	0
03	program tidak ada	0	0	0	0	(4,900,000)	(4,900,000)	0.00	0
06	Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah	0	0	0	0	(2,200,000)	(2,200,000)	0.00	0
08	Program Bimbingan Masyarakat Islam	0	0	0	0	(400,000)	(400,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI .	0	0	0	0	(443,840,437)	(443,840,437)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA FUNGSI	0	0	0	0	(443,840,437)	(443,840,437)	0.00	0
01	PELAYANAN UMUM								
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI								
01	program tidak ada	0	0	0	0	(3,540,000)	(3,540,000)	0.00	0
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	37,289,385,000	36,088,385,000	2,158,556,650	35,698,857,625	(2,630,186,914)	33,068,670,711	98.92	389,527,375
07	Program Pendidikan Islam	0	0	34,860,000	34,860,000	0	34,860,000	0.00	(34,860,000)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 5
Prog.Id : lu_irabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	PERTAHANAN NEGARA								
23	program tidak ada	0	0	0	0	(355,000)	(355,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 02 . 01	0	0	0	0	(355,000)	(355,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 02	0	0	0	0	(355,000)	(355,000)	0.00	0
09	AGAMA								
01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA								
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	1,000,000,000	34,645,000,000	33,934,829,985	34,266,823,657	0	34,266,823,657	98.91	378,176,343
02	program tidak ada	0	0	0	0	(1,100,000)	(1,100,000)	0.00	0
06	Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah	214,293,920,000	217,548,384,000	124,745,038,643	182,684,245,362	(992,947,490)	181,691,297,872	83.97	34,864,138,638
08	Program Bimbingan Masyarakat Islam	355,943,408,000	348,415,317,000	108,602,665,304	339,324,454,727	(1,591,696,473)	337,732,758,254	97.39	9,090,862,273
09	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	64,155,512,000	68,794,316,000	16,995,313,250	65,898,007,271	(10,379,591)	65,887,627,680	95.79	2,896,308,729
10	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	49,134,973,000	51,287,676,000	9,498,821,690	49,670,722,838	(16,689,900)	49,654,032,938	96.85	1,616,953,162
11	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	38,339,762,000	38,936,759,000	3,070,681,768	36,450,247,711	(17,265,780)	36,432,981,931	93.61	2,486,511,289
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 09 . 01	722,867,575,000	759,627,452,000	296,847,350,640	708,294,501,566	(2,630,079,234)	705,664,422,332	93.24	51,332,950,434
02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA								
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	65,284,120,000	60,726,262,000	11,461,866,467	57,569,807,093	(112,641,450)	57,457,165,643	94.80	3,156,454,907
07	Program Pendidikan Islam	0	0	0	0	(26,810,000)	(26,810,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 09 . 02	65,284,120,000	60,726,262,000	11,461,866,467	57,569,807,093	(139,451,450)	57,430,355,643	94.80	3,156,454,907
03	LITBANG AGAMA								
04	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	78,104,516,000	71,736,439,000	16,401,264,145	61,800,821,582	(511,083,652)	61,289,737,930	86.15	9,935,617,418
07	Program Pendidikan Islam	0	0	0	0	(4,498,000)	(4,498,000)	0.00	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 6
Prog.Id : lu_irabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 09 . 03	78,104,516,000	71,736,439,000	16,401,264,145	61,800,821,582	(515,581,652)	61,285,239,930	86.15	9,935,617,418
90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA								
	program tidak ada	0	0	0	0	(8,500,000)	(8,500,000)	0.00	0
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	40,360,974,000	37,968,323,000	9,769,132,550	36,215,846,960	(433,489,868)	35,782,357,092	95.38	1,752,476,040
08	Program Bimbingan Masyarakat Islam	437,782,443,000	569,425,051,000	160,517,861,682	516,922,356,926	(1,068,059,583)	515,854,297,343	90.78	52,502,694,074
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 09 . 90	478,143,417,000	607,393,374,000	170,286,994,232	553,138,203,886	(1,510,049,451)	551,628,154,435	91.07	54,255,170,114
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 09	1,344,399,628,000	1,499,483,527,000	494,997,475,484	1,380,803,334,127	(4,795,161,787)	1,376,008,172,340	92.09	118,680,192,873
10	PENDIDIKAN								
02	PENDIDIKAN DASAR								
01	program tidak ada	0	0	12,000,000	24,000,000	0	24,000,000	0.00	(24,000,000)
07	Program Pendidikan Islam	3,790,230,047,000	5,208,367,267,000	2,677,366,198,710	4,654,250,072,423	(845,678,210)	4,653,404,394,213	89.36	554,117,194,577
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 02	3,790,230,047,000	5,208,367,267,000	2,677,378,198,710	4,654,274,072,423	(845,678,210)	4,653,428,394,213	89.36	554,093,194,577
03	PENDIDIKAN MENENGAH								
01	program tidak ada	0	0	0	39,330,000	0	39,330,000	0.00	(39,330,000)
07	Program Pendidikan Islam	562,982,867,000	1,132,513,081,000	590,433,248,588	1,047,698,226,628	(107,388,409)	1,047,590,838,219	92.51	84,814,854,372
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 03	562,982,867,000	1,132,513,081,000	590,433,248,588	1,047,737,556,628	(107,388,409)	1,047,630,168,219	92.51	84,775,524,372
06	PENDIDIKAN TINGGI								
07	Program Pendidikan Islam	1,027,442,632,000	1,624,929,422,000	783,613,984,570	1,470,358,849,834	(85,707,178)	1,470,273,142,656	90.49	154,570,572,166
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 06	1,027,442,632,000	1,624,929,422,000	783,613,984,570	1,470,358,849,834	(85,707,178)	1,470,273,142,656	90.49	154,570,572,166
07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN								
01	program tidak ada	0	0	12,275,000	14,605,000	0	14,605,000	0.00	(14,605,000)
07	Program Pendidikan Islam	3,677,345,500,000	3,661,754,409,000	391,558,557,221	3,493,735,324,616	(2,913,408,482)	3,490,821,916,134	95.41	168,019,084,384
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 07	3,677,345,500,000	3,661,754,409,000	391,570,832,221	3,493,749,929,616	(2,913,408,482)	3,490,836,521,134	95.41	168,004,479,384

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 7
Prog.Id : lu_irabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	PEMBINAAN KEAGAMAAN								
	program tidak ada	0	0	0	0	(3,904,300)	(3,904,300)	0.00	0
00	program tidak ada	0	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0.00	(2,200,000)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	3,742,300,000	3,357,539,000	511,670,000	3,203,759,300	(28,450,600)	3,175,308,700	95.42	153,779,700
04	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	390,892,779,000	369,140,497,000	56,556,107,799	328,669,219,115	(494,535,969)	328,174,683,146	89.04	40,471,277,885
07	Program Pendidikan Islam	1,690,841,584,000	1,814,009,994,000	629,052,951,888	1,643,222,588,184	(1,817,626,029)	1,641,404,962,155	90.59	170,787,405,816
09	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	511,857,081,000	528,889,193,000	142,495,793,669	478,369,971,594	(105,594,509)	478,264,377,085	90.45	50,519,221,406
10	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	314,037,957,000	317,976,344,000	68,609,538,305	279,326,511,728	(52,016,169)	279,274,495,559	87.85	38,649,832,272
11	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	158,731,427,000	176,543,411,000	41,566,208,075	165,917,282,543	(125,386,010)	165,791,896,533	93.98	10,626,128,457
12	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	98,688,372,000	97,199,606,000	16,309,161,225	88,473,709,897	(768,753,229)	87,704,956,668	91.02	8,725,896,103
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 08	3,168,791,500,000	3,307,116,584,000	955,103,630,961	2,987,185,242,361	(3,396,266,815)	2,983,788,975,546	90.33	319,931,341,639
90	PENDIDIKAN LAINNYA								
	program tidak ada	0	0	0	0	(7,403,200)	(7,403,200)	0.00	0
01	program tidak ada	0	0	290,455,594	12,272,539,794	(21,522,170)	12,251,017,624	0.00	(12,272,539,794)
07	Program Pendidikan Islam	13,654,743,871,000	13,928,754,126,000	3,020,020,962,437	13,766,524,029,075	(10,263,919,757)	13,756,260,109,318	98.84	162,230,096,925
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 90	13,654,743,871,000	13,928,754,126,000	3,020,311,418,031	13,778,796,568,869	(10,292,845,127)	13,768,503,723,742	98.92	149,957,557,131
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	25,881,536,417,000	28,863,434,889,000	8,418,411,313,081	27,432,102,219,731	(17,641,294,221)	27,414,460,925,510	95.04	1,431,332,669,269
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	30,677,468,084,000	33,815,509,972,000	9,414,308,372,172	32,261,294,846,831	(31,758,711,031)	32,229,536,135,800	95.40	1,554,215,125,169
02	PINJAMAN LUAR NEGERI								
10	PENDIDIKAN								
02	PENDIDIKAN DASAR								
07	Program Pendidikan Islam	194,699,337,000	108,546,660,000	23,952,547,180	69,726,941,808	0	69,726,941,808	64.24	38,819,718,192

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 8
Prog.Id : lu_irabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI			JUMLAH NETO S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 02	194,699,337,000	108,546,660,000	23,952,547,180	69,726,941,808	0	69,726,941,808	64.24	38,819,718,192
03	PENDIDIKAN MENENGAH								
07	Program Pendidikan Islam	20,551,000,000	30,417,892,000	12,509,868,734	16,755,188,493	0	16,755,188,493	55.08	13,662,703,507
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 03	20,551,000,000	30,417,892,000	12,509,868,734	16,755,188,493	0	16,755,188,493	55.08	13,662,703,507
06	PENDIDIKAN TINGGI								
07	Program Pendidikan Islam	541,449,663,000	567,757,579,000	70,958,569,190	164,096,026,240	0	164,096,026,240	28.90	403,661,552,760
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 06	541,449,663,000	567,757,579,000	70,958,569,190	164,096,026,240	0	164,096,026,240	28.90	403,661,552,760
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	756,700,000,000	706,722,131,000	107,420,985,104	250,578,156,541	0	250,578,156,541	35.46	456,143,974,459
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 02	756,700,000,000	706,722,131,000	107,420,985,104	250,578,156,541	0	250,578,156,541	35.46	456,143,974,459
03	RUPIAH MURNI PENDAMPI								
10	PENDIDIKAN								
02	PENDIDIKAN DASAR								
07	Program Pendidikan Islam	63,395,000,000	63,395,000,000	24,791,605,066	42,993,411,373	0	42,993,411,373	67.82	20,401,588,627
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 02	63,395,000,000	63,395,000,000	24,791,605,066	42,993,411,373	0	42,993,411,373	67.82	20,401,588,627
06	PENDIDIKAN TINGGI								
07	Program Pendidikan Islam	40,788,217,000	38,660,622,000	17,841,651,618	32,901,607,918	0	32,901,607,918	85.10	5,759,014,082
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 06	40,788,217,000	38,660,622,000	17,841,651,618	32,901,607,918	0	32,901,607,918	85.10	5,759,014,082
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	104,183,217,000	102,055,622,000	42,633,256,684	75,895,019,291	0	75,895,019,291	74.37	26,160,602,709
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 03	104,183,217,000	102,055,622,000	42,633,256,684	75,895,019,291	0	75,895,019,291	74.37	26,160,602,709
04	PNBP								
01	PELAYANAN UMUM								
03	PELAYANAN UMUM								
08	Program Bimbingan Masyarakat Islam	2,608,008,000	2,779,320,000	1,086,714,560	2,377,089,360	0	2,377,089,360	85.53	402,230,640
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03	2,608,008,000	2,779,320,000	1,086,714,560	2,377,089,360	0	2,377,089,360	85.53	402,230,640

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 9
Prog.Id : lu_irabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	2,608,008,000	2,779,320,000	1,086,714,560	2,377,089,360	0	2,377,089,360	85.53	402,230,640
09	AGAMA								
01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA								
08	Program Bimbingan Masyarakat Islam	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0.00	(5,000,000)
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 09 . 01	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0.00	(5,000,000)
90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA								
08	Program Bimbingan Masyarakat Islam	56,224,562,000	58,641,821,000	20,891,789,452	48,012,686,310	(595,000)	48,012,091,310	81.87	10,629,134,690
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 09 . 90	56,224,562,000	58,641,821,000	20,891,789,452	48,012,686,310	(595,000)	48,012,091,310	81.87	10,629,134,690
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 09	56,224,562,000	58,641,821,000	20,891,789,452	48,017,686,310	(595,000)	48,017,091,310	81.88	10,624,134,690
10	PENDIDIKAN								
02	PENDIDIKAN DASAR								
07	Program Pendidikan Islam	3,731,020,000	2,936,020,000	194,890,000	2,813,130,000	0	2,813,130,000	95.81	122,890,000
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 02	3,731,020,000	2,936,020,000	194,890,000	2,813,130,000	0	2,813,130,000	95.81	122,890,000
06	PENDIDIKAN TINGGI								
07	Program Pendidikan Islam	116,843,477,000	122,638,828,000	30,447,903,688	100,403,355,440	(39,656,250)	100,363,699,190	81.87	22,235,472,560
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 06	116,843,477,000	122,638,828,000	30,447,903,688	100,403,355,440	(39,656,250)	100,363,699,190	81.87	22,235,472,560
08	PEMBINAAN KEAGAMAAN								
09	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	6,059,345,000	6,706,463,000	2,298,952,052	5,915,381,952	(850,000)	5,914,531,952	88.20	791,081,048
11	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	4,786,502,000	10,459,729,000	4,748,181,014	10,064,358,444	0	10,064,358,444	96.22	395,370,556
12	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	230,175,000	230,175,000	19,770,000	205,755,000	0	205,755,000	89.39	24,420,000
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 08	11,076,022,000	17,396,367,000	7,066,903,066	16,185,495,396	(850,000)	16,184,645,396	93.04	1,210,871,604
90	PENDIDIKAN LAINNYA								
07	Program Pendidikan Islam	55,685,680,000	62,093,918,000	15,110,473,137	51,887,016,165	(7,040,300)	51,879,975,865	83.56	10,206,901,835
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 90	55,685,680,000	62,093,918,000	15,110,473,137	51,887,016,165	(7,040,300)	51,879,975,865	83.56	10,206,901,835

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 10
Prog.Id : lu_rabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	187,336,199,000	205,065,133,000	52,820,169,891	171,288,997,001	(47,546,550)	171,241,450,451	83.53	33,776,135,999
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04	246,168,769,000	266,486,274,000	74,798,673,903	221,683,772,671	(48,141,550)	221,635,631,121	83.19	44,802,501,329
05	PINJAMAN DALAM NEGERI								
01	PELAYANAN UMUM								
03	PELAYANAN UMUM								
08	Program Bimbingan Masyarakat Islam	171,312,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03	171,312,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	171,312,000	0	0	0	0	0	0.00	0
09	AGAMA								
90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA								
08	Program Bimbingan Masyarakat Islam	1,979,194,000	406,356,000	0	0	0	0	0.00	406,356,000
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 09 . 90	1,979,194,000	406,356,000	0	0	0	0	0.00	406,356,000
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 09	1,979,194,000	406,356,000	0	0	0	0	0.00	406,356,000
10	PENDIDIKAN								
06	PENDIDIKAN TINGGI								
07	Program Pendidikan Islam	0	0	0	0	(740,250)	(740,250)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 06	0	0	0	0	(740,250)	(740,250)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	0	0	0	0	(740,250)	(740,250)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 05	2,150,506,000	406,356,000	0	0	(740,250)	(740,250)	0.00	406,356,000
06	BADAN LAYANAN UMUM								
10	PENDIDIKAN								
02	PENDIDIKAN DASAR								
07	Program Pendidikan Islam	757,150,000	2,308,150,000	1,596,565,000	1,887,683,300	0	1,887,683,300	81.78	420,466,700
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 02	757,150,000	2,308,150,000	1,596,565,000	1,887,683,300	0	1,887,683,300	81.78	420,466,700

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 11
Prog.Id : lu_lrabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	PENDIDIKAN TINGGI								
07	Program Pendidikan Islam	337,669,336,000	437,209,870,000	172,228,405,114	394,526,847,690	0	394,526,847,690	90.24	42,683,022,310
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 06	337,669,336,000	437,209,870,000	172,228,405,114	394,526,847,690	0	394,526,847,690	90.24	42,683,022,310
90	PENDIDIKAN LAINNYA								
07	Program Pendidikan Islam	49,161,388,000	43,424,615,000	12,096,139,114	38,111,125,317	0	38,111,125,317	87.76	5,313,489,683
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 90	49,161,388,000	43,424,615,000	12,096,139,114	38,111,125,317	0	38,111,125,317	87.76	5,313,489,683
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	387,587,874,000	482,942,635,000	185,921,109,228	434,525,656,307	0	434,525,656,307	89.97	48,416,978,693
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 06	387,587,874,000	482,942,635,000	185,921,109,228	434,525,656,307	0	434,525,656,307	89.97	48,416,978,693
08	HIBAH DALAM NEGERI								
10	PENDIDIKAN								
03	PENDIDIKAN MENENGAH								
07	Program Pendidikan Islam	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 03	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 08	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	100.00	0
09	HIBAH LUAR NEGERI								
10	PENDIDIKAN								
02	PENDIDIKAN DASAR								
07	Program Pendidikan Islam	0	96,900,000,000	0	0	0	0	0.00	96,900,000,000
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 02	0	96,900,000,000	0	0	0	0	0.00	96,900,000,000
06	PENDIDIKAN TINGGI								
07	Program Pendidikan Islam	0	29,760,000,000	0	0	0	0	0.00	29,760,000,000
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 06	0	29,760,000,000	0	0	0	0	0.00	29,760,000,000
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	0	126,660,000,000	0	0	0	0	0.00	126,660,000,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 12
Prog.Id : lu_irabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 09	0	126,660,000,000	0	0	0	0	0.00	126,660,000,000
10	HIBAH LANGSUNG DALAM								
01	PELAYANAN UMUM								
03	PELAYANAN UMUM								
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	0	69,600,000	69,600,000	69,600,000	0	69,600,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03	0	69,600,000	69,600,000	69,600,000	0	69,600,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	0	69,600,000	69,600,000	69,600,000	0	69,600,000	100.00	0
09	AGAMA								
02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA								
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	0	725,400,000	706,960,800	706,960,800	0	706,960,800	97.46	18,439,200
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 09 . 02	0	725,400,000	706,960,800	706,960,800	0	706,960,800	97.46	18,439,200
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 09	0	725,400,000	706,960,800	706,960,800	0	706,960,800	97.46	18,439,200
10	PENDIDIKAN								
06	PENDIDIKAN TINGGI								
07	Program Pendidikan Islam	0	2,859,425,000	2,308,094,000	2,308,094,000	0	2,308,094,000	80.72	551,331,000
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 06	0	2,859,425,000	2,308,094,000	2,308,094,000	0	2,308,094,000	80.72	551,331,000
08	PEMBINAAN KEAGAMAAN								
07	Program Pendidikan Islam	0	705,000,000	705,000,000	705,000,000	0	705,000,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 08	0	705,000,000	705,000,000	705,000,000	0	705,000,000	100.00	0
90	PENDIDIKAN LAINNYA								
07	Program Pendidikan Islam	0	140,575,000	137,825,000	137,825,000	0	137,825,000	98.04	2,750,000
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 90	0	140,575,000	137,825,000	137,825,000	0	137,825,000	98.04	2,750,000
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	0	3,705,000,000	3,150,919,000	3,150,919,000	0	3,150,919,000	85.05	554,081,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 13
Prog.Id : lu_irabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 10	0	4,500,000,000	3,927,479,800	3,927,479,800	0	3,927,479,800	87.28	572,520,200
	JUMLAH BELANJA	32,174,258,450,000	35,506,282,990,000	9,830,009,876,891	33,248,990,855,694	(40,673,554,974)	33,208,317,300,720	93.64	2,257,292,134,306
	II. IKHTISAR MENURUT ESELON I								
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1,501,696,573,000	1,489,249,623,000	249,999,696,865	1,403,087,253,614	(5,116,538,892)	1,397,970,714,722	94.21	86,162,369,386
02	INSPEKTORAT JENDERAL	108,921,257,000	103,247,630,000	20,180,606,883	101,234,706,992	(2,630,186,914)	98,604,520,078	98.05	2,012,923,008
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	2,018,535,353,000	2,165,834,539,000	426,047,110,544	2,285,323,588,481	(3,506,998,109)	2,281,816,590,372	105.52	(119,489,049,481)
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	25,828,317,769,000	28,981,082,453,000	8,478,277,230,849	27,005,940,274,169	(25,415,649,035)	26,980,524,625,134	93.18	1,975,142,178,831
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	810,793,986,000	840,807,936,000	207,490,219,420	750,936,759,323	(187,850,876)	750,748,908,447	89.31	89,871,176,677
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK	462,082,701,000	472,742,146,000	95,117,556,682	413,059,696,171	(91,137,102)	412,968,559,069	87.38	59,682,449,829
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	370,780,498,000	406,669,006,000	103,526,957,430	380,151,467,419	(211,398,825)	379,940,068,594	93.48	26,517,538,581
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	146,447,033,000	145,620,117,000	22,665,977,050	126,155,569,915	(1,265,605,284)	124,889,964,631	86.63	19,464,547,085
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	363,370,419,000	366,748,103,000	139,823,339,313	306,823,710,916	(1,079,266,272)	305,744,444,644	83.66	59,924,392,084
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	563,312,861,000	534,281,437,000	86,881,181,855	476,277,828,694	(1,168,923,665)	475,108,905,029	89.14	58,003,608,306
	JUMLAH BELANJA	32,174,258,450,000	35,506,282,990,000	9,830,009,876,891	33,248,990,855,694	(40,673,554,974)	33,208,317,300,720	93.64	2,257,292,134,306
	III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH								
0199	INSTANSI PUSAT	3,285,840,674,000	4,487,599,680,000	1,903,362,975,020	4,001,755,703,518	(21,279,308,504)	3,980,476,395,014	89.17	485,843,976,482
0100	Prop. DKI Jakarta	1,361,305,058,000	1,425,785,186,000	378,343,727,964	1,261,950,568,803	(1,057,585,888)	1,260,892,982,915	88.51	163,834,617,197
0200	Prop. Jawa Barat	3,908,306,014,000	3,922,763,136,000	633,845,956,226	3,645,321,463,756	(1,009,797,224)	3,644,311,666,532	92.93	277,441,672,244
0300	Prop. Jawa Tengah	3,334,638,610,000	3,434,772,644,000	822,411,796,013	3,428,241,348,881	(4,680,440,836)	3,423,560,908,045	99.81	6,531,295,119
0400	Prop. D.I. Yogyakarta	665,582,547,000	721,639,688,000	199,413,300,902	687,325,034,489	(330,830,187)	686,994,204,302	95.24	34,314,653,511

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 14
Prog.Id : lu_irabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0500	Prop. Jawa Timur	4,426,774,890,000	5,129,172,025,000	1,630,496,611,403	4,723,281,018,753	(3,459,077,580)	4,719,821,941,173	92.09	405,891,006,247
0600	Prop. D.I. Aceh	1,523,167,093,000	1,617,162,786,000	423,883,872,159	1,517,181,643,031	(659,345,805)	1,516,522,297,226	93.82	99,981,142,969
0700	Prop. Sumatera Utara	1,364,530,206,000	1,519,588,635,000	453,299,200,994	1,403,575,013,687	(776,096,366)	1,402,798,917,321	92.37	116,013,621,313
0800	Prop. Sumatera Barat	939,455,500,000	975,392,282,000	231,870,470,384	939,755,833,905	(865,022,304)	938,890,811,601	96.35	35,636,448,095
0900	Prop. Riau	639,265,071,000	697,196,306,000	253,156,351,744	662,128,888,459	(303,330,134)	661,825,558,325	94.97	35,067,417,541
1000	Prop. Jambi	582,292,552,000	622,618,285,000	176,655,444,525	601,089,960,752	(417,735,019)	600,672,225,733	96.54	21,528,324,248
1100	Prop. Sumatera Selatan	629,450,013,000	684,008,456,000	175,277,690,816	686,045,770,214	(401,266,496)	685,644,503,718	100.30	(2,037,314,214)
1200	Prop. Lampung	806,927,937,000	889,861,210,000	225,212,063,858	789,170,526,503	(580,458,986)	788,590,067,517	88.68	100,690,683,497
1300	Prop. Kalimantan Barat	435,642,562,000	463,428,423,000	114,751,786,053	454,963,083,647	(131,550,853)	454,831,532,794	98.17	8,465,339,353
1400	Prop. Kalimantan Tengah	416,942,204,000	430,551,066,000	86,877,321,339	407,053,214,234	(495,963,938)	406,557,250,296	94.54	23,497,851,766
1500	Prop. Kalimantan Selatan	737,204,076,000	840,964,907,000	220,071,243,387	825,744,274,256	(299,622,393)	825,444,651,863	98.19	15,220,632,744
1600	Prop. Kalimantan Timur	365,875,316,000	401,620,992,000	106,933,009,766	367,124,044,801	(375,052,019)	366,748,992,782	91.41	34,496,947,199
1700	prop. Sulawesi Utara	281,005,957,000	301,105,835,000	80,637,743,019	287,468,167,737	(142,930,053)	287,325,237,684	95.47	13,637,667,263
1800	Prop. Sulawesi Tengah	394,371,825,000	398,717,119,000	76,602,502,346	380,921,102,523	(192,072,858)	380,729,029,665	95.54	17,796,016,477
1900	Prop. Sulawesi Selatan	1,185,971,210,000	1,280,453,472,000	311,369,952,492	1,227,814,812,474	(691,653,473)	1,227,123,159,001	95.89	52,638,659,526
2000	Prop. Sulawesi Tenggara	342,583,165,000	372,137,554,000	95,040,920,711	368,962,689,017	(206,401,763)	368,756,287,254	99.15	3,174,864,983
2100	Prop. Maluku	379,721,725,000	406,420,306,000	100,486,069,560	391,593,985,291	(43,539,085)	391,550,446,206	96.35	14,826,320,709
2200	Prop. Bali	355,920,447,000	410,680,082,000	113,188,592,017	400,480,455,268	(158,194,559)	400,322,260,709	97.52	10,199,626,732
2300	Prop. Nusa Tenggara Barat	750,060,053,000	770,750,910,000	204,348,339,212	747,356,894,014	(162,245,283)	747,194,648,731	96.96	23,394,015,986
2400	Prop. Nusa Tenggara Timur	400,419,711,000	428,159,825,000	95,948,932,730	367,361,844,133	(121,099,438)	367,240,744,695	85.80	60,797,980,867
2500	Prop. Irian Jaya	218,702,012,000	246,111,699,000	58,459,829,302	233,002,248,180	(169,036,327)	232,833,211,853	94.67	13,109,450,820
2600	Prop. Bengkulu	352,372,252,000	367,150,903,000	71,756,165,839	326,052,263,259	(230,663,572)	325,821,599,687	88.81	41,098,639,741
2800	Prop. Maluku Utara	217,429,216,000	237,844,324,000	44,734,954,616	234,893,760,895	(102,566,466)	234,791,194,429	98.76	2,950,563,105

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 15
Prog.Id : lu_lrabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2900	Prop. Banten	983,492,625,000	1,041,024,231,000	255,586,070,934	965,825,376,095	(732,135,465)	965,093,240,630	92.78	75,198,854,905
3000	Prop. Bangka Belitung	172,552,736,000	184,713,529,000	50,973,521,061	162,252,309,285	(106,890,510)	162,145,418,775	87.84	22,461,219,715
3100	Prop. Gorontalo	228,792,879,000	243,860,307,000	60,961,641,142	236,199,639,073	(75,945,757)	236,123,693,316	96.86	7,660,667,927
3200	Prop. Kepulauan Riau	152,653,267,000	157,045,102,000	38,154,152,534	138,545,763,219	(44,501,495)	138,501,261,724	88.22	18,499,338,781
3300	PAPUA BARAT	156,105,366,000	163,351,593,000	44,220,425,199	154,204,828,190	(191,228,535)	154,013,599,655	94.40	9,146,764,810
3400	PROP. SULAWESI BARAT	168,503,947,000	188,585,758,000	57,742,411,639	190,080,501,695	(179,965,803)	189,900,535,892	100.79	(1,494,743,695)
5000	wilayah ini tidak ada	1,000,000,000	34,645,000,000	33,934,829,985	34,266,823,657	0	34,266,823,657	98.91	378,176,343
5900	Timur Tengah	9,399,734,000	9,399,734,000	0	0	0	0	0.00	9,399,734,000
	JUMLAH BELANJA	32,174,258,450,000	35,506,282,990,000	9,830,009,876,891	33,248,990,855,694	(40,673,554,974)	33,208,317,300,720	93.64	2,257,292,134,306
IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK									
51	BELANJA PEGAWAI								
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,741,616,143,000	5,762,398,654,443	533,595,520,070	6,890,460,302,315	(834,360,686)	6,889,625,941,629	119.58	(1,128,061,647,872)
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	207,958,000	210,178,915	11,133,618	271,468,045	(101,558,643)	169,909,402	129.16	(61,289,130)
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	444,281,537,600	444,139,585,862	39,339,846,613	505,380,414,862	(130,831,683)	505,249,583,179	113.79	(61,240,829,000)
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	144,267,649,920	144,443,923,620	12,615,354,276	161,471,813,065	(33,806,536)	161,438,006,529	111.79	(17,027,889,445)
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	104,129,307,000	104,481,002,000	7,643,964,004	98,436,597,912	(219,692,132)	98,216,905,780	94.21	6,044,404,088
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	743,451,004,000	743,823,127,000	64,455,809,000	815,152,626,720	(676,111,592)	814,476,515,128	109.59	(71,329,499,720)
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	195,969,877,504	195,725,022,504	14,762,667,547	211,489,103,200	(2,085,300)	211,487,017,900	108.05	(15,764,080,696)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	323,173,756,000	325,222,164,480	39,211,009,875	513,537,947,640	(127,613,297)	513,410,334,343	157.90	(188,315,783,160)
511128	Belanja Tunj. Lauk pauk PNS	105,600,000	105,600,000	0	0	0	0	0.00	105,600,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,292,684,779,000	1,304,055,663,000	230,982,810,978	1,094,590,493,060	(689,253,122)	1,093,901,239,938	83.94	209,465,169,940

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 16
Prog.Id : lu_irabi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
511131	Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS	0	0	0	10,105,000	(8,400)	10,096,600	0.00	(10,105,000)
511133	Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS	162,000,000	162,000,000	0	0	0	0	0.00	162,000,000
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	2,997,599,000	2,998,520,000	229,850,000	2,747,435,000	(650,000)	2,746,785,000	91.63	251,085,000
511136	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi	3,948,000,000	3,948,000,000	185,960,900	2,153,549,300	0	2,153,549,300	54.55	1,794,450,700
511137	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana P	355,600,000	355,600,000	10,900,000	83,800,000	0	83,800,000	23.57	271,800,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	14,472,735,000	14,474,855,000	1,171,915,000	14,577,935,000	(6,610,000)	14,571,325,000	100.71	(103,080,000)
511139	Belanja Tunjangan SAR PNS	0	0	0	8,750,000	0	8,750,000	0.00	(8,750,000)
511147	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	667,867,500	1,923,385,000	437,121,000	6,549,913,593	(334,848)	6,549,578,745	340.54	(4,626,528,593)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	511,810,748,476	511,452,663,176	10,024,112,665	143,390,923,472	(5,424,412,286)	137,966,511,186	28.04	368,061,739,704
511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru	4,777,293,434,000	5,266,805,710,000	2,116,718,144,261	4,595,785,309,317	(911,015,672)	4,594,874,293,645	87.26	671,020,400,683
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	258,217,308,000	266,437,114,000	39,736,770,784	230,127,034,724	(17,663,360)	230,109,371,364	86.37	36,310,079,276
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	35,046,225,000	37,668,933,000	6,516,467,300	33,897,852,200	(6,475,000)	33,891,377,200	89.99	3,771,080,800
511155	Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	302,685,245,000	307,411,443,000	80,536,390,400	203,735,126,722	(1,755,342,800)	201,979,783,922	66.27	103,676,316,278
511192	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS TNI/POLRI	0	0	0	7,654,500	0	7,654,500	0.00	(7,654,500)
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	14,897,544,374,000	15,438,243,145,000	3,198,185,748,291	15,523,866,155,647	(10,937,825,357)	15,512,928,330,290	100.55	(85,623,010,647)
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri								
511211	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	5,472,000	5,472,000	0	0	0	0	0.00	5,472,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112	5,472,000	5,472,000	0	0	0	0	0.00	5,472,000
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS								
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	0	0	0	(5,578,952)	(5,578,952)	0.00	0
511519	Belanja Tunjangan Lainnya	0	0	0	0	(741,051)	(741,051)	0.00	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 17
Prog.Id : lu_rabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI			JUMLAH NETO S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	0	0	0	0	(6,320,003)	(6,320,003)	0.00	0
5121	Belanja Honorarium								
512111	Belanja Uang Honor Tetap	188,797,979,000	185,800,771,000	35,545,589,810	135,372,181,719	(88,915,400)	135,283,266,319	72.86	50,428,589,281
512112	Belanja Uang Honor Tidak Tetap	1,245,364,000	395,164,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0.63	392,664,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	190,043,343,000	186,195,935,000	35,545,589,810	135,374,681,719	(88,915,400)	135,285,766,319	72.71	50,821,253,281
5122	Belanja Lembur								
512211	Belanja uang lembur	53,947,190,000	54,760,693,000	11,461,105,000	38,974,960,918	(13,139,700)	38,961,821,218	71.17	15,785,732,082
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	53,947,190,000	54,760,693,000	11,461,105,000	38,974,960,918	(13,139,700)	38,961,821,218	71.17	15,785,732,082
5123	Belanja Vakasi								
512311	Belanja Vakasi	172,253,153,000	172,686,701,000	30,358,624,363	152,336,630,311	(62,933,850)	152,273,696,461	88.22	20,350,070,689
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5123	172,253,153,000	172,686,701,000	30,358,624,363	152,336,630,311	(62,933,850)	152,273,696,461	88.22	20,350,070,689
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito								
512411	Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan)	10,178,577,000	9,400,977,000	2,725,525,700	6,223,493,500	0	6,223,493,500	66.20	3,177,483,500
512412	Belanja Pegawai Transito	250,326,821,000	59,402,428,000	0	0	0	0	0.00	59,402,428,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	260,505,398,000	68,803,405,000	2,725,525,700	6,223,493,500	0	6,223,493,500	9.05	62,579,911,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	15,574,298,930,000	15,920,695,351,000	3,278,276,593,164	15,856,775,922,095	(11,109,134,310)	15,845,666,787,785	99.60	63,919,428,905
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	268,028,221,600	263,734,715,260	44,513,975,343	250,669,339,343	(78,667,195)	250,590,672,148	95.05	13,065,375,917
521112	Belanja pengadaan bahan makanan	7,920,869,000	7,119,246,000	645,623,425	6,762,851,720	0	6,762,851,720	94.99	356,394,280
521113	Belanja penambahan daya tahan tubuh	142,640,000	172,176,000	13,532,300	168,571,400	0	168,571,400	97.91	3,604,600
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	4,088,304,000	4,502,185,930	1,019,979,552	2,672,279,185	(50,000)	2,672,229,185	59.36	1,829,906,745
521115	Honor Terkait Operasional Satuan Kerja	121,100,108,000	119,767,198,500	30,573,818,534	114,114,901,896	(68,121,270)	114,046,780,626	95.28	5,652,296,604
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	468,157,269,400	442,475,555,406	78,855,244,566	407,045,538,735	(395,782,251)	406,649,756,484	91.99	35,430,016,671

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 18
Prog.Id : lu_irabi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	869,437,412,000	837,771,077,096	155,622,173,720	781,433,482,279	(542,620,716)	780,890,861,563	93.28	56,337,594,817
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	549,165,686,500	528,441,441,800	98,355,724,798	472,856,822,495	(146,858,938)	472,709,963,557	89.48	55,584,619,305
521213	Honor Terkait Output Kegiatan	457,740,839,500	488,891,818,500	133,150,932,028	441,392,333,777	(592,756,020)	440,799,577,757	90.28	47,499,484,723
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,659,865,495,000	2,153,069,575,600	1,178,231,828,860	1,913,415,302,368	(378,724,287)	1,913,036,578,081	88.87	239,654,273,232
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,666,772,021,000	3,170,402,835,900	1,409,738,485,686	2,827,664,458,640	(1,118,339,245)	2,826,546,119,395	89.19	342,738,377,260
5221	Belanja Jasa								
522111	Belanja Langganan daya dan jasa	124,726,694,000	122,391,325,904	13,448,028,251	86,891,063,050	(43,428,985)	86,847,634,065	70.99	35,500,262,854
522112	Belanja Jasa pos dan giro	1,303,132,000	1,204,401,000	302,652,606	647,987,362	(1,804,600)	646,182,762	53.80	556,413,638
522113	Belanja Jasa Konsultan	42,248,656,000	40,354,587,000	10,107,072,565	17,618,828,610	0	17,618,828,610	43.66	22,735,758,390
522114	Belanja Sewa	35,487,448,000	30,156,493,000	6,518,149,190	23,913,175,335	(16,962,000)	23,896,213,335	79.30	6,243,317,665
522115	Belanja Jasa Profesi	184,992,126,000	188,474,358,000	37,787,736,564	168,533,950,466	(724,125,050)	167,809,825,416	89.42	19,940,407,534
522119	Belanja Jasa Lainnya	30,623,418,000	26,506,196,000	7,479,467,432	22,109,834,244	(1,600,000)	22,108,234,244	83.41	4,396,361,756
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	419,381,474,000	409,087,360,904	75,643,106,608	319,714,839,067	(787,920,635)	318,926,918,432	78.15	89,372,521,837
5231	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	196,465,781,450	176,134,252,450	22,317,840,447	169,377,439,403	(31,463,930)	169,345,975,473	96.16	6,756,813,047
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,234,639,000	4,750,134,000	1,683,764,705	4,541,963,585	0	4,541,963,585	95.62	208,170,415
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92,652,414,550	93,038,024,800	17,745,947,222	85,695,567,433	(7,452,084)	85,688,115,349	92.11	7,342,457,367
523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,295,290,000	2,650,192,000	428,626,484	1,907,136,466	(3,400,000)	1,903,736,466	71.96	743,055,534
523131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	47,015,000	0	0	0	0	0.00	47,015,000
523132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	100.00	0
523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	3,147,774,000	2,675,017,000	1,080,266,150	2,343,553,650	0	2,343,553,650	87.61	331,463,350
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	453,366,000	426,766,000	106,640,000	380,225,000	0	380,225,000	89.09	46,541,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 19
Prog.Id : lu_irabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	299,254,865,000	279,727,001,250	43,363,085,008	264,251,485,537	(42,316,014)	264,209,169,523	94.47	15,475,515,713
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja perjalanan biasa	245,837,822,000	237,591,748,250	32,629,868,815	214,067,279,919	(3,045,776,552)	211,021,503,367	90.10	23,524,468,331
524112	Belanja perjalanan tetap	11,901,820,000	10,618,985,000	3,084,936,469	9,315,935,415	(1,100,000)	9,314,835,415	87.73	1,303,049,585
524119	Belanja perjalanan lainnya	792,405,994,000	771,200,473,680	101,491,580,962	689,507,475,180	(17,224,595,315)	672,282,879,865	89.41	81,692,998,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,050,145,636,000	1,019,411,206,930	137,206,386,246	912,890,690,514	(20,271,471,867)	892,619,218,647	89.55	106,520,516,416
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri								
524211	Belanja perjalanan biasa - Luar Negeri	6,690,525,000	3,100,109,600	421,543,571	1,375,012,869	(231,068,112)	1,143,944,757	44.35	1,725,096,731
524212	Belanja perjalanan tetap - Luar Negeri	0	820,000,000	815,999,990	815,999,990	0	815,999,990	99.51	4,000,010
524219	Belanja perjalanan lainnya - Luar Negeri	110,609,429,000	109,415,608,000	90,413,966,959	103,181,477,892	(650,544,020)	102,530,933,872	94.30	6,234,130,108
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	117,299,954,000	113,335,717,600	91,651,510,520	105,372,490,751	(881,612,132)	104,490,878,619	92.97	7,963,226,849
5251	Belanja Barang BLU								
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	142,358,846,000	147,913,489,000	54,595,780,286	141,213,324,063	0	141,213,324,063	95.47	6,700,164,937
525112	Belanja Barang	67,885,377,000	70,952,488,000	28,184,416,354	64,857,179,132	0	64,857,179,132	91.41	6,095,308,868
525113	Belanja Jasa	14,017,786,000	17,450,656,000	6,367,310,207	14,607,077,320	0	14,607,077,320	83.71	2,843,578,680
525114	Belanja Pemeliharaan	14,366,649,000	13,524,320,000	5,729,480,863	11,093,206,750	0	11,093,206,750	82.02	2,431,113,250
525115	Belanja Perjalanan	28,646,937,000	35,142,147,000	14,215,107,577	30,402,141,016	0	30,402,141,016	86.51	4,740,005,984
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	99,683,192,000	152,718,937,000	57,295,867,049	135,332,007,046	0	135,332,007,046	88.62	17,386,929,954
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	366,958,787,000	437,702,037,000	166,387,962,336	397,504,935,327	0	397,504,935,327	90.82	40,197,101,673
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,789,250,149,000	6,267,437,236,680	2,079,612,710,124	5,608,832,382,115	(23,644,280,609)	5,585,188,101,506	89.49	658,604,854,565
53	BELANJA MODAL								
5311	Belanja Modal Tanah								
531111	Belanja Modal Tanah	94,091,334,000	110,391,651,000	42,161,132,775	98,551,360,991	(78,550,000)	98,472,810,991	89.27	11,840,290,009

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 20
Prog.Id : lu_irabi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	964,750,000	970,750,000	21,720,000	946,560,000	0	946,560,000	97.51	24,190,000
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	264,011,000	275,342,000	87,414,700	128,864,700	0	128,864,700	46.80	146,477,300
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	2,313,675,000	2,215,139,000	912,909,780	1,027,355,160	0	1,027,355,160	46.38	1,187,783,840
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	5,150,720,000	15,528,005,400	8,252,672,210	13,692,358,675	(1,995,000)	13,690,363,675	88.18	1,835,646,725
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	50,900,000	103,020,000	11,150,000	96,537,240	0	96,537,240	93.71	6,482,760
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	6,000,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	40.00	3,600,000
531121	Belanja Penambahan Nilai Tanah	280,000,000	2,504,551,000	902,681,450	2,172,293,000	0	2,172,293,000	86.73	332,258,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	103,115,390,000	131,994,458,400	52,352,080,915	116,617,729,766	(80,545,000)	116,537,184,766	88.35	15,376,728,634
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	533,027,841,000	864,880,450,000	362,781,989,880	706,102,242,711	(186,026,432)	705,916,216,279	81.64	158,778,207,289
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	554,470,000	587,778,000	152,432,250	310,835,750	0	310,835,750	52.88	276,942,250
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	74,680,000	529,628,000	431,309,195	435,229,195	0	435,229,195	82.18	94,398,805
532114	Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	55,000,000	55,000,000	0	54,500,000	0	54,500,000	99.09	500,000
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	568,380,000	0	402,598,500	0	402,598,500	70.83	165,781,500
532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	395,945,000	106,000,000	22,000,000	94,018,250	0	94,018,250	88.70	11,981,750
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	166,070,000	29,820,000	0	0	0	0	0.00	29,820,000
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	20,042,961,000	1,169,787,000	580,459,280	928,358,280	0	928,358,280	79.36	241,428,720
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	554,316,967,000	867,926,843,000	363,968,190,605	708,327,782,686	(186,026,432)	708,141,756,254	81.61	159,599,060,314
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,434,782,740,000	1,900,211,622,900	673,656,153,185	1,410,781,442,411	(39,066,289)	1,410,742,376,122	74.24	489,430,180,489
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	51,577,000	3,877,173,000	1,024,712,700	3,893,548,100	0	3,893,548,100	100.42	(16,375,100)
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	802,272,000	2,508,826,000	1,709,395,800	1,868,885,800	0	1,868,885,800	74.49	639,940,200

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 21
Prog.Id : lu_irabi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan	150,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	3,043,039,000	15,910,031,000	11,188,511,112	14,425,287,770	0	14,425,287,770	90.67	1,484,743,230
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0.00	5,000,000
533117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	300,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	205,850,000	33,400,000	114,360,000	0	114,360,000	55.56	91,490,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	336,895,039,000	563,900,249,700	266,460,220,399	548,873,286,671	(15,190,306)	548,858,096,365	97.34	15,026,963,029
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,776,029,667,000	2,486,618,752,600	954,072,393,196	1,979,956,810,752	(54,256,595)	1,979,902,554,157	79.62	506,661,941,848
5333	sub kelompok belanja tidak ada								
533311	jenis belanja tidak ada	0	80,000,000	0	0	0	0	0.00	80,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5333	0	80,000,000	0	0	0	0	0.00	80,000,000
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan								
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	22,095,464,000	36,422,132,000	22,725,130,287	33,566,460,914	0	33,566,460,914	92.16	2,855,671,086
534112	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan	6,500,000	38,372,000	21,365,000	27,865,000	0	27,865,000	72.62	10,507,000
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan	3,150,000	39,500,000	49,325,000	52,475,000	0	52,475,000	132.85	(12,975,000)
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	145,529,000	115,105,000	155,305,000	0	155,305,000	106.72	(9,776,000)
534121	Belanja Modal Irigasi	277,304,000	277,304,000	64,004,763	270,144,625	0	270,144,625	97.42	7,159,375
534131	Belanja Modal Jaringan	10,099,455,000	20,401,663,000	4,012,988,340	12,275,799,490	0	12,275,799,490	60.17	8,125,863,510
534132	Belanja Modal Bahan Baku Jaringan	50,000,000	61,240,000	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000	84.91	9,240,000
534133	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	228,447,000	17,560,000	17,560,000	0	17,560,000	7.69	210,887,000
534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	0	578,100,000	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	7.78	533,100,000
534136	Belanja Modal Perijinan Jaringan	17,400,000	17,400,000	14,800,000	14,800,000	0	14,800,000	85.06	2,600,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 23
Prog.Id : lu_irabi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
572211	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	123,973,855,000	150,556,105,000	16,709,754,000	146,691,013,500	(30,000)	146,690,983,500	97.43	3,865,091,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5722	123,973,855,000	150,556,105,000	16,709,754,000	146,691,013,500	(30,000)	146,690,983,500	97.43	3,865,091,500
5731	Belanja Lembaga Sosial Lainnya								
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	211,526,276,000	225,352,461,000	55,912,151,930	219,353,707,680	(187,178,279)	219,166,529,401	97.34	5,998,753,320
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5731	211,526,276,000	225,352,461,000	55,912,151,930	219,353,707,680	(187,178,279)	219,166,529,401	97.34	5,998,753,320
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57	8,230,711,569,000	9,559,813,622,000	2,961,799,257,809	8,737,090,707,479	(5,597,312,028)	8,731,493,395,451	91.39	822,722,914,521
	JUMLAH BELANJA	32,174,258,450,000	35,506,282,990,000	9,830,009,876,891	33,248,990,855,694	(40,673,554,974)	33,208,317,300,720	93.64	2,257,292,134,306



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

LRAB MENURUT

FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB 02d
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 1
Prog.Id : lu_lrabi5b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IKHTISAR MENURUT PROGRAM								
	FUNGSI TIDAK ADA								
	SUB FUNGSI INI TIDAK ADA								
	program ini tidak ada	0	0	0	0	(147,741,180)	(147,741,180)	0.00	0
00	program ini tidak ada	0	0	0	0	(66,548,247)	(66,548,247)	0.00	0
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	0	0	0	0	(222,051,010)	(222,051,010)	0.00	0
03	program ini tidak ada	0	0	0	0	(4,900,000)	(4,900,000)	0.00	0
06	Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah	0	0	0	0	(2,200,000)	(2,200,000)	0.00	0
08	Program Bimbingan Masyarakat Islam	0	0	0	0	(400,000)	(400,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI	0	0	0	0	(443,840,437)	(443,840,437)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA FUNGSI	0	0	0	0	(443,840,437)	(443,840,437)	0.00	0
01	PELAYANAN UMUM								
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI								
101	program ini tidak ada	0	0	0	0	(3,540,000)	(3,540,000)	0.00	0
103	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	37,289,385,000	36,088,385,000	2,158,556,650	35,698,857,625	(2,630,186,914)	33,068,670,711	98.92	389,527,375
107	Program Pendidikan Islam	0	0	34,860,000	34,860,000	(22,634,400)	12,225,600	0.00	(34,860,000)
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.01	37,289,385,000	36,088,385,000	2,193,416,650	35,733,717,625	(2,656,361,314)	33,077,356,311	99.02	354,667,375
03	PELAYANAN UMUM								
3	program ini tidak ada	0	0	0	0	(5,402,900)	(5,402,900)	0.00	0
300	program ini tidak ada	0	0	0	0	(1,800,000)	(1,800,000)	0.00	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBKB 02d
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 2
Prog.Id : lu_lrabi5b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	1,197,865,151,000	1,166,223,833,000	153,820,171,414	1,092,959,301,994	(4,473,186,694)	1,088,486,115,300	93.72	73,264,531,006
302	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	193,444,028,000	185,603,266,000	39,892,713,999	175,687,635,300	(41,962,600)	175,645,672,700	94.66	9,915,630,700
303	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	71,631,872,000	67,159,245,000	17,924,401,883	65,438,201,017	0	65,438,201,017	97.44	1,721,043,983
304	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	94,315,566,000	93,404,501,000	13,923,809,911	85,807,787,997	(163,664,044)	85,644,123,953	91.87	7,596,713,003
306	Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah	149,076,499,000	149,199,719,000	15,078,300,670	124,139,465,554	(83,758,782)	124,055,706,772	83.20	25,060,253,446
308	Program Bimbingan Masyarakat Islam	1,166,605,746,000	1,188,945,994,000	136,034,794,106	1,381,076,320,134	(819,358,193)	1,380,256,961,941	116.16	(192,130,326,134)
309	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	228,722,048,000	236,417,964,000	45,700,160,449	200,735,843,528	(67,121,336)	200,668,722,192	84.91	35,682,120,472
310	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	98,909,771,000	103,478,126,000	17,009,196,687	84,062,461,605	(21,331,033)	84,041,130,572	81.24	19,415,664,395
311	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	168,922,807,000	180,729,107,000	54,141,886,573	167,719,578,721	(68,622,035)	167,650,956,686	92.80	13,009,528,279
312	program ini tidak ada	47,528,486,000	48,190,336,000	6,337,045,825	37,476,105,018	(497,707,055)	36,978,397,963	77.77	10,714,230,982
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.03	3,417,021,974,000	3,419,352,091,000	499,862,481,517	3,415,102,700,868	(6,243,914,672)	3,408,858,786,196	99.88	4,249,390,132
04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK								
406	program ini tidak ada	0	0	0	0	(418,000)	(418,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.04	0	0	0	0	(418,000)	(418,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	3,454,311,359,000	3,455,440,476,000	502,055,898,167	3,450,836,418,493	(8,900,693,986)	3,441,935,724,507	99.87	4,604,057,507
02	PERTAHANAN								
01	PERTAHANAN NEGARA								
123	program ini tidak ada	0	0	0	0	(355,000)	(355,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 02.01	0	0	0	0	(355,000)	(355,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 02	0	0	0	0	(355,000)	(355,000)	0.00	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB 02d
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 3
Prog.Id : lu_lrabi5b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	AGAMA								
01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA								
101	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	1,000,000,000	34,645,000,000	33,934,829,985	34,266,823,657	0	34,266,823,657	98.91	378,176,343
102	program ini tidak ada	0	0	0	0	(1,100,000)	(1,100,000)	0.00	0
106	Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah	214,293,920,000	217,548,384,000	124,745,038,643	182,684,245,362	(992,947,490)	181,691,297,872	83.97	34,864,138,638
108	Program Bimbingan Masyarakat Islam	355,943,408,000	348,415,317,000	108,602,665,304	339,329,454,727	(1,591,696,473)	337,737,758,254	97.39	9,085,862,273
109	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	64,155,512,000	68,794,316,000	16,995,313,250	65,898,007,271	(10,379,591)	65,887,627,680	95.79	2,896,308,729
110	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	49,134,973,000	51,287,676,000	9,498,821,690	49,670,722,838	(16,689,900)	49,654,032,938	96.85	1,616,953,162
111	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	38,339,762,000	38,936,759,000	3,070,681,768	36,450,247,711	(17,265,780)	36,432,981,931	93.61	2,486,511,289
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 09.01	722,867,575,000	759,627,452,000	296,847,350,640	708,299,501,566	(2,630,079,234)	705,669,422,332	93.24	51,327,950,434
02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA								
201	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	65,284,120,000	61,451,662,000	12,168,827,267	58,276,767,893	(112,641,450)	58,164,126,443	94.83	3,174,894,107
207	Program Pendidikan Islam	0	0	0	0	(26,810,000)	(26,810,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 09.02	65,284,120,000	61,451,662,000	12,168,827,267	58,276,767,893	(139,451,450)	58,137,316,443	94.83	3,174,894,107
03	LITBANG AGAMA								
304	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	78,104,516,000	71,736,439,000	16,401,264,145	61,800,821,582	(511,083,652)	61,289,737,930	86.15	9,935,617,418
307	Program Pendidikan Islam	0	0	0	0	(4,498,000)	(4,498,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 09.03	78,104,516,000	71,736,439,000	16,401,264,145	61,800,821,582	(515,581,652)	61,285,239,930	86.15	9,935,617,418
90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA								
0	program ini tidak ada	0	0	0	0	(8,500,000)	(8,500,000)	0.00	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBKB 02d
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 4
Prog.id : lu_lrabi5b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	40,360,974,000	37,968,323,000	9,769,132,550	36,215,846,960	(433,489,868)	35,782,357,092	95.38	1,752,476,040
008	Program Bimbingan Masyarakat Islam	495,986,199,000	628,473,228,000	181,409,651,134	564,935,043,236	(1,068,654,583)	563,866,388,653	89.89	63,538,184,764
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 09.90	536,347,173,000	666,441,551,000	191,178,783,684	601,150,890,196	(1,510,644,451)	599,640,245,745	90.20	65,290,660,804
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 09	1,402,603,384,000	1,559,257,104,000	516,596,225,736	1,429,527,981,237	(4,795,756,787)	1,424,732,224,450	91.68	129,729,122,763
10	PENDIDIKAN								
02	PENDIDIKAN DASAR								
201	program ini tidak ada	0	0	12,000,000	24,000,000	0	24,000,000	0.00	(24,000,000)
207	Program Pendidikan Islam	4,052,812,554,000	5,482,453,097,000	2,727,901,805,956	4,771,671,238,904	(897,964,810)	4,770,773,274,094	87.04	710,781,858,096
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 10.02	4,052,812,554,000	5,482,453,097,000	2,727,913,805,956	4,771,695,238,904	(897,964,810)	4,770,797,274,094	87.04	710,757,858,096
03	PENDIDIKAN MENENGAH								
301	program ini tidak ada	0	0	0	39,330,000	0	39,330,000	0.00	(39,330,000)
307	Program Pendidikan Islam	583,533,867,000	1,163,930,973,000	603,943,117,322	1,065,453,415,121	(249,975,672)	1,065,203,439,449	91.54	98,477,557,879
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 10.03	583,533,867,000	1,163,930,973,000	603,943,117,322	1,065,492,745,121	(249,975,672)	1,065,242,769,449	91.54	98,438,227,879
06	PENDIDIKAN TINGGI								
607	Program Pendidikan Islam	2,064,193,325,000	2,823,815,746,000	1,077,398,608,180	2,164,594,781,122	(480,776,428)	2,164,114,004,694	76.66	659,220,964,878
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 10.06	2,064,193,325,000	2,823,815,746,000	1,077,398,608,180	2,164,594,781,122	(480,776,428)	2,164,114,004,694	76.65	659,220,964,878
07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN								
701	program ini tidak ada	0	0	12,275,000	14,605,000	0	14,605,000	0.00	(14,605,000)
707	Program Pendidikan Islam	3,677,345,500,000	3,661,754,409,000	391,558,557,221	3,493,735,324,616	(2,913,408,482)	3,490,821,916,134	95.41	168,019,084,384
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 10.07	3,677,345,500,000	3,661,754,409,000	391,570,832,221	3,493,749,929,616	(2,913,408,482)	3,490,836,521,134	95.41	168,004,479,384
08	PEMBINAAN KEAGAMAAN								
8	program ini tidak ada	0	0	0	0	(3,904,300)	(3,904,300)	0.00	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB 02d
Tanggal : 03 Mei 2012
Halaman : 5
Prog.id : lu_lrabi5b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
800	program ini tidak ada	0	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0.00	(2,200,000)
801	program ini tidak ada	3,742,300,000	3,357,539,000	511,670,000	3,203,759,300	(154,766,600)	3,048,992,700	95.42	153,779,700
803	program ini tidak ada	0	0	0	0	(29,609,550)	(29,609,550)	0.00	0
804	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	390,892,779,000	369,140,497,000	56,556,107,799	328,669,219,115	(494,535,969)	328,174,683,146	89.04	40,471,277,885
807	Program Pendidikan Islam	1,690,841,584,000	1,814,714,994,000	629,757,951,888	1,643,927,588,184	(3,900,636,129)	1,640,026,952,055	90.59	170,787,405,816
809	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	517,916,426,000	535,595,656,000	144,794,745,721	484,285,678,908	(106,445,649)	484,179,233,259	90.42	51,309,977,092
810	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	314,037,957,000	317,976,344,000	68,609,538,305	279,326,511,728	(52,016,169)	279,274,495,559	87.85	38,649,832,272
811	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	163,517,929,000	187,003,140,000	46,314,389,089	175,981,640,987	(125,386,010)	175,856,254,977	94.11	11,021,499,013
812	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	98,918,547,000	97,429,781,000	16,328,931,225	88,679,464,897	(768,753,229)	87,910,711,668	91.02	8,750,316,103
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 10.08	3,179,867,522,000	3,325,217,951,000	962,875,534,027	3,004,076,063,119	(5,636,053,605)	2,998,440,009,514	90.34	321,141,887,881
90	PENDIDIKAN LAINNYA								
0	program ini tidak ada	0	0	0	0	(1,417,134,000)	(1,417,134,000)	0.00	0
001	program ini tidak ada	0	0	290,455,594	12,272,539,794	(77,976,770)	12,194,563,024	0.00	(12,272,539,794)
002	program ini tidak ada	0	0	0	0	(72,650,000)	(72,650,000)	0.00	0
003	program ini tidak ada	0	0	0	0	(215,918,470)	(215,918,470)	0.00	0
007	Program Pendidikan Islam	13,759,590,939,000	14,034,413,234,000	3,047,365,399,688	13,856,745,158,288	(14,475,850,527)	13,842,269,307,761	98.73	177,668,075,712
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 10.90	13,759,590,939,000	14,034,413,234,000	3,047,655,855,282	13,869,017,698,082	(16,259,529,767)	13,852,758,168,315	98.82	165,395,535,918
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	27,317,343,707,000	30,491,585,410,000	8,811,357,752,988	28,368,626,455,964	(26,437,708,764)	28,342,188,747,200	93.04	2,122,958,954,036
11	PERLINDUNGAN SOSIAL								
04	KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK								
401	program ini tidak ada	0	0	0	0	(95,200,000)	(95,200,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 11.04	0	0	0	0	(95,200,000)	(95,200,000)	0.00	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
 BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN
 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
 (dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap. : LRBKB 02d
 Tanggal : 03 Mei 2012
 Halaman : 6
 Prog.Id : lu_lrabi5b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 11	0	0	0	0	(95,200,000)	(95,200,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA	32,174,258,450,000	35,506,282,990,000	9,830,009,876,891	33,248,990,855,694	(40,673,554,974)	33,208,317,300,720	93.64	2,257,292,134,306



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

KERTAS KERJA

INFORMASI AKRUAL

**INFORMASI BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011**

		BA (UAPA) 025 - Kementerian Agama (dalam rupiah)																											
No	Satuan Kerja	Utang Belanja Pegawai										Utang Belanja Barang						Utang Belanja Modal			Utang Belanja Bantuan Sosial								
		Mutasi, KP dan KGB	Gaji CPNS	Gaji ke-13	Gaji (Terusan, Rapel, Susulan, Pembulatan & Kekurangan)	Uang Makan	Tunjangan Beras	Honor Guru Tidak Tetap	Tunjangan Tambahan Guru PNS	Uang Duka Wafat	Tunjangan Profesi	Uang Lembur	Tunjangan Pegawai Non PNS	Jumlah Utang Belanja Pegawai	Listrik, Telepon & Air	Internet	Koran	Belanja Barang Lainnya	Jumlah Utang Belanja Barang	Perolehan aset yang sudah ada BAST tp belum dilakukan pembayaran	Retensi atas Pemeliharaan	Jumlah Utang Belanja Modal	Tunjangan Profesi Guru Non PNS	Belanja Bantuan Langsung	Jumlah Utang Belanja Bantuan Sosial	Jumlah			
I Eselon 1																													
1	Sekretariat Jenderal	169.030.614	3.987.505		670.643.423	147.863.662	2.828.182		142.022		83.799.686		1.078.295.094	392.787.977	2.465.000	1.135.000		396.387.977					0		459.000.000	459.000.000	1.933.683.071		
2	Inspektorat Jenderal											0						0				0				0		0	
3	Direktorat Jenderal Bimas Islam	110.277.346			5.055.029.242	435.136.000	4.666.051		3.151.578		2.378.128		5.610.638.345	24.085.640				24.085.640				0				0		5.634.723.985	
4	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	1.099.402.231			8.917.787.386	766.407.290	85.180.956		69.004.000		264.176.933.326	81.411.200	275.196.126.389	1.617.069.849	6.934.840	360.000		1.624.384.689				0	3.258.502.700	769.446.379	4.027.949.079	280.848.460.157			
5	Direktorat Jenderal Bimas Kristen	14.537.402			3.981.411.333	7.766.000	279.946.527				6.006.907.913		10.290.569.175	1.762.335				1.762.335				0				0		10.292.331.510	
6	Direktorat Jenderal Bimas Katolik	1.808.171			2.841.868.533	629.000	53.964.067		3.000.000		1.516.901.403		4.418.071.174				500	500				0				0		4.418.071.674	
7	Direktorat Jenderal Bimas Hindu	13.945.710			146.679.691	1.430.000	299.544				365.930.198		528.285.143	1.552.900				1.552.900				0				0		529.838.043	
8	Direktorat Jenderal Bimas Budha	1.722.000			1.362.229.799	15.317.000	186.597				518.486.922		1.897.942.318					0				0				0		1.897.942.318	
9	Direktorat Jenderal PHU				85.179.160	31.298.000	486.366				1.724.577		118.688.103				3.060.000	3.060.000				0				0		121.748.103	
10	Badan Litbang dan Diklat	2.502.131			193.159.766								195.661.897	19.313.402				19.313.402				0				0		214.975.299	
Jumlah		1.413.225.605	3.987.505	0	23.253.988.333	1.405.846.952	427.458.290	0	75.297.600	0	272.673.062.153	81.411.200	299.334.277.638	2.056.592.103	9.399.840	1.495.000	3.060.500	2.070.547.443	0	0	0	0	3.258.502.700	1.228.446.379	4.486.949.079	305.891.774.160			



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

DATA INFORMASI AKRUAL

**INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011**

(Dalam rupiah)

BA (UAPA)			: 025 - Kementerian Agama				
No.	Pendapatan & Belanja		LRA Basis Kas Rp	Penyesuaian Akrual		Informasi Akrual	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		DR	CR		
A	51	Belanja Pegawai	15.856.775.922.095	299.334.277.638		16.156.110.199.733	SK Pegawai
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6.890.460.302.315	24.671.201.443		6.915.131.503.758	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional	815.152.626.720	272.673.062.153		1.087.825.688.873	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	513.537.947.640	427.458.290		513.965.405.930	
	511129	Belanja Tunj. Uang Makan PNS	1.094.590.493.060	1.405.846.952		1.095.996.340.012	
	511155	Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	203.735.126.722	75.297.600		203.810.424.322	
	512211	Belanja Uang Lembur	38.974.960.918	81.411.200		39.056.372.118	
	52	Belanja Barang	5.608.832.382.115	2.070.547.443		5.610.902.929.558	Tagihan
	522111	Belanja Langganan Daya dan Jasa	86.891.063.050	2.067.486.943		88.958.549.993	
	522119	Belanja Jasa Lainnya	22.109.834.244	3.060.500		22.112.894.744	
	53	Barang Modal	3.046.291.844.005	-		3.046.291.844.005	
		Perolehan Aset yang Sudah Ada BAST tetapi Belum Dilakukan Pembayaran				-	
		Retensi atas Pemeliharaan				-	
	57	Barang Sosial	8.737.090.707.479	4.486.949.079		8.741.577.656.558	
	572111	Belanja Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga/Guru	7.130.296.014.669	4.486.949.079		7.134.782.963.748	



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR LK

BADAN LAYANAN UMUM

A. PENJELASAN UMUM

Paket undang-undang bidang keuangan negara merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang kita alami sejak kemerdekaan. Salah satu dari reformasi yang paling menonjol adalah pergeseran dari penganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, mulai dirintis arah yang jelas bagi penggunaan dana pemerintah, berpindah dari sekedar membiayai masukan (inputs) atau proses ke pembayaran terhadap apa yang akan dihasilkan (outputs).

Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran yang lebih rasional untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki pemerintah mengingat tingkat kebutuhan dana yang makin tinggi, sementara sumber dana yang tersedia tetap terbatas. Orientasi pada outputs semakin menjadi praktik yang dianut luas oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi keuangan sektor publik. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberi landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 dari undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Peluang ini secara khusus disediakan kesempatannya bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi), untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan. Praktik ini telah berkembang luas di manca negara berupa upaya pengagenan (agencification) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (business like) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.

Suatu instansi dapat menjadi satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum (PPK-BLU), harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, yang terdiri dari:

1. Persyaratan Substantive;

Persyaratan substantive dapat dipenuhi apabila satuan kerja pemerintah menyelenggarakan pelayanan umum yang berhubungan dengan:

- a. Penyediaan barang dan/jasa layanan umum;
- b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat
- c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat

2. Persyaratan Teknis.

Persyaratan teknis dapat terpenuhi apabila:

- a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri sesuai dengan kewenangannya
- b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

3. Persyaratan Administrative

Persyaratan administrative terpenuhi, apabila satuan kerja pemerintah dapat menyajikan dokumen sebagai berikut:

- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat
- b. pola tata kelola;
- c. rencana strategis bisnis;
- d. laporan keuangan pokok;
- e. standar layanan minimum
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit secara independen.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sebagai satuan kerja dengan PPK-BLU antara lain adalah :

1. UU RI nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 68 dan Pasal 69);
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 07/PMK.02/2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada BLU;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (sebagai Pengganti Peraturan Menteri Keuangan);
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewa Pengawas BLU;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
11. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNPB oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan PK BLU;
12. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara

Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

13. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2008 tentang Format Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU);
15. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2008 tentang Mekanisme Pengembalian Sisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diterima sebelum ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
16. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2010 tentang Tata Cara Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

C. PROFIL PEGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI YANG MENERAPKAN PPK-BLU

Perguruan Tinggi Agama dalam perjalanannya telah menjadi center of excellence dalam bidang ilmu-ilmu keislaman serta dijuluki sebagai feeder bagi perguruan tinggi lainnya.

Program studi dan kurikulum yang ada terus dievaluasi serta disempurnakan agar semakin relevan dengan tuntutan zaman. PTAIN membekali dan mengantarkan alumnusnya ke berbagai Kementerian/Lembaga dan bidang pengabdian, seperti sebagai dosen, guru, pegawai negeri, tokoh politik, TNI/Polri, wiraswasta, pengusaha, dan bahkan diplomat.

Kebijakan kearah pengembangan PTAIN sebagai universitas bertumpu pada paradigma baru yaitu bertumpu pada tiga pilar utama; kemandirian (autonomy), akuntabilitas (accountability) dan jaminan mutu (quality assurance).

Sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara khususnya pasal 68 dan 69 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum (PPK-BLU) maka Perguruan Tinggi Agama Islam sebagai instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas selayaknya dapat menyesuaikan sistem pengelolaan keuangannya sebagaimana dimaksud dalam PP RI Nomor 23 Tahun 2005.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut diatas Perguruan Tinggi Agama Islam di lingkungan Kementerian Agama mulai tahun 2005 melakukan persiapan-persiapan untuk menjadi instansi pemerintah dengan PPK-BLU sebagai upaya perbaikan dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk memajukan pendidikan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasar prinsip ekonomi dan produktifitas dan penerepan praktek bisnis yang sehat.

Sebagai langkah awal proses pengajuan menjadi satuan kerja yang menerapkan PPK-BLU, pada bulan Februari 2006 dilaksanakan Workshop Sosialisasi PPK-BLU dengan mengundang Tim Evaluasi BLU Kementerian Keuangan sebagai pembicara. Dalam Workshop tersebut diperoleh informasi bahwa untuk menjadi instansi dengan PPK-BLU, Perguruan Tinggi Agama Islam harus mengajukan proposal terlebih dahulu ke Kementerian Keuangan. Proposal tersebut selanjutnya akan diuji dan dinilai oleh Tim Penilai Kementerian Keuangan untuk menentukan apakah Perguruan Tinggi Agama Islam tersebut layak menjadi satuan kerja dengan PPK-BLU.

Setelah mendapat persetujuan Menteri Agama RI, proposal tersebut selanjutnya dikirim ke Tim Evaluasi BLU Kementerian Keuangan untuk dimintakan pengesahan. Bagi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang sudah mengajukan untuk menjadi satuan kerja PPK-BLU, mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan proposal tersebut dihadapan Tim Penilai BLU Kementerian Keuangan.

Akhirnya setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI maka status BLU Penuh resmi disandang oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri untuk menjalankan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan dengan PPK-BLU.

Sampai dengan tahun 2011, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) ada lima belas Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang terdiri dari 6 (enam) Universitas Islam Negeri dan 9 (sembilan) Institut Agama Islam Negeri di lingkungan Kementerian Agama. Dalam perkembangan terakhirnya, perguruan tinggi agama Islam yang menerapkan PPK-BLU memiliki fakultas-fakultas, yaitu:

a. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 2 Juli 2007 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007.

- 1) Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
- 2) Fakultas Dakwah
- 3) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- 4) Fakultas Syari'ah dan Hukum
- 5) Fakultas Ushuludin
- 6) Fakultas Sains dan Teknologi
- 7) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
- 8) Pasca Sarjana

b. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 26 Februari 2008 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008.

- 1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
- 2) Fakultas Adab dan Humaniora
- 3) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
- 4) Fakultas Syari'ah dan Hukum
- 5) Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

- 6) Fakultas Dirasat Islamiyah
 - 7) Fakultas Psikologi
 - 8) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 - 9) Fakultas Sains dan Teknologi
 - 10) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 - 11) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - 12) Sekolah Pascasarjana
- c. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 31 Maret 2008 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008.
- 1) Fakultas Tarbiyah
 - 2) Fakultas Syariah
 - 3) Fakultas Humaniora dan Budaya
 - 4) Fakultas Psikologi
 - 5) Fakultas Ekonomi
 - 6) Fakultas Sains dan Teknologi
 - 7) Pasca Sarjana
- d. UIN Gunung Djati Bandung
- Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 10 September 2008 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.05/2008.
- 1) Fakultas Adab dan Humaniora
 - 2) Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 - 3) Fakultas Psikologi
 - 4) Fakultas Sains dan Teknologi
 - 5) Fakultas Syariah dan Hukum
 - 6) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
 - 7) Fakultas Ushuluddin
 - 8) Pasca Sarjana.
- e. UIN Alauddin Makassar
- Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 20 November 2008 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.05/2008.
- 1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 - 2) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
 - 3) Fakultas Ushuludin dan Filsafat
 - 4) Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 - 5) Fakultas Adab dan Humaniora
 - 6) Fakultas Sains dan Teknologi
 - 7) Fakultas Ilmu Kesehatan
 - 8) Program Pasca Sarjana
- f. IAIN Walisongo Semarang
- Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 5 Maret 2009 sesuai dengan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009.

- 1) Fakultas Dakwah
- 2) Fakultas Syariah
- 3) Fakultas Tarbiyah
- 4) Fakultas Ushuludin

g. IAIN Sumatera Utara

Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 13 Maret 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009.

- 1) Fakultas Dakwah
- 2) Fakultas Syariah
- 3) Fakultas Tarbiyah
- 4) Fakultas Ushuludin

h. UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 13 Maret 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.05/2009.

- 1) Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi
- 2) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- 3) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
- 4) Fakultas Ushuluddin
- 5) Fakultas Sains dan Teknologi
- 6) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
- 7) Fakultas Pertanian dan Peternakan
- 8) Fakultas Psikologi
- 9) Pasca Sarjana

i. IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 17 November 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009.

- 1) Fakultas Syariah
- 2) Fakultas Tarbiyah
- 3) Fakultas Ushuluddin
- 4) Fakultas Adab
- 5) Program Pasca Sarjana

j. IAIN Sunan Ampel Surabaya

Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 28 Desember 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.05/2009.

- 1) Fakultas Adab
- 2) Fakultas Dakwah
- 3) Fakultas Syariah
- 4) Fakultas Tarbiyah
- 5) Fakultas Ushuludin
- 6) Pasca Sarjana

- k. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 12 Februari 2010 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67/KMK.05/2010.
 - 1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
 - 2) Fakultas Tarbiyah dan Adab
 - 3) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
 - 4) Pasca Sarjana

- l. IAIN Raden Intan Lampung
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 5 Juli 2010 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.05/2010.
 - 1) Fakultas Syariah
 - 2) Fakultas Tarbiyah
 - 3) Fakultas Ushuluddin
 - 4) Fakultas Dakwah
 - 5) Pasca Sarjana

- m. IAIN Raden Fatah Palembang
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 30 September 2010 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 401/KMK.05/2010.
 - 1) Fakultas Syariah
 - 2) Fakultas Tarbiyah
 - 3) Fakultas Ushuluddin
 - 4) Fakultas Dakwah
 - 5) Fakultas Adab
 - 6) Pasca Sarjana

- n. IAIN Mataram
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 14 Maret 2011 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.05/2011.
 - 1) Fakultas Syariah
 - 2) Fakultas Tarbiyah
 - 3) Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 - 4) Pasca Sarjana

- o. IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 5 September 2011 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011.
 - 1) Fakultas Syari'ah
 - 2) Fakultas Tarbiyah
 - 3) Fakultas Ushuluddin
 - 4) Fakultas Dakwah
 - 5) Fakultas Adab
 - 6) Pasca Sarjana

D. PELAPORAN KEUANGAN

Sebagai instansi pemerintah dengan PPK - BLU, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri wajib menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya kepada masyarakat. Laporan keuangan yang disusun paling sedikit terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran dan/ atau Laporan Operasional/Aktivitas; (2) Neraca; (3) Laporan Arus Kas dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang disusun tersebut selanjutnya dikirim secara berjenjang kepada Menteri/Pimpinan lembaga serta kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan secara periodik setiap triwulan, semesteran dan tahunan. Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum, system akuntansi BLU terdiri dari :

1. Sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
2. Sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan
3. Sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.

BLU dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana tersebut diatas dan ditetapkan oleh Menteri. Sistem akuntansi keuangan BLU dirancang agar paling sedikit menyajikan:

1. Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
2. Informasi tentang kemampuan BLU untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
3. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;
4. Informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
5. Informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang- undangan.

Ciri dasar akuntansi keuangan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri adalah akuntansi dana (fund accounting). Akuntansi dana terkait dengan karakteristik operasional Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang menunjukkan adanya penerimaan dan pengeluaran operasional yang rutin dengan penerimaan dan pengeluaran yang disesuaikan tujuannya sesuai dengan acuan dari pemberi dana (donor).

Dana untuk operasional pengelolaan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri bersumber dari pemerintah (APBN) yang didroping secara kontinyu melalui prosedur keuangan negara dan penerimaan PNBPN BLU yang berupa penerimaan pendidikan, hibah, dan lain-lain. Sedangkan dana non operasional yang berkaitan dengan donor disesuaikan dengan tujuan pemberi dana (donatur). Kegiatan-kegiatan non operasional Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri mencakup kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, penerimaan bea siswa, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan non operasional tersebut dalam pelaksanaannya lebih banyak ditangani oleh Lembaga-lembaga/unit non struktural yang dibentuk oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

1. Satuan Akuntansi

Satuan akuntansi dalam lingkup Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri merupakan satuan organisasi struktural dan non struktural yang dalam operasionalnya

mengelola dana atau keuangan. Sumber dana yang dikelola tidak terbatas pada dana pemerintah (APBN) namun mencakup seluruh dana yang masuk berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Sumber dana berasal dari berbagai sumber antara lain hasil kerjasama, pungutan pelayanan, penjualan, sewa-menyewa, bunga bank, dan sumber-sumber lain. Satuan akuntansi bertugas melakukan pengelolaan keuangan dilingkungannya dan melaporkan secara periodik kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sebagai bentuk pertanggungjawaban.

2. Lingkup Laporan

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang menerapkan PPK-BLU menyusun dan menyajikan:

- a. Laporan Keuangan Pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan disampaikan secara berjenjang kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perbendaharaan
- b. Laporan Keuangan untuk tujuan Konsolidasian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai SAP
- c. Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang berisikan ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program yang disusun di dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

3. Kebijakan Akuntansi BLU

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4. Laporan Keuangan BLU

Laporan Keuangan BLU disusun dengan dua tujuan yaitu:

- a. Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya
- b. Dalam rangka konsolidasi.

Untuk tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a, BLU menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran/Laporan operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Sedangkan untuk tujuan konsolidasi, BLU menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan standar SAP yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan di lampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar SAK/Industri yang spesifik.

5. Periode Akuntansi

Periode akuntansi adalah satu tahun dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

6. Penjabaran Kurs Valuta Asing

Elemen laporan keuangan dalam valuta asing, dilaporkan dalam nilai Rupiah. Konversi didasarkan atas Kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI YANG MENERAPKAN PPK-BLU.

Neraca merupakan laporan yang menyajikan hak dan kewajiban BLU, sehingga dapat diketahui seberapa besar kekayaan dari pada BLU tersebut. Neraca Badan Layanan Umum ini merupakan Neraca Gabungan dari Satuan Kerja Perguruan Tinggi Agama Islam yang telah menerapkan PPK-BLU dan telah menyampaikan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan.

KEMENTERIAN AGAMA NERACA PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2011	TAHUN 2010	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			JUMLAH	%
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	136.069.469.526	95.005.380.340	41.064.089.185	43,22%
Investasi Jangka Pendek	35.000.000.000	35.000.000.000	-	0,00%
Piutang Usaha	2.244.607.386	1.456.250.000	788.357.386	54,14%
Piutang Lain-lain	1.570.643.452	1.853.036.908	(282.393.456)	-15,24%
Persediaan	3.944.866.561	2.527.506.034	1.417.360.527	56,08%
Uang Muka	187.216.923	26.659.785	160.557.138	602,24%
Biaya Dibayar Dimuka	-	1.269.660.227	(1.269.660.227)	-100,00%
Jumlah Aset Lancar	179.016.803.848	137.138.493.294	41.878.310.553	30,54%
Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-
Aset Tetap				
Tanah	3.275.144.048.509	2.839.804.418.973	435.339.629.536	15,33%
Gedung dan Bangunan	1.961.989.501.177	1.184.836.954.917	777.152.546.260	65,59%
Peralatan dan Mesin	1.153.703.533.262	774.349.451.362	379.354.081.900	48,99%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	87.198.887.324	52.926.893.899	34.271.993.425	64,75%
Aset Tetap Lainnya	72.377.241.731	45.032.295.094	27.344.946.637	60,72%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	640.711.589.974	494.386.977.978	146.324.611.996	29,60%
Jumlah Aset Tetap	7.191.124.801.977	5.391.336.992.223	1.799.787.809.754	33,38%
Akumulasi Penyusutan	371.838.073.903	211.741.655.872	160.096.418.031	75,61%
Nilai Buku Aset Tetap	6.819.286.728.074	5.179.595.336.351	1.639.691.391.723	31,66%
Aset Lainnya				
Aset Kerja Sama Operasi	-	-	-	-
Aset Sewa Guna Usaha	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	16.291.509.276	10.215.465.372	6.076.043.904	59,48%
Aset Lain-lain	3.152.568.367	2.456.239.963	696.328.404	28,35%
Jumlah Aset Lainnya	19.444.077.643	12.671.705.335	6.772.372.308	53,44%
Akumulasi Amortisasi	4.702.785.387	-	-	-
Nilai Buku Aset Lainnya	14.741.292.256	12.671.705.335		
JUMLAH ASET	7.013.044.824.178	5.329.405.534.981	1.683.639.289.197	31,59%

KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Usaha	455.335.634	331.629.016	123.706.618	37,30%
Utang Pajak	-	-	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	6.558.523.453	721.404.455	5.837.118.998	809,13%
Pendapatan Diterima Dimuka	8.313.510.599	9.430.600.283	(1.117.089.684)	-11,85%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.241.763.597	1.654.659.476	(412.895.879)	-24,95%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	16.569.133.283	12.138.293.230	4.430.840.053	36,50%
Kewajiban Jangka Panjang				
JUMLAH KEWAJIBAN	16.569.133.283	12.138.293.230	4.430.840.053	36,50%
EKUITAS				
Ekuitas Tidak Terikat	6.153.727.458.272	3.706.430.041.856	2.447.297.416.416	66,03%
Ekuitas Awal	4.383.237.059.751	2.812.688.490.404	1.570.548.569.347	55,84%
Surplus & Defisit Tahun Lalu	250.456.181.252	114.732.563.518	135.723.617.734	118,30%
Surplus & Defisit Tahun Berjalan	402.795.021.594	394.243.685.623	8.551.335.970	2,17%
Ekuitas Donasi	1.117.239.195.675	384.765.302.311	732.473.893.364	190,37%
Ekuitas Terikat Temporer	1.300.736.032	863.876.000	436.860.032	50,57%
Ekuitas Terikat Permanen	1.030.651.136.025	1.548.572.718.478	(517.921.582.453)	-33,45%
JUMLAH EKUITAS	7.185.679.330.329	5.255.866.636.334	1.929.812.693.995	36,72%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.202.248.463.612	5.268.004.929.564	1.934.243.534.048	36,72%

1. ASET

a). ASET LANCAR

1). KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2011 senilai Rp139.069.469.526,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.
Kas dan Setara Kas

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	28.756.983.657	26.083.384.687
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	17.492.297.906	4.234.778.555
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	5.365.336.524	708.680.494
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	1.520.879.577	9.161.588.899
5	UIN Alauddin Makassar	13.682.327.977	14.777.513.560
6	IAIN Walisongo Semarang	13.288.792.590	7.364.792.302
7	IAIN Sumatera Utara	2.607.262.120	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	22.328.662.868	15.457.592.876
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	228.948.858	1.508.967.407
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	13.106.964.886	9.787.463.580
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	6.933.311.329	3.295.506.734
12	IAIN Raden Intan Lampung	3.772.058.241	2.625.111.246
13	IAIN Raden Fatah Palembang	3.237.953.213	-
14	IAIN Mataram	3.747.689.780	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		136.069.469.526	95.005.380.340

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Setara kas (cash equivalent) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d. 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.

2). INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi Jangka Pendek yang telah dilakukan Satker BLU per 31 Desember 2011 senilai Rp35.000.000.000,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2
Investasi Jangka Pendek

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	30.000.000.000	30.000.000.000
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	5.000.000.000	5.000.000.000
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		35.000.000.000	35.000.000.000

3). PIUTANG USAHA

Piutang Usaha yang masih dimiliki Satker BLU per 31 Desember 2011 senilai Rp 2.244.607.386,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 3
Piutang Usaha

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	779.558.000	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	1.456.250.000	1.456.250.000
5	UIN Alauddin Makassar	299.386	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	8.500.000	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		2.244.607.386	1.456.250.000

4). PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang Lain-Lain yang masih dimiliki Satker BLU per 31 Desember 2011 senilai Rp 1.570.643.452,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 4
Piutang Lain-Lain

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	30.200.675	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	920.772.777	610.466.736
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	1.216.972.952
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	25.597.220
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	43.070.000	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	576.600.000	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		1.570.643.452	1.853.036.908

5). PERSEDIAAN

Persediaan yang masih dimiliki Satker BLU per 31 Desember 2011 senilai Rp 3.944.866.561,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 5
Persediaan

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	195.941.313	122.193.161
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	554.573.885	656.448.766
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	1.114.629.628	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	657.558.812	24.683.969
5	UIN Alauddin Makassar	16.304.000	13.536.120
6	IAIN Walisongo Semarang	188.753.573	180.752.800
7	IAIN Sumatera Utara	116.412.018	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	151.292.170	37.107.993
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	90.824.267	23.883.000
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	254.454.332	341.554.771
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	59.195.085	823.029.466
12	IAIN Raden Intan Lampung	283.122.502	304.315.988
13	IAIN Raden Fatah Palembang	197.842.166	-
14	IAIN Mataram	63.962.810	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh		
Jumlah		3.944.866.561	2.527.506.034

6). UANG MUKA

Uang Muka Satker BLU per 31 Desember 2011 senilai Rp187.216.923,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 6
Uang Muka

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	187.216.923	16.450.785
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	10.209.000
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh		
Jumlah		187.216.923	26.659.785

7). BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Biaya Dibayar Dimuka Satker BLU per 31 Desember 2011 senilai Rp- dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 7
Biaya Dibayar Dimuka

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	196.297.727
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	1.073.362.500
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		-	1.269.660.227

8). INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Satker BLU per 31 Desember 2011 senilai RpNIHIL

b). ASET TETAP

Aset Tetap Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri merupakan harta benda berbentuk fisik yang digunakan untuk sarana dan prasarana proses belajar mengajar dan administrasi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2011 terdiri dari:

1). TANAH

Nilai aset tanah BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp3.275.144.048.509,- terinci sebagai berikut :

Tabel. 8
Tanah

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	489.218.689.800	489.218.689.800
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	494.666.569.000	593.758.743.000
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	182.879.461.614	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	238.940.610.949	238.940.610.949
5	UIN Alauddin Makassar	299.802.740.000	299.802.740.000
6	IAIN Walisongo Semarang	236.003.145.308	236.003.145.308
7	IAIN Sumatera Utara	181.027.072.672	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	304.205.091.125	339.700.371.575
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	40.847.740.000	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	389.329.832.391	389.329.832.391
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	113.676.831.000	114.910.613.000
12	IAIN Raden Intan Lampung	141.881.351.950	138.139.672.950
13	IAIN Raden Fatah Palembang	122.878.946.200	-
14	IAIN Mataram	39.785.966.500	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		3.275.144.048.509	2.839.804.418.973

2). GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.961.989.501.177,- terinci sebagai berikut :

Tabel. 9
Gedung dan Bangunan

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	384.349.808.794	319.900.992.920
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	560.272.357.355	386.255.400.675
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	188.330.100.567	936.722.800
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	29.727.500.322	47.486.350.686
5	UIN Alauddin Makassar	71.185.239.158	67.431.314.458
6	IAIN Walisongo Semarang	57.839.987.000	42.545.924.700
7	IAIN Sumatera Utara	73.464.556.699	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	231.616.184.436	196.751.268.222
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	60.989.245.435	442.708.000
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	71.975.107.921	51.227.321.720
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	32.991.794.225	29.210.599.225
12	IAIN Raden Intan Lampung	60.742.468.290	42.648.351.511
13	IAIN Raden Fatah Palembang	113.279.398.975	-
14	IAIN Mataram	25.225.752.000	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		1.961.989.501.177	1.184.836.954.917

3). PERALATAN DAN MESIN

Nilai aset tanah BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.153.703.533.262,- terinci sebagai berikut :

Tabel. 10
Peralatan dan Mesin

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	150.250.290.147	106.549.151.069
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	205.102.400.320	112.164.147.313
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	54.592.511.921	6.570.023.791
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	45.477.842.686	17.721.417.422
5	UIN Alauddin Makassar	388.658.396.391	371.355.290.781
6	IAIN Walisongo Semarang	38.559.163.206	16.073.835.217
7	IAIN Sumatera Utara	28.372.400.218	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	109.688.983.208	95.105.667.266
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	21.460.949.838	2.338.651.000
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	34.815.290.277	23.010.788.017
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	13.542.464.320	8.077.577.320
12	IAIN Raden Intan Lampung	23.231.934.086	15.382.902.166
13	IAIN Raden Fatah Palembang	24.256.094.164	-
14	IAIN Mataram	15.694.812.480	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		1.153.703.533.262	774.349.451.362

4). JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai aset Jaringan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp87.198.887.324,- terinci sebagai berikut :

Tabel. 11
Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2.724.945.200	1.520.571.500
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	4.685.299.170	3.222.217.420
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	3.207.885.000	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	778.012.925	778.012.925
5	UIN Alauddin Makassar	24.936.748.800	24.929.748.800
6	IAIN Walisongo Semarang	6.496.989.770	4.464.858.770
7	IAIN Sumatera Utara	6.617.325.000	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	7.953.632.700	5.540.150.000
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	7.727.608.275	56.280.000
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	3.818.399.384	3.818.399.384
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	2.718.239.000	442.151.000
12	IAIN Raden Intan Lampung	14.439.908.100	8.154.504.100
13	IAIN Raden Fatah Palembang	785.571.000	-
14	IAIN Mataram	308.323.000	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		87.198.887.324	52.926.893.899

5). ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 senilai Rp72.377.241.731,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 12
Aset Tetap Lainnya

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	3.911.835.666	3.035.164.535
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	20.027.255.481	18.762.149.465
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	14.032.618.038	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	1.724.070.426	1.694.113.426
5	UIN Alauddin Makassar	10.556.071.096	8.416.855.102
6	IAIN Walisongo Semarang	3.115.358.058	2.504.183.293
7	IAIN Sumatera Utara	2.053.559.829	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	2.612.939.636	4.298.797.990
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	2.785.089.217	371.233.000
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	2.990.700.583	2.364.578.533
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	2.256.566.450	644.679.710
12	IAIN Raden Intan Lampung	3.029.766.040	2.940.540.040
13	IAIN Raden Fatah Palembang	699.820.064	-
14	IAIN Mataram	2.581.591.147	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		72.377.241.731	45.032.295.094

- 6). **KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**
Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2011 senilai Rp640.711.589.974,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 13
Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2.963.573.750	62.101.807.049
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	85.056.356.274	99.442.586.271
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	91.971.789.628	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	41.346.726.846	1.997.644.000
5	UIN Alauddin Makassar	300.979.745.546	274.123.121.746
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	11.293.410.200	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	5.347.581.180	25.484.762.462
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	65.867.816.150	31.237.056.450
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	35.884.590.400	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		640.711.589.974	494.386.977.978

- 7). **AKUMULASI PENYUSUTAN**
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2011 senilai Rp371.838.073.903,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 14
Akumulasi Penyusutan

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	272.365.629.007	141.427.116.425
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	39.090.563.198	39.090.563.198
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	17.180.357.075	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	43.201.524.623	31.223.976.249
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		371.838.073.903	211.741.655.872

c). ASET LAINNYA

1). ASET KERJASAMA OPERASI

Aset Kerjasama Operasi yang didapat oleh BLU per 31 Desember 2011 adalah RpNIHIL.

2). ASET SEWA GUNA USAHA

Aset Sewa Guna Usaha BLU per 31 Desember 2011 adalah sebesar RpNIHIL.

3). ASET TIDAK BERWUJUD

Aset Tidak Berwujud yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp16.291.509.276,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 15
Aset Tidak Berwujud

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	4.724.805.500	256.750.000
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	7.586.645.738	6.843.553.377
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	494.709.043	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	249.065.000	199.315.000
5	UIN Alauddin Makassar	1.897.885.600	1.897.885.600
6	IAIN Walisongo Semarang	100.387.550	85.587.550
7	IAIN Sumatera Utara	34.000.000	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	197.606.845	187.988.845
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	34.000.000	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	843.385.000	744.385.000
12	IAIN Raden Intan Lampung	7.469.000	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	38.500.000	-
14	IAIN Mataram	83.050.000	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		16.291.509.276	10.215.465.372

4). ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-Lain BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp3.152.568.367,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 16
Aset Lain-Lain

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	31.540.000	39.445.000
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	839.944.067	315.037.813
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	40.000.000	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	117.400.000	-
5	UIN Alauddin Makassar	1.210.334.000	1.273.770.250
6	IAIN Walisongo Semarang	343.164.000	343.164.000
7	IAIN Sumatera Utara	86.993.200	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	17.821.000	17.821.000
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	37.908.500	2.331.000
12	IAIN Raden Intan Lampung	421.968.600	464.670.900
13	IAIN Raden Fatah Palembang	5.495.000	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		3.152.568.367	2.456.239.963

5). AKUMULASI AMORTISASI

Aset Akumulasi Amortisasi BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.702.785.387,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 17
Akumulasi Amortisasi

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	4,653,487,637	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	49,297,750	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		4,702,785,387	-

2. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1). UTANG USAHA

Utang Usaha yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp455.335,634,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 18
Utang Usaha

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	442.189.931	331.629.016
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	13.145.703	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		455.335.634	331.629.016

2). UTANG PAJAK

Utang Pajak yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2011 sebesar RpNIHIL.

3). BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Biaya Yang Masih Harus Dibayar yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp6.558.523.453,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 19
Biaya Yang Masih Harus Dibayar

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	210.752.774	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	10.709.317	1.650.000
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	67.653.881	30.693.955
5	UIN Alauddin Makassar	9.747.621	689.060.500
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	43.070.000	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	6.007.232.000	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	17.371.000	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	191.986.860	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		6.558.523.453	721.404.455

4). PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp8.313.510.599,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 20
Pendapatan Diterima Dimuka

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	6.778.971.516	7.031.907.750
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1.303.289.083	2.133.483.533
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	155.000.000	255.000.000
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	10.209.000
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	76.250.000	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		8.313.510.599	9.430.600.283

5). BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2011 sebesar RpNIHIL

6). UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.241.763.597,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 21
Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	245.864.500
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	76.725.000	614.594.882
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	4.614.243	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	1.052.986.151	555.055.500
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	48.321.895	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	2.261.584	229.809.260
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	23.715.264	9.335.334
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	33.139.460	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		1.241.763.597	1.654.659.476

3. EKUITAS

Ekuitas adalah hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri dari ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer dan ekuitas terikat permanen. Ekuitas tidak terikat terdiri dari : 1) Ekuitas awal; 2) Surplus dan Defisit Tahun Lalu; 3) Surplus dan Defisit Tahun Berjalan dan 4) Ekuitas Donasi.

a). EKUITAS TIDAK TERIKAT

1). EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.383.237.059.751,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 22
Ekuitas Awal

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	959.247.895.639	959.532.906.546
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1.083.724.350.910	1.083.724.350.910
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	11.651.859.515	25.760.247.339
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	281.085.537.373	268.175.768.667
5	UIN Alauddin Makassar	1.099.234.016.356	-
6	IAIN Walisongo Semarang	286.615.295.337	283.973.582.696
7	IAIN Sumatera Utara	116.412.018	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	14.291.265.945	188.078.366.737
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	123.308.325.013	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	59.195.085	3.286.171.400
12	IAIN Raden Intan Lampung	164.738.260.836	157.096.109
13	IAIN Raden Fatah Palembang	261.899.830.403	-
14	IAIN Mataram	97.264.815.321	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		4.383.237.059.751	2.812.688.490.404

2). SURPLUS DAN DEFISIT TAHUN LALU

Surplus dan Defisit Tahun Lalu yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp250.456.181.252,- Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 23
Surplus Dan Defisit Tahun Lalu

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	42,031,125,050	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	128,757,651,715	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	14,777,513,560	8,296,000,091
6	IAIN Walisongo Semarang	25,592,661,244	-
7	IAIN Sumatera Utara	(13,145,703)	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	13,035,115,801	106,436,563,427
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	51,002,372	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	9,267,474,685	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	(99,965,264)	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	17,248,734,652	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	(191,986,860)	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		250,456,181,252	114,732,563,518

3). SURPLUS DAN DEFISIT TAHUN BERJALAN

Surplus dan Defisit Tahun Berjalan yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp402.795.021.594,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 24
Surplus Dan Defisit Tahun Berjalan

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	56.389.869.523	42.051.220.783
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	125.873.961.521	128.756.393.445
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	(11.116.748.789)
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	41.547.865.341	12.909.768.706
5	UIN Alauddin Makassar	(1.095.185.583)	7.245.429.469
6	IAIN Walisongo Semarang	26.547.427.400	25.592.661.244
7	IAIN Sumatera Utara	2.607.262.120	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	9.213.293.375	2.746.240.254
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	11.307.856.610	4.717.839.407
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	71.559.083.109	9.267.474.685
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	6.933.311.329	154.824.671.768
12	IAIN Raden Intan Lampung	22.604.155.698	17.248.734.652
13	IAIN Raden Fatah Palembang	3.228.337.815	-
14	IAIN Mataram	26.077.783.336,00	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		402.795.021.594	394.243.685.623

4). EKUITAS DONASI

Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat. Ekuitas Donasi yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.117.239.195.675,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 25
Ekuitas Donasi

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2,500,000,000	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	302,828,324,618	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	646,527,133,896	384,765,302,311
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	165,185,894,995	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	197,842,166	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		1,117,239,195,675	384,765,302,311

5). EKUITAS TERIKAT TEMPORER

Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh Pemerintah atau donator. Ekuitas Terikat Temporer BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.300.736.032,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 26
Ekuitas Terikat Temporer

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	863,876,000
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	120,993,200	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	254,454,332	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	881,293,500	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	43,995,000	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		1,300,736,032	863,876,000

6). EKUITAS TERIKAT PERMANEN

Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donatur. Ekuitas Terikat Permanen BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.030.651.136.025,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 27
Ekuitas Terikat Permanen

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	535,549,075,811	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	1,046,953,007,577
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	495,102,060,214	501,619,710,901
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		1,030,651,136,025	1,548,572,718,478

F. LAPORAN AKTIVITAS

**KEMENTERIAN AGAMA
LAPORAN AKTIVITAS
TAHUN 2011 DAN 2010**

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2011	TAHUN 2010	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			JUMLAH	%
PENDAPATAN				
Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan	536.713.889.714	315.249.456.964	221.464.432.750	70,25%
Pend. Operasional Perkuliahan	130.691.687.982	-	130.691.687.982	
Pend. Jasa Pelayanan Pend. Lainnya	33.536.522.229	34.798.542.535	(1.262.020.306)	-3,63%
Pend. Pendidikan	-	-	-	
Pend. Jasa Layanan Lainnya	-	-	-	
Pend. Jasa Layanan Pendidikan	49.586.592.534	280.450.914.429	(230.864.321.895)	-82,32%
Pend. Jasa Penyedia Barang&Jasa Lainnya	1.048.489.390	-	1.048.489.390	
Pend. Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	
Pend. Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	
Pend. Usaha dari Jasa Layanan	309.042.894.056	-	309.042.894.056	
Pend. Operasional dari Jasa Layanan	12.807.703.523	-	12.807.703.523	
Hibah	35.574.724.714	81.297.966.695	(45.723.241.981)	-56,24%
Terikat	34.276.724.714	81.297.966.695	(47.021.241.981)	-57,84%
Tidak Terikat	1.298.000.000	-	1.298.000.000	
Pendapatan APBN	1.315.210.730.461	1.010.359.899.992	304.850.830.469	30,17%
Operasional	879.905.511.232	1.010.359.899.992	(130.454.388.760)	-12,91%
Investasi	435.305.219.229	-	435.305.219.229	
Pendapatan Usaha Lainnya	226.709.359.639	153.634.776.678	73.074.582.961	47,56%
Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain	22.026.390.989	142.037.354.497	(120.010.963.508)	-84,49%
Sewa	3.719.769.904	2.578.456.455	1.141.313.449	44,26%
Jasa Lembaga Keuangan	6.906.872.655	4.961.578.741	1.945.293.914	39,21%
dan Lain-lain	194.056.326.091	4.057.386.985	189.998.939.106	4682,79%
Jumlah Pendapatan	2.114.208.704.528	1.560.542.100.329	553.666.604.199	35,48%
BIAYA				
Biaya Layanan				
Biaya Pegawai	390.484.914.136	609.340.385.696	(218.855.471.560)	-35,92%
Biaya Bahan	89.451.503.743	-	89.451.503.743	
Biaya Jasa Layanan	17.084.909.900	-	17.084.909.900	
Biaya Pemeliharaan	6.559.094.468	-	6.559.094.468	
Biaya Daya dan Jasa	17.390.703.704	-	17.390.703.704	
Biaya Barang	33.761.019.038	-	33.761.019.038	
Biaya Jasa	18.467.391.930	-	18.467.391.930	
Biaya Penyusutan	39.606.338.311	-	39.606.338.311	
Biaya Perjalanan	19.558.679.622	-	19.558.679.622	
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa	81.181.374.770	-	81.181.374.770	
Biaya Barang dan Jasa Lainnya	54.643.146.423	-	54.643.146.423	
Biaya Lainnya Pelayanan	35.726.092.356	-	35.726.092.356	
Jumlah Biaya Layanan	803.915.168.401	609.340.385.696	194.574.782.705	31,93%

Biaya Umum dan Administrasi			-	
Biaya Pegawai	398.629.208.148	503.732.591.356	(105.103.383.208)	-20,86%
Biaya Administrasi Perkantoran	25.810.829.142	-	25.810.829.142	
Biaya Pemeliharaan	15.046.513.302	-	15.046.513.302	
Biaya Langganan Daya dan Jasa	4.723.339.418	-	4.723.339.418	
Biaya Promosi	-	-	-	
Biaya Barang	61.744.239.852	-	61.744.239.852	
Biaya Jasa	10.394.027.666	-	10.394.027.666	
Biaya Penyusutan	13.401.622.954	-	13.401.622.954	
Biaya Perjalanan	11.800.683.139	-	11.800.683.139	
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa	8.341.283.993	-	8.341.283.993	
Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12.071.856.105	-	12.071.856.105	
Biaya Bantuan	10.252.830.000	-	10.252.830.000	
Biaya Lainnya Umum dan Administrasi	53.724.565.660	-	53.724.565.660	
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	625.940.999.379	503.732.591.356	122.208.408.023	24,26%
Biaya Lainnya			-	
Biaya Bunga	54.216.208	-	54.216.208	
Biaya Administrasi Bank	34.493.503	7.756.201	26.737.302	344,72%
Biaya Investasi	38.749.709.022	-	38.749.709.022	
Biaya Lainnya Lain-lain	32.397.408.232	-	32.397.408.232	
Jumlah Biaya Lainnya	71.235.826.965	7.756.201	71.228.070.764	918337,09%
Jumlah Biaya	1.501.091.994.745	1.113.080.733.253	388.011.261.492	34,86%
Surplus/Defisit Sebelum Pos Keuntungan/Kerugian			-	
Keuntungan/Kerugian	(97.871.788.449)	-	(97.871.788.449)	
Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-	
Rugi Penjualan Aset Aset Non Lancar	2.182.660.500	-	2.182.660.500	
Rugi Penurunan Nilai dan Lain-lain	(101.927.144.050)	-	(101.927.144.050)	
	1.872.695.101	-	1.872.695.101	
Surplus/Defisit Sebelum Pos-Pos Luar Biasa			-	
Pos Pos Luar Biasa	-		-	
Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa	-	-	-	
Biaya dari Kejadian Luar Biasa	-	-	-	
Surplus/Defisit Bruto Tahun Berjalan			-	
Penyetoran/Penarikan Kas Negara	3.672.732.535			
Surplus/Defisit Tahun Berjalan Bersih	714.661.230.768	-	714.661.230.768	
Surplus/Defisit Tahun Berjalan Di Luar Pendapatan APBN	(514.299.156.523)	-	(514.299.156.523)	

1. PENDAPATAN

a). Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan

Pendapatan Usaha dan Jasa Layanan BLU terdiri dari pendapatan operasional perkuliahan, pendapatan jasa pelayanan pendidikan lainnya, pendapatan pendidikan, pendapatan jasa layanan lainnya, pendapatan jasa layanan pendidikan, pendapatan jasa penyedia barang dan jasa lainnya, pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha, pendapatan jasa layanan perbankan, pendapatan usaha dari jasa layanan, pendapatan operasional dari jasa layanan.

1) Pendapatan operasional perkuliahan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 sebesar Rp130.691.687.982,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 28
Pendapatan operasional perkuliahan

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	96.215.210.655	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	21.965.808.900	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	12.510.668.427	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		130.691.687.982	-

2) Pendapatan jasa pelayanan pendidikan lainnya periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 sebesar Rp33.536.522.229,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 29
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Lainnya

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	6.778.529.781	12.709.859.294
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	14.776.407.000	15.511.601.750
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	11.656.520.448	5.673.371.491
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	39.505.000
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	325.065.000	864.205.000
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		33.536.522.229	34.798.542.535

- 3) Pendapatan pendidikan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 sebesar RpNIHIL
- 4) Pendapatan jasa layanan lainnya periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 sebesar RpNIHIL
- 5) Pendapatan jasa layanan pendidikan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 sebesar Rp49.586.592.534,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 30
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	31,982,131,083	25,383,548,750
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	82,522,587,297
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	2,001,133,790
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	26,997,439,000
5	UIN Alauddin Makassar	-	23,948,695,916
6	IAIN Walisongo Semarang	17,604,461,451	16,704,091,623
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	41,473,253,000
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	15,226,506,744
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	29,047,174,904
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	11,066,108,375
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	6,080,375,030
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		49,586,592,534	280,450,914,429

- 6) Pendapatan jasa penyedia baraaang dan jasa lainnya periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 sebesar Rp1.048.489.390,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 31
Pendapatan Jasa Penyedia Barang dan Jasa Lainnya

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	126,432,100	-
7	IAIN Sumatera Utara	67,143,000	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	854,914,290	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		1,048,489,390	-

- 7) Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 sebesar RpNIHIL,-
- 8) Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 sebesar RpNIHIL,-
- 9) Pendapatan Jasa Layanan Perbankan periode 1 Januari s.d 31 Desember

2011 sebesar RpNIHIL,-

- 10) Pendapatan usaha dari jasa layanan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 sebesar Rp309.042.894.056,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 32
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	39,808,420,135	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	29,354,355,000	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	16,426,408,000	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	167,538,325,406	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	11,520,845,163	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	25,086,982,000	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	19,307,558,352	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		309,042,894,056	-

- 11) Pendapatan operasional dari jasa layanan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 sebesar Rp12.807.703.523,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 33
Pendapatan Operasional dari Jasa Layanan

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	12,807,703,523	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		12,807,703,523	-

b). Hibah

Pendapatan Hibah terdiri dari Hibah terikat dan hibah tidak terikat.

- 1) Pendapatan hibah terikat periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 sebesar Rp34.276.724.714,- dan hibah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 34
Hibah Terikat

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	58,000,000	144,000,000
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	2,143,797,500	2,387,302,250
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	24,452,632,714	6,351,931,695
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	71,933,941,000
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	199,965,000	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	480,791,750
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	7,422,329,500	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		34,276,724,714	81,297,966,695

- 2) Pendapatan hibah tidak terikat periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 sebesar Rp1.298.000.000,- dan hibah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 35
Hibah Tidak Terikat

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	131,000,000	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	1,167,000,000	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		1,298,000,000	-

- c). Pendapatan APBN
 Realisasi Pendapatan APBN terdiri dari Pendapatan Operasional dan Pendapatan APBN Investasi.
 1) Pendapatan APBN operasional periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp879.905.511.232,-

Tabel. 36
 Pendapatan APBN Operasional

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	87,297,625,208	102,073,238,031
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	158,262,420,379	259,498,410,866
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	55,176,742,151	48,973,967,475
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	116,928,174,455	110,361,325,748
5	UIN Alauddin Makassar	94,181,406,368	78,851,811,650
6	IAIN Walisongo Semarang	70,497,229,300	71,168,464,363
7	IAIN Sumatera Utara	74,775,992,825	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	71,933,941,000
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	59,520,296,097	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	89,439,822,982	171,779,046,418
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	29,363,113,725	43,798,557,531
12	IAIN Raden Intan Lampung	44,462,687,742	51,921,136,910
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		879,905,511,232	1,010,359,899,992

- 2) Pendapatan APBN investasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp435.305.219.229,-

Tabel. 36
 Pendapatan APBN Investasi

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	47.089.669.500	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	81.447.380.191	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	48.889.556.704	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	48.599.509.846	-
5	UIN Alauddin Makassar	35.256.829.510	-
6	IAIN Walisongo Semarang	33.812.011.140	-
7	IAIN Sumatera Utara	34.928.535.672	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	63.606.030.176	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	14.607.344.940	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	27.068.351.550	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		435.305.219.229	-

- d). Pendapatan usaha lainnya
1) Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain

Pendapatan Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp22.026.390.989,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 37
Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	15.483.602.312	6.258.207.428
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	3.936.988.421	3.605.264.280
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	27.075.000	131.586.272.789
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	144.700.000	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	2.390.316.890	450.360.000
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	137.250.000
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	43.708.366	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		22.026.390.989	142.037.354.497

- 2) Sewa

Pendapatan BLU dari sumber Sewa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp3.719.769.904,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 38
Sewa

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	895.991.715	387.960.000
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1.646.133.355	1.151.092.432
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	226.500.000	798.677.441
5	UIN Alauddin Makassar	111.000.000	77.600.000
6	IAIN Walisongo Semarang	785.744.834	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	24.950.000	22.321.000
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	140.805.582
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	29.450.000	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		3.719.769.904	2.578.456.455

3) Jasa Lembaga Keuangan

Pendapatan BLU dari Jasa Lembaga Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp6.906.872.655,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 39
Jasa Lembaga Keuangan

	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1.322.671.046	1.352.239.370
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	2.844.811.007	2.716.337.784
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	171.610.678	245.200.234
5	UIN Alauddin Makassar	462.471.279	316.220.473
6	IAIN Walisongo Semarang	759.883.908	-
7	IAIN Sumatera Utara	125.375.837	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	423.226.470	297.100.533
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	104.556.803	34.480.347
13	IAIN Raden Fatah Palembang	635.804.347	-
14	IAIN Mataram	56.461.280	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		6.906.872.655	4.961.578.741

4) Pendapatan Usaha Lain-Lain

Pendapatan usaha lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp194.056.326.091,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 40
Pendapatan Usaha Lain-Lain

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	182.820.896	3.882.307.827
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	169.167.689.536	132.522.916
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	20.624.797.524	-
6	IAIN Walisongo Semarang	539.437.559	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	10.209.000
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	32.347.242
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	3.541.580.576	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		194.056.326.091	4.057.386.985

2. BIAYA

a). Biaya Layanan

Merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, biaya barang, biaya jasa, biaya penyusutan, biaya perjalanan, biaya penyediaan barang dan jasa, biaya barang dan jasa lainnya, biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU. Biaya layanan BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp803.915.168.401,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 41
Biaya Layanan

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	84.018.540.998	109.996.139.918
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	167.647.381.153	118.652.517.971
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	34.915.392.895	16.337.337.247
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	104.384.918.105	62.973.188.497
5	UIN Alauddin Makassar	37.782.398.394	22.770.458.411
6	IAIN Walisongo Semarang	78.220.972.405	68.631.826.437
7	IAIN Sumatera Utara	16.420.459.000	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	48.955.039.442	110.660.953.746
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	59.758.234.650	10.541.197.337
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	90.149.311.720	67.197.187.681
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	12.910.167.850	7.917.186.975
12	IAIN Raden Intan Lampung	44.609.663.067	13.662.391.476
13	IAIN Raden Fatah Palembang	16.695.146.821	-
14	IAIN Mataram	7.447.541.901	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
umlah		803.915.168.401	609.340.385.696

b). Biaya Umum dan Administrasi

Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLU. Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa, biaya promosi, biaya barang, biaya jasa, biaya penyusutan, biaya perjalanan, biaya penyediaan barang dan jasa, biaya barang dan jasa lainnya, biaya bantuan, biaya lainnya. Biaya Umum dan Administrasi BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp625.940.999.379,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 42
Biaya Umum dan Administrasi

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	50.623.273.020	109.996.139.925
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	132.906.553.819	117.871.505.909
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	55.176.742.151	55.735.439.715
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	49.439.503.533	58.597.733.707
5	UIN Alauddin Makassar	94.181.406.368	74.234.931.650
6	IAIN Walisongo Semarang	26.403.149.845	-
7	IAIN Sumatera Utara	44.270.069.464	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	108.706.827.910	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	20.091.990.979	15.035.274.211
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	26.875.358.645	43.798.557.531
12	IAIN Raden Intan Lampung	17.266.123.645	28.463.008.708
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		625.940.999.379	503.732.591.356

c). Biaya Lainnya

Merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam biaya layanan dan biaya umum dan administrasi. Biaya ini antara lain meliputi biaya bunga, biaya administrasi bank, biaya investasi, dan biaya lain-lain. Biaya Lainnya BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp71.235.826.965,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 43
Biaya Lainnya

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1,358,000	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	54,547,208	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	17,406,283,357	-
7	IAIN Sumatera Utara	38,773,761,682	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	907,000	902,000
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	14,967,869,940	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	20,837,113	6,854,201
13	IAIN Raden Fatah Palembang	10,262,665	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		71,235,826,965	7,756,201

3. SURPLUS/DEFISIT

Surplus & Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus & Defisit pada periode-periode sebelumnya sedangkan Surplus & Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

Surplus/defisit BLU dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp353.093.697.887,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 44
Surplus/ Defisit Tahun Berjalan Bersih

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	56,389,869,524	42,051,220,783
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	(31,839,283,259)	128,756,393,445
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	55,528,074,169	12,023,721,732
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	41,547,865,341	12,909,768,706
5	UIN Alauddin Makassar	52,322,104,267	7,245,429,469
6	IAIN Walisongo Semarang	26,547,427,400	25,592,551,244
7	IAIN Sumatera Utara	27,003,865,188	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	9,876,458,054	2,746,240,254
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	11,307,856,610	4,717,839,407
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	71,559,083,109	9,267,474,685
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	6,933,311,329	3,286,171,400
12	IAIN Raden Intan Lampung	22,604,155,697	17,248,734,652
13	IAIN Raden Fatah Palembang	3,237,953,213	-
14	IAIN Mataram	74,957,245	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		353,093,697,887	265,845,545,777

**KEMENTERIAN AGAMA
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 2011 DAN 2010**

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2011	TAHUN 2010	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			JUMLAH	%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Arus Masuk	1.956.826.638.047	1.609.409.014.092	347.417.623.955	21,59%
Pend. Usaha dari Jasa Layanan	375.325.930.419	280.450.914.429	94.875.015.990	33,83%
Pend. Hibah	27.589.417.259	81.297.966.695	(53.708.549.436)	-66,06%
Pend. APBN (Murni)	1.443.523.405.922	1.010.359.899.992	433.163.505.930	42,87%
Pend. Usaha Lainnya	110.387.884.447	237.300.232.976	(126.912.348.529)	-53,48%
Arus Keluar	1.336.237.759.395	1.113.080.733.253	223.157.026.142	20,05%
Biaya Layanan	720.580.665.626	609.340.385.696	111.240.279.930	18,26%
Biaya Umum dan Administrasi	542.809.603.345	503.732.591.356	39.077.011.989	7,76%
Biaya Lainnya	72.847.490.424	7.756.201	72.839.734.223	939116,12%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	620.588.878.652	2.722.489.747.345	(2.101.900.868.693)	-77,21%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Arus Masuk	10.100.000	-	10.100.000	
Hasil Penjualan Aset Tetap	10.100.000	-	10.100.000	
Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang	-	-	-	
Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	-	-	
Arus Keluar	672.203.241.823	480.514.422.833	191.688.818.990	39,89%
Perolehan Aset Tetap	654.956.207.998	456.993.681.895	197.962.526.103	43,32%
Perolehan Investasi Jangka Panjang	-	-	-	
Perolehan Aset Lainnya	17.247.033.825	23.520.740.938	(6.273.707.113)	-26,67%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(672.193.141.823)	480.514.422.833	(1.152.707.564.656)	-239,89%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Arus Masuk	179.057.568.255	10.209.000	179.047.359.255	1753818,78%
Perolehan Pinjaman	-	10.209.000	(10.209.000)	-100,00%
Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman	179.057.568.255	-	179.057.568.255	
Arus Keluar	-	-	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	
Pemberian Pinjaman	-	-	-	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	179.057.568.255	10.209.000	179.047.359.255	1753818,78%
Kenaikan Bersih Kas	127.453.305.084	3.203.014.379.178	(3.075.561.074.094)	-96,02%
Kas dan Setara Kas Awal	137.063.195.652	-	137.063.195.652	
Jumlah Saldo Kas	264.516.500.736	3.203.014.379.178	(2.938.497.878.443)	-91,74%

G. LAPORAN ARUS KAS**1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI****a). ARUS MASUK****1) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan**

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Realisasi Pendapatan Usaha dari Jasa Lainnya BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp375.325.930.419,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 45
Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	38.087.195.668	25.383.548.750
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	111.315.176.752	82.522.587.297
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	39.808.420.135	2.001.133.790
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	29.354.355.000	26.997.439.000
5	UIN Alauddin Makassar	33.622.329.348	23.948.695.916
6	IAIN Walisongo Semarang	17.730.893.551	16.704.091.623
7	IAIN Sumatera Utara	16.426.408.000	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	41.473.253.000
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	11.520.845.163	15.226.506.744
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	25.086.982.000	29.047.174.904
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	12.807.703.523	11.066.108.375
12	IAIN Raden Intan Lampung	12.835.733.427	6.080.375.030
13	IAIN Raden Fatah Palembang	19.307.558.352	-
14	IAIN Mataram	7.422.329.500	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		375.325.930.419	280.450.914.429

2) Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp27.589.417.259,- sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel. 46
Pendapatan Hibah

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	144,000,000
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	2,143,797,500	2,387,302,250
5	UIN Alauddin Makassar	24,078,654,759	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	6,351,931,695
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	71,933,941,000
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	1,366,965,000	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	480,791,750
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		27,589,417,259	81,297,966,695

3) Pendapatan APBN (Rupiah Murni)

Pendapatan APBN BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp1.443.523.405.922,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 47
Pendapatan APBN (Rupiah Murni)

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	134.405.290.249	102.073.238.031
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	239.709.800.570	259.498.410.866
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	104.066.298.855	48.973.967.475
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	165.527.684.301	110.361.325.748
5	UIN Alauddin Makassar	146.262.097.798	78.851.811.650
6	IAIN Walisongo Semarang	104.309.240.440	71.168.464.363
7	IAIN Sumatera Utara	109.704.528.497	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	111.470.818.000	71.933.941.000
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	59.520.296.097	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	153.045.853.158	171.779.046.418
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	43.970.458.665	43.798.557.531
12	IAIN Raden Intan Lampung	71.531.039.292	51.921.136.910
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		1.443.523.405.922	1.010.359.899.992

4) Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan Usaha Lainnya BLU adalah pendapatan diluar dari jasa pokok yang disediakan oleh BLU, yang terdiri dari Hasil Kerjasama, Sewa, Pendapatan Jasa lembaga Keuangan dan Pendapatan Lain-Lain. Pendapatan Usaha Lainnya BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp110.387.884.447,- sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel. 48
Pendapatan Usaha Lainnya

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	18.321.662.836	40.104.095
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	7.361.655.453	166.609.803.636
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	298.110.678	788.877.675
5	UIN Alauddin Makassar	4.401.481.883	-
6	IAIN Walisongo Semarang	2.085.066.301	-
7	IAIN Sumatera Utara	337.218.837	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	69.102.623.207	68.199.807.748
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	359.220.160	22.321.000
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	3.670.719.234	1.440.602.252
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	3.541.580.576	164.236.223
12	IAIN Raden Intan Lampung	172.571.289	34.480.347
13	IAIN Raden Fatah Palembang	635.804.347	-
14	IAIN Mataram	100.169.646	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		110.387.884.447	237.300.232.976

b). ARUS KELUAR

1) Biaya Layanan

Realisasi Biaya Layanan BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp720.580.665.626,- sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel. 49
Biaya Layanan

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	84,163,220,511	109,996,139,918
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	131,504,598,856	118,652,517,971
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	34,915,392,895	16,337,337,247
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	101,954,641,381	62,973,188,497
5	UIN Alauddin Makassar	32,824,462,790	22,770,458,411
6	IAIN Walisongo Semarang	78,220,972,405	68,631,826,437
7	IAIN Sumatera Utara	16,420,459,000	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	53,616,514,846	110,660,953,746
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	59,758,234,650	10,541,197,337
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	90,149,311,720	67,197,187,681
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	12,910,167,850	7,917,186,975
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	13,662,391,476
13	IAIN Raden Fatah Palembang	16,695,146,821	-
14	IAIN Mataram	7,447,541,901	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		720,580,665,626	609,340,385,696

2) Biaya umum dan Administrasi

Biaya Umum dan Administrasi BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp542.809.603.345,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 50
Biaya Umum dan Administrasi

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	51.569.438.827	109.996.139.925
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	122.021.086.365	117.871.505.909
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	55.176.742.151	55.735.439.715
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	50.035.418.450	58.597.733.707
5	UIN Alauddin Makassar	94.181.406.368	74.234.931.650
6	IAIN Walisongo Semarang	26.403.149.845	-
7	IAIN Sumatera Utara	44.270.069.464	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	52.184.942.251	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	20.091.990.979	15.035.274.211
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	26.875.358.645	43.798.557.531
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	28.463.008.708
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		542.809.603.345	503.732.591.356

3) Biaya Lainnya

Biaya Lainnya BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp72.847.490.424 - sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 51
Biaya Lainnya

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1,358,000	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	4,957,935,604	-
6	IAIN Walisongo Semarang	690,424,140	-
7	IAIN Sumatera Utara	24,052,660	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	51,860,410,255	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	334,270,160	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	907,000	902,000
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	14,967,869,940	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	6,854,201
13	IAIN Raden Fatah Palembang	10,262,665	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		72,847,490,424	7,756,201

2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

a). ARUS MASUK

1) Hasil Penjualan Aset Tetap

Kas Masuk dari Hasil Penjualan Aset Tetap BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp10.100.000,-

Tabel. 52
Hasil Penjualan Aset tetap

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	10.100.000	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		10.100.000	-

2) Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang

Kas Masuk dari Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar RpNIHIL.

3) Hasil Penjualan Aset Lainnya

Kas Masuk dari Hasil Penjualan Aset Lainnya BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar RpNIHIL.

b). ARUS KELUAR

1) Perolehan Aset Tetap

Kas untuk Perolehan Aset Tetap BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp654.956.207.998,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 53
Perolehan Aset tetap

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	52.406.532.445	30.510.874.549
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	90.291.721.445	172.697.216.128
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	50.762.251.805	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	52.974.596.970	22.271.496.594
5	UIN Alauddin Makassar	53.417.289.850	-
6	IAIN Walisongo Semarang	36.965.308.373	19.972.635.610
7	IAIN Sumatera Utara	38.749.709.022	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	83.423.462.506
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	12.587.875.159	3.208.872.000
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	66.677.019.086	110.285.501.102
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	200.123.903.843	14.623.623.406
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		654.956.207.998	456.993.681.895

2) Perolehan Investasi Jangka Panjang

Kas untuk Perolehan Investasi Jangka Panjang BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp NIHIL.

3) Perolehan Aset Lainnya

Kas untuk Perolehan Aset Lainnya BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp17.247.033.825,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 54
Perolehan Aset Lainnya

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	743,092,362	1,925,716,864
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	16,040,503,863	21,595,024,074
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	34,000,000	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	429,437,600	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		17,247,033,825	23,520,740,938

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

a). ARUS MASUK

1) Perolehan Pinjaman

Kas Masuk dari Perolehan Pinjaman BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar RpNIHIL

2) Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman

Kas Masuk dari Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp179.057.568.255, sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 55
Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	-	-
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	-
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	-
5	UIN Alauddin Makassar	-	-
6	IAIN Walisongo Semarang	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-	-
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	-	-
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	-	-
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	179,057,568,255	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
14	IAIN Mataram	-	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		179,057,568,255	-

b). ARUS KELUAR

1) Pemberian Pinjaman

Kas untuk Pemberian Pinjaman BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar RpNIHIL.

2) Pembayaran Pokok Pinjaman

Pembayaran Pokok Pinjaman Pinjaman BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar RpNIHIL.

4. KENAIKAN BERSIH KAS

Kenaikan Bersih Kas BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp127.453.305.083,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 56
Kenaikan Bersih Kas

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2.673.598.970	7.767.185.437
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	13.836.233.747	(8.013.129.356)
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	3.020.332.139	-
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	(7.640.709.322)	686.862.912
5	UIN Alauddin Makassar	(1.095.185.583)	6.481.513.469
6	IAIN Walisongo Semarang	5.924.000.288	5.414.606.763
7	IAIN Sumatera Utara	27.003.865.188	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	6.871.069.992	4.164.317.101
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	(1.280.018.550)	1.508.967.407
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	4.850.325.607	9.787.463.580
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	6.933.311.329	3.286.171.400
12	IAIN Raden Intan Lampung	63.043.570.820	2.625.111.246
13	IAIN Raden Fatah Palembang	3.237.953.213	-
14	IAIN Mataram	74.957.245	-
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	-	-
Jumlah		127.453.305.083	33.709.069.959

5. KAS DAN SETARA KAS AWAL

Kas dan Setara Kas Awal adalah jumlah Saldo Kas Pada Awal Tahun Anggaran.

Tabel. 57
Kas dan Setara Kas Awal

No	Nama Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	26.083.384.687	
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	33.656.064.159	
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	10.360.722.281	
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	9.161.588.899	
5	UIN Alauddin Makassar	14.777.513.560	
6	IAIN Walisongo Semarang	7.364.792.302	
7	IAIN Sumatera Utara	2.607.262.120	
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	15.457.592.876	
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	1.508.967.407	
10	IAIN Sunan Ampel Surabaya	9.787.463.580	
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	-	
12	IAIN Raden Intan Lampung	2.625.111.246	
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	
14	IAIN Mataram	3.672.732.535	
15	IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh		
Jumlah		137.063.195.652	-

